



YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMHAN DAN TNI
TAHUN 2022
JAKARTA, JULI 2023

**TNI ANGKATAN DARAT PERTAHANKAN
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

ISSN 2086-9320



9772086932001

EDISI SEPTEMBER 2023



PROLOG



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 43 Nomor III Edisi September 2023. Jurnal ini menyajikan beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari para Pati dan Pamen TNI AD yang bertugas di Satuan jajaran TNI AD.

Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca dimana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A.

Wakil Penanggung Jawab
Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto

Pemimpin Redaksi
Kolonel Arh Sudrajat, S.I.P., M.I.P.

Sekretaris Redaksi
Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.

Redaktur Pelaksana
Letkol Caj Triyono, S.I.P.

Redaktur Bahasa
Mayor Caj (K) Besarah Septiana M., S.S.

Koordinator Liputan
Kapten Inf Moch Holil

Desain Grafis
Sertu (K) Intan Indah Permatasari

Editor
Serma Taufik Armanto

Reporter
PNS Listin

YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Alamat Redaksi
Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300

Alamat Email
palaganyudhagama@gmail.com,
dispenad@mbesad.mil.id

Website
<http://www.tniad.mil.id>

Youtube
TNI Angkatan Darat

Facebook
<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

Twitter
https://twitter.com/TNI_AD_Official

Instagram
https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat



06

Irjenad

UPAYA TNI ANGKATAN DARAT MEMPERTAHANKAN
OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN

13

Danpusterad

PERAN SATUAN TERITORIAL DALAM
MENJAGA NETRALITAS PRAJURIT
PADA PEMILU TAHUN 2024

18

Pangdam XVII/Cenderawasih

KEMBALI MERAJUT HARAPAN DI TANAH PAPUA

25

Kadisjarahad

PENGUATAN KARAKTER PRAJURIT
MELALUI SEJARAH SATUAN

31

Kasubditbinsiapsat dan Alutsista Sdirsén Pussenarmed

ALUTSISTA ARMED TNI AD SAAT INI

36

Kasiren Korem 072/Pamungkas Kodam IV/Dip

ANALISIS PENINGKATAN STATUS KOREM 072/PAMUNGKAS
MENJADI KOMANDO DAERAH MILITER DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

46

Danbrigif 19/Khatulistiwa

KAPABILITAS GELAR KEKUATAN TNI AD
DI PERBATASAN NEGARA YANG OPTIMAL
SECARA BERKELANJUTAN

52

Dandim 0317/Tbk

PENGEMBANGAN PERAN KODIM DI WILAYAH
PAPUA

59

Danyonif 100/Raider

OPTIMALISASI OPERASI PENANGANAN
KONFLIK DI PAPUA

73

Kasilitbang Baglitbang Disbintalad

INTERNALISASI PANCASILA GUNA MENCEGAH
BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME DI
KALANGAN PRAJURIT

78

Kasipen Puspomad

CORPS POMAD YANG PROFESIONAL,
MODERN, ADAPTIF, DAN TANGGUH DALAM
MENJAGA DISIPLIN DAN KEAMANAN

81

Kasimindik Bagmindik Secapaad

PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS SKS PRODI
DIKTUKPA TNI AD PROGRAM D-3

UPAYA TNI ANGKATAN DARAT MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN



OLEH : LETJEN TNI ALFRET DENNY D. TUEJEH
(IRJENAD)

Opini atas Laporan Keuangan (LK) merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Standar opini diwajibkan oleh Presiden RI terhadap Kementerian/Lembaga/Pemda termasuk Kemhan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana

BPK meyakini bahwa auditi telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, menyajikan bukti material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi. Opini WTP merupakan impian seluruh lembaga pemerintah karena menjadi bukti dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada Presiden, publik dan masyarakat.

Pada tahun 2023, Kemhan dan TNI termasuk TNI AD meraih predikat opini WTP untuk yang kelima kalinya sejak tahun 2018. Capaian ini memberikan dampak signifikan pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan tugas

sekaligus menjadi landasan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tugas pokok Kemhan dan TNI. Unit Organisasi (UO) jajaran Kemhan dan TNI khususnya TNI AD sebagai pengelola keuangan terbesar harus menjaga dan mempertahankan capaian ini, dengan terus bekerja keras dilandasi kebersihan hati, niat tulus dan ikhlas serta mampu bekerja cerdas dalam pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara.

Itjenad selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan TNI AD memiliki peran strategis membantu Kasad bidang pengawasan untuk meyakini setiap program dijalankan sesuai ketentuan serta seluruh anggaran dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan oleh Itjenad meliputi pengawasan kinerja, perbendaharaan maupun khusus dalam rangka mencapai tugas pembinaan kekuatan (Binkuat). Peran pengawasan menjadi penting untuk memberi keyakinan pimpinan bahwa pencapaian tugas pokok diimbangi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Negara ditandai dengan dipertahankannya opini WTP.



Rikmin Post Audit TA 2023 Di Satker Jajaran TNI AD



Penerimaan Piagam Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu)



Buka Diklat Auditor Geronwandi TA 2023

KONDISI ITJENAD SELAKU APIP DAN LINGKUP PENGAWASAN



Cek fisik Alkapsus Pussansiad pada Post Audit TA 2023

Itjenad bertugas pokok membantu Kasad dalam menyelenggarakan pengawasan umum, perbendaharaan dan khusus. Pengawasan umum, adalah pengawasan kinerja penyelenggaraan fungsi intelijen, operasi, latihan, personel dan teritorial; Pengawasan perbendaharaan merupakan pengawasan terhadap kinerja logistik, perencanaan dan pengadaan; serta Pengawasan khusus merupakan pengawasan atas adanya penyimpangan kinerja dan keuangan di jajaran TNI AD yang bersifat luar biasa, menjadi isu nasional dan bersifat khusus serta melakukan verifikasi keuangan dan materiil.

Itjenad dalam SPIP menyelenggarakan lima (5) kegiatan utama yaitu Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi TNI AD dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Peran Itjenad dalam pengawasan internal mencakup pemberian kepastian/jaminan (*quality assurance*) dan memberikan konsultasi (*consulting*) sebagai masukan yang berguna, obyektif dan independen untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kinerja. Paradigma yang dikembangkan Itjenad tidak lagi sebagai pencari kesalahan (*watchdog*) tetapi bersifat kemitraan (*partnership*).

Lingkup pengawasan yang diemban oleh Itjenad meliputi 59 entitas jajaran TNI AD mulai Staf Umum, Kotama dan Balakpus serta Lembaga Non Struktural meliputi Inkopad, BP TWP, Yayasan KEP dan Yayasan Kartika Jaya. Penyelenggaraan pengawasan sampai dua tingkat di bawah Mabesad meliputi 329 Satker termasuk Satker Badan Layanan Umum dan pada kondisi tertentu dapat menjangkau satuan TNI AD terbawah.

LANGKAH STRATEGIS TNI AD MEMPERTAHAKAN OPINI WTP

TNI AD sebagai bagian dari Kemhan dan TNI tentu berkomitmen untuk mempertahankan Opini WTP melalui berbagai upaya perbaikan secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan membangun sinergi bersama lembaga negara lain. Demikian halnya dalam tugas Binkuat, TNI AD berkomitmen menyelenggarakan Program Kerja dan Anggaran secara efektif, efisien, ekonomis dan taat / patuh terhadap aturan perundang-undangan untuk mencapai Tugas Pokok tersebut.

Langkah strategis TNI AD mempertahankan Opini WTP, merupakan langkah komprehensif menghadapi perubahan di masa datang yang berlangsung secara cepat. Upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh sehingga diperlukan kebijakan pimpinan sebagai pedoman dan pemberi arah dalam pelaksanaannya bagi unsur pelaksana dan personel TNI AD dalam menjalankan tugas masing-masing. Pada aplikasinya, sangat diperlukan komunikasi dan koordinasi yang komprehensif serta terkendali agar pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan pimpinan dapat dipahami sekaligus dilaksanakan oleh satuan sampai tingkat terbawah. Menyikapi komitmen mempertahankan opini WTP, dapat dirumuskan beberapa langkah strategis mempertahankannya sebagai berikut:

PERTAMA, MENINGKATKAN SINERGITAS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN LAIN DAN PENGAWAS EKSTERNAL

Sinergitas dengan lembaga lain maupun dengan pengawas eksternal membutuhkan komunikasi dan koordinasi intensif untuk memahami segala aturan dan ketentuan yang mengikat TNI AD dalam manajemen pemerintahan. Pemahaman tersebut dilanjutkan dengan mempedomani setiap aturan yang dikeluarkan lembaga/kementerian



Uji Petik Gelar Pasukan pada Post Audit TA 2023

lain terutama tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan maupun berkaitan dengan pengelolaan keuangan. TNI AD dalam pelaksanaan tugasnya turut serta dalam berbagai penilaian dan kriteria yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM), sampai penilaian Tingkat Kepercayaan Publik terhadap lembaga negara. Langkah-langkah membangun sinergisitas ini merupakan penunjang utama mempertahankan Opini WTP.

Kerjasama dan sinergisitas dengan pemeriksa eksternal juga dilakukan oleh TNI AD untuk mendapatkan hasil pemeriksaan atau hasil audit yang berkualitas. Kerjasama dengan BPK RI dilakukan untuk menemukan permasalahan pengelolaan Keuangan Negara yang selanjutnya dilakukan penilaian dan penyelesaian secara komprehensif. Tugas BPK RI untuk melakukan audit atas pengelolaan Keuangan Negara disikapi dengan penyajian data yang akurat disertai pemahaman komprehensif atas

permasalahan yang ditemukan serta menjalankan rekomendasi yang diberikan. Kerjasama sekaligus penghargaan yang baik atas peran BPK RI dalam melakukan pemeriksaan atas LK merupakan langkah strategis utama untuk terus mempertahankan Opini WTP.

Pelaksanaan pengawasan juga tidak terlepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang mendapat amanat dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pengawasan atas keuangan pembangunan. Kerjasama dan sinergi dengan BPKP dilakukan melalui peningkatan pemahaman tugas pengawasan level strategis sampai level teknis. Aktualisasi kerjasama dengan BPKP dilakukan dalam bentuk Diklat Auditor bagi personel TNI AD, audit atas permasalahan tertentu yang terjadi dan diminta TNI AD serta ikut serta dalam berbagai kriteria penilaian Lembaga Negara seperti Penilaian Maturitas SPIP, penilaian Manajemen Indeks Risiko dan Penilaian Indeks Persepsi Korupsi. BPKP juga terus melakukan pendampingan atas pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan lain yang dilakukan Itjenad.

KEDUA, MELAKSANAKAN PENGAWASAN SEJAK TAHAP PERENCANAAN.

Paradigma baru pengawasan saat ini lebih mengedepankan pendampingan (*consulting activities*) yang berimplikasi pada semakin intensifnya langkah-langkah untuk melakukan komunikasi timbal balik antara auditi dan auditor dalam melaksanakan program kerja dan pertanggungjawaban keuangan. Tugas pendampingan Itjenad dilakukan sejak proses perencanaan atau penyusunan RKA dengan metode *pre audit*. Pendampingan penyusunan RKA ini lebih ditekankan pada kesesuaian antara Rencana Jangka Panjang, Renstra (5 tahunan) dan Tahunan. *Pre audit* juga

ditujukan pada penilaian keluaran (*output*) kegiatan yang diinginkan, kesesuaian output dengan anggaran serta strategi pencapaian yang akan dilakukan. *Pre audit* juga ditujukan untuk meyakinkan pelaksana kegiatan pada tahun berjalan mampu menyelenggarakannya dengan menilai urgensi kegiatan, standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang dipersyaratkan.

Tahapan pendampingan berikutnya yang dilakukan Itjenad adalah pendampingan pada saat program kerja dan anggaran sedang berjalan (*current audit*). Pada tahap ini, auditor melakukan audit untuk memberikan masukan, koreksi dan saran perbaikan atas pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Pelaksanaan *current audit* diikuti langkah penerapan Manajemen Risiko, yaitu antisipasi munculnya risiko atas pelaksanaan program kerja dan anggaran mulai risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dipetakan menjadi beberapa tingkatan mulai risiko yang dihindari (*risk avoidance*), risiko yang ditahan atau ditanggung (*risk retention*), risiko yang dapat dialihkan (*risk transfer*) serta risiko yang dikendalikan (*risk control*). Mengingat *current audit* bersifat pendampingan, maka kepada auditi diharapkan tanggapan positifnya untuk memperbaiki kinerja yang menghasilkan output setara dengan anggaran yang dikeluarkan serta memperbaiki administrasi khususnya pertanggungjawaban keuangan.

Langkah akhir kegiatan pengawasan oleh Itjenad adalah kegiatan *post audit* atau audit atas pelaksanaan program kerja dan anggaran yang telah dilakukan untuk memberikan jaminan (*assurance activities*) atas pencapaian

kinerja dan pertanggungjawaban keuangan. Pada pelaksanaannya, auditor melakukan pengawasan atas program kerja tahun sebelumnya untuk menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, serta aspek efektif, efisien dan ekonomis (2K3E) dalam pelaksanaannya. Mengingat sifat post audit adalah penjaminan, serta telah dilakukan pendampingan pada proses penyusunan RKA (*pre audit*) dan pendampingan pelaksanaan (*current audit*), maka bagi entitas yang masih ditemukan kesalahan diwajibkan untuk menjawab temuan dalam bentuk Atensi Hasil Audit (AHA), pengembalian kerugian keuangan negara serta tindakan administratif terhadap pejabat maupun satuan yang menjadi objek pengawasan. Sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan LK, maka pelaksanaan post audit dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK RI.

Pelaksanaan audit melalui pendampingan dan penjaminan tidak sepenuhnya menjamin terlaksananya kegiatan sekaligus pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara baik dan benar. Guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dan penyimpangan tersebut, maka Itjenad serta Inspektorat Kotama/Balakpus juga melaksanakan kegiatan Reviu, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan lainnya atas setiap aktivitas organisasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan dan produk yang dikeluarkan telah memenuhi kaidah, aturan serta ketentuan yang dipersyaratkan. Reviu dilakukan dalam bentuk reviu RKA, reviu Penyerapan Anggaran, reviu Pengadaan Barang dan Jasa, reviu Revisi Anggaran dan revisi Laporan Keuangan. Demikian halnya dengan evaluasi dilakukan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan Satker. Pendampingan dilakukan terhadap audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas eksternal (BPK, BPKP, Itjen Kemhan dan Itjen TNI). Pengawasan lain

dilakukan berupa verifikasi serah terima pejabat, verifikasi reorganisasi maupun likuidasi organisasi dalam lingkungan TNI AD.

KETIGA. PENINGKATKAN KAPABILITAS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kapabilitas organisasi Itjenad merupakan syarat utama dalam mempertahankan Opini WTP, dimana organisasi Itjenad disusun sesuai kebutuhan serta fleksibel dalam menghadapi dinamika lingkungan. Demikian halnya dengan peningkatan kualitas SDM merupakan upaya yang tidak dapat diabaikan agar tugas penjaminan dan konsultasi dapat berjalan efektif, efisien dan mencapai hasil optimal.

Organisasi Itjenad disusun secara mendalam, mulai dari tingkat pusat (Mabesad) sampai Kotama dan Balakpus, termasuk organisasi tingkat bawah dimana pengawasan dilakukan secara intensif oleh unsur pimpinan. Organisasi Itjenad disusun secara simetris dengan organisasi Staf Umum sampai tingkat Paban yang identik dengan Inspektorat Utama (Irut) Itjenad. Demikian halnya organisasi tingkat Kotama/Balakpus telah mengakomodasi kepentingan pengawasan Kinerja dan Perbendaharaan. Penyusunan organisasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pengawasan sepanjang waktu serta sesuai dengan kebutuhan dan tugas maupun fungsi bagian atau satuan yang diawasi.

Peningkatan kapabilitas organisasi Itjenad lain yang dilakukan adalah dibentuknya unsur pengawas khusus untuk menangani permasalahan yang bersifat khusus, menjadi isu nasional serta permasalahan besar yang memerlukan penanganan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan dalam organisasi TNI AD. Berkaitan dengan fungsi khusus Pengadaan, Itjenad juga dilengkapi

dengan Inspektorat Pengadaan untuk melakukan pengawasan terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan TNI AD yang bernilai strategis, membutuhkan anggaran besar serta mempunyai potensi besar risiko kegagalan yang dilakukan sejak proses penentuan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran sampai penggunaan oleh satuan jajaran TNI AD.

Langkah lain dalam peningkatan kapabilitas organisasi Itjenad dan Inspektorat Kotama/Balakpus adalah menjadikan Itjenad selaku Wasgiat fungsi Pengawasan yang berwenang dalam pembinaan kemampuan dan pembinaan administrasi Inspektorat Kotama/Balakpus, namun tanpa mengambil alih tugas dan kewenangan Pimpinan Kotama dan Balakpus. Dalam aplikasinya, fungsi pengawasan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas personel, pengendalian kegiatan dan anggaran serta melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kotama/ Balakpus.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Itjenad juga dilakukan dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi e-audit. Pemanfaatan e-audit dilakukan dengan melaksanakan tugas audit setiap saat melalui aplikasi yang mengharuskan auditor Itjenad untuk mengakses data serta melaksanakan audit di atas meja (*desk audit*) untuk selanjutnya menetapkan prioritas pelaksanaan audit secara langsung (tatap muka) terhadap satuan atau program kerja yang dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaan, hasil (*output*) tidak tercapai serta pertanggungjawaban keuangannya diragukan.

Peningkatan kualitas SDM sebagai prasyarat utama dalam mempertahankan



Opini WTP dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terarah yang dimulai dari pemilihan personel dengan kualitas, kapabilitas serta mentalitas yang teruji. Tahapan berikutnya, kepada personel dipilih dilakukan pembekalan melalui Diklat kemampuan auditor, bimbingan teknis atas tugas-tugas spesifik serta konseling terhadap personel yang kurang maksimal menjalankan tugasnya. Terakhir, Irjenad mengevaluasi personel atas kinerja dan sikap mentalnya untuk diajukan pergeseran kepada Kasad sebagai bentuk penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).

KESIMPULAN

Mempertahankan Opini WTP merupakan tugas bersama dengan lembaga lain yang berkepentingan atas pencapaian tugas TNI AD, pengawas eksternal maupun satuan jajaran TNI AD. Lingkup tugas pengawasan yang cukup luas memerlukan sinergisitas dalam bentuk penentuan kebijakan pimpinan serta langkah-langkah aktif dari unsur pelaksana. Langkah strategis TNI AD dalam mempertahankan Opini WTP dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu sinergisitas dengan lembaga lain dan pengawas eksternal: pengawasan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran serta peningkatan kapabilitas organisasi serta kualitas SDM

PERAN SATUAN TERITORIAL

DALAM MENJAGA NETRALITAS PRAJURIT PADA PEMILU TAHUN 2024



OLEH : LETJEN TNI TEGUH MUJI ANGKASA, S.E., M.M.
(DANPUSTRAD)

Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak untuk memilih wakil rakyat (anggota legislatif), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah. Pemilu 2024 ini telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan proses dan tahapannya diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari persepektif keamanan dan stabilitas politik, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak akan melahirkan perpecahan dan polarisasi di masyarakat, bahkan melebihi Pemilu 2019. Hal ini didasarkan analisis, salahsatunya oleh lembaga *Drone Emprite* (sistem pemantau percakapan Medsos), yang memantau percakapan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Menurut lembaga tersebut, perbincangan di Medsos, khususnya Twitter dan Facebook, memperlihatkan bahwa Pemilu tahun 2024 akan melahirkan polarisasi masyarakat yang tak kalah tajam dengan

Pemilu tahun 2019. Dalam ramalan mereka, Pemilu 2024 akan kembali dipenuhi oleh sejumlah praktik politik yang “destruktif,” dimana berita bohong (*hoax*), disinformasi, dan misinformasi di Medsos yang intensitasnya akan semakin meningkat dari hari-hari biasanya.

Realita tersebut diperkuat oleh sejumlah data dari beberapa lembaga survei. Litbang Kompas, misalnya, menemukan bahwa sebanyak 75% dari responden yang disurvei, mengalami kekhawatiran Pemilu 2024 akan membuat mereka kehilangan rasa toleransi dan solidaritas akibat perbedaan preferensi politiknya, terutama apabila calon yang bertanding hanya 2 calon (*head to head*). Mencermati sejumlah data tersebut, perpecahan di kalangan para pendukung, polarisasi di kalangan masyarakat, serta politik identitas yang berbasis SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sepertinya akan menjadi fenomena yang sangat lumrah terjadi.



Penekanan kepada anggota mengenai Netralitas TNI

Menyikapi perkembangan situasi tersebut, TNI sebagai komponen utama bangsa, sekaligus sebagai garda terdepan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga tumpah darahnya dari perpecahan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memberikan rincian terkait peran, fungsi, dan tugas TNI secara jelas. Guna melaksanakan tugas tersebut maka netralitas TNI adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kasad pada Rapim TNI AD 2023, yang menekankan netralitas TNI AD menjelang tahun politik 2024. Beliau meminta prajurit TNI AD tidak ada yang terlibat politik praktis. "Saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi di jajaran TNI AD, sesuai dengan perintah presiden RI, tahun 2023 adalah tahun politik, oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis, termasuk seluruh jajaran". Demikian ucapan Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman.

Urgensi netralitas TNI dalam pemilu adalah agar TNI dapat melaksanakan tugas tugasnya secara lebih profesional. Menurut Samuel Huntington, militer

yang profesional memiliki 3 syarat yaitu; 1) militer yang memiliki keahlian berupa pengetahuan dan keterampilan tentang ilmu-ilmu kemiliteran dan ilmu peperangan, 2) militer yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk melindungi dan mengamankan negara berdasarkan supremasi sipil, Hak Asasi Manusia dan demokrasi, dan 3) militer yang profesional adalah militer yang memiliki semangat solidaritas korps atau jiwa korsa berupa pemahaman tentang kepangkatan, hierarki komando dan satu perintah. Agar TNI menjadi militer yang profesional, maka harus netral dari politik praktis agar bisa berdiri di atas semua kepentingan golongan dan fokus terhadap tugas pertahanan negara yang merupakan implementasi dari menjunjung tinggi supremasi sipil dan demokrasi.

Dalam negara demokrasi, sikap politik TNI tunduk pada supremasi sipil termasuk dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang mewajibkan TNI untuk netral dan menjaga jarak dengan semua kekuatan politik. Dalam konteks Pemilu, netralitas TNI memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI.

Dengan netralitas TNI dalam Pemilu, diharapkan bisa menjaga kualitas Pemilu baik dari sisi proses maupun hasil. Dari sisi proses, netralitas TNI bisa menghindarkan TNI dari tuduhan terlibat melakukan kecurangan untuk mendukung pasangan calon tertentu, ataupun melakukan mobilisasi suara dengan memanfaatkan kekuatan, kemampuan slogan “TNI AD dihati rakyat”. Dari sisi hasil, tidak ada intimidasi, ancaman ataupun tekanan yang dilakukan anggota TNI dalam proses penghitungan suara dan penetapan hasil, karena dengan netralitasnya, TNI tidak berkepentingan dengan siapa pun atau dari partai manapun yang menang.

2. MENJAGA SOLIDITAS TNI.

Netralitas membuat institusi TNI menjadi lebih solid dan kuat. TNI tidak terpecah belah dalam berbagai faksi dan friksi antara kekuatan politik yang sedang bertanding. Sikap politik TNI adalah tegak lurus, merah putih dengan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. FOKUS PENGAMANAN PEMILU.

Netralitas akan membuat TNI bisa lebih fokus dalam tugas tugas pengamanan Pemilu bersama Polri dan elemen masyarakat lainnya. Energi dan

pikiran TNI akan lebih dimaksimalkan untuk menjaga dan mengamankan proses pelaksanaan Pemilu dari semua potensi ancaman dan gangguan baik selama masa pendaftaran, penetapan caleg, masa kampanye, pengamanan distribusi logistik, pengamanan surat suara Pemilu hingga saat penetapan dan pengesahan hasil Pemilu.

4. MEMPERKUAT JATI DIRI TNI SEBAGAI TENTARA NASIONAL DAN TENTARA PROFESIONAL.

Netralitas TNI dalam Pemilu akan memperkuat identitas dan jati diri TNI sebagai tentara nasional yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan. Netralitas TNI juga memperkuat jati diri TNI sebagai tentara profesional yang mengharuskan TNI tunduk pada supremasi sipil dalam sistem negara demokrasi.

Menindaklanjuti instruksi pimpinan TNI AD terkait dengan netralitas, Pusterad sebagai pengemban fungsi utama teritorial dengan satuan teritorial sebagai unsur pelaksana di lapangan yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap aspek geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah guna mendukung aspek pertahanan Negara. Keberadaan satuan teritorial sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembinaan teritorial, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas prajurit pada Pemilu yang akan datang, peran tersebut antara lain:

1. Edukasi Politik.

Edukasi politik harus dilaksanakan oleh Para Komandan satuan kepada para Perwira, Babinsa dan seluruh anggota dengan memberikan penerangan dan penyuluhan politik kepada setiap prajurit tentang situasi kondisi politik dan keamanan yang terjadi selama masa pemilu,



Penekanan kepada anggota dan Persit mengenai Netralitas TNI

kewajiban dan larangan serta pentingnya menjaga netralitas pada saat pemilu. Tujuan edukasi politik agar setiap prajurit tidak mudah terpengaruh, terbujuk godaan dan rayuan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dengan edukasi politik diharapkan setiap prajurit bisa mempertahankan jati diri dan identitasnya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional dan tentara profesional.

2) Internalisasi nilai - nilai netralitas prajurit.

Dengan meningkatkan penghayatan, pendalaman, penguasaan dan pemahaman tentang netralitas prajurit, sehingga memberikan keyakinan bahwa perintah pimpinan dalam Pemilu prajurit harus netral benar-benar dipahami, setiap prajurit baik selama dalam tugas maupun diluar tugas, tidak memihak, tidak memberikan fasilitas, sarana dan prasarana dilingkungan TNI untuk kegiatan kampanye, bagi keluarga anggota TNI dilarang memberikan arahan terkait dukungan hak pilih, dilarang memberikan komentar dan mengupload

hasil quickcount pemilu, serta memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar.

3) Sosialisasi Netralitas Prajurit kepada masyarakat.

Keberadaan prajurit satuan teritorial yang selalu dekat dengan masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi tentang peran, tugas dan fungsi TNI sesuai undang - undang dan netralitas TNI dalam Pemilu, hal ini untuk menjawab adanya stigma negatif bahwa TNI tidak netral, akan mendukung salah satu paslon. Melalui sosialisasi tersebut akan menghilangkan keraguan dan prasangka negatif, mencegah adanya upaya kelompok tertentu untuk menarik-narik TNI terlibat dalam politik praktis, sebaliknya memberikan dukungan penuh keberadaan prajurit TNI dalam tugas pengamanan Pemilu agar Pemilu berjalan Luber dan Jurdil.

4) Melaksanakan Pengawasan.

Gelar prajurit satuan teritorial yang tersebar diseluruh pelosok negeri, juga memberikan peran untuk melaksanakan pengawasan terhadap netralitas setiap anggota TNI, hal ini dilakukan agar tidak ada



celah untuk dipolitisasi, dimanfaatkan dan disalahgunakan pihak tertentu serta menindas secara tegas anggota yang terbukti terlibat kegiatan politik praktis, memihak salah satu paslon sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melakukan tindakan temu cepat dan lapor cepat bila ada indikasi yang mengarah adanya upaya menghambat, mengganggu dan menggagalkan Pemilu.

5) Mewujudkan situasi kondusif.

Dengan netralitas TNI, dapat leluasa mengajak masyarakat di semua golongan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas situasi lingkungan agar tercipta situasi aman dan damai, dengan tidak melakukan tindakan yang merusak, menyebarkan informasi *hoax* dan ujaran kebencian, adu domba dan provokasi antar kelompok atau golongan, atau melakukan tindakan menghambat dan mengganggu pelaksanaan Pemilu.

6) Membangun Sinergitas dengan Stakeholder Pemilu.

Untuk meningkatkan dan menjaga netralitas prajurit, maka Komandan satuan teritorial perlu membangun sinergitas dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemilu seperti KPUD dan Bawaslu, Partai Politik, organisasi pemantau Pemilu, media massa dan

tokoh masyarakat untuk memastikan bahwasanya tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis, mendukung salah satu paslon atau bersikap tidak netral terhadap peserta pemilu sesuai aturan yang ada.

Hal terpenting ditengah dinamika kehidupan bangsa pada tahun politik yang cukup tinggi potensi perpecahannya akibat polarisasi dimasyarakat sebagai dampak persaingan politik antar kontestan Pemilu, diharapkan peran para komandan satuan teritorial dalam menjaga netralitas prajurit pada Pemilu 2024 dapat menjadi peredam dan perekat untuk membangun kembali nilai-nilai dan semangat persatuan dan kesatuan antar semua golongan, suku, ras dan agama dalam bingkai dan semangat Bhineka Tunggal Eka.

Pemilu adalah pesta demokrasi untuk melaksanakan peralihan kepemimpinan bangsa secara konstitusional, yang harus didukung oleh segenap komponen bangsa untuk melanjutkan pembangunan mencapai tujuan dan cita cita nasional. Netralitas TNI adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI, netralitas adalah semangat dan jiwa besar TNI melepaskan hak istimewanya dalam pesta demokrasi sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan TNI untuk kemaslahatan bangsa yang kita cintai bersama.



“KEMBALI MERAJUT HARAPAN DI TANAH PAPUA”



OLEH : MAYJEN TNI IZAK PANGEMANAN
(PANGDAM XVII/CENDERAWASIH)

Apa kabar Papua kini, setelah 60 tahun kembali bergabung secara resmi dengan Indonesia?

Titik awal yang menjadi momen bersejarah kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi secara de facto dan de jure ditandai dengan Upacara penurunan bendera PBB dan pengibaran Sang Merah Putih di Taman IMBI Jayapura pada tanggal 1 Mei 1963. Selanjutnya sesuai isi Perjanjian New York (*New York Agreement*) yang disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752, diamanatkan untuk dilaksanakan hak penentuan nasib sendiri (*act of free choice*) oleh Indonesia atas nasehat, bantuan dan partisipasi dari PBB.



Pengibaran Sang Merah Putih di Taman IMBI Jayapura

Penentuan nasib sendiri ini dilaksanakan melalui Referendum yang dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 diikuti 1.025 orang Perwakilan Tokoh Papua. Hasilnya memutuskan rakyat Papua memilih tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia. Hasil ini kemudian dibawah pada Sidang Majelis Umum PBB pada 19 Desember 1969, dan disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 2504. Resolusi ini mengamanatkan lebih lanjut kepada Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional di Papua dengan memperhatikan kekhususannya dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera

setara dengan masyarakat daerah lain di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, berbagai macam upaya pemerintah Indonesia dilakukan untuk memajukan Papua melalui program pembangunan di segala bidang, pemanfaatan sumber daya alam, stimulasi perekonomian, penegakan kedaulatan dan penciptaan stabilitas keamanan. Namun nyatanya saat ini, Papua masih tertinggal jauh dari daerah lainnya di Indonesia. Demikian pula kelompok yang masih berbeda pendapat dengan Pemerintah Indonesia masih tetap eksis sampai hari ini. Kelompok ini menginginkan Papua menjadi negara sendiri. Pemahaman ini merupakan sisa-sisa dari upaya pendirian Negara Boneka oleh Belanda di Papua pada tahun 1961. Perlawanan mereka berlangsung secara politik maupun militer, membuat stabilitas keamanan di sebagian wilayah Papua tidak kondusif terutama di daerah yang terisolasi di wilayah pegunungan. Keadaan ini menguras banyak tenaga, waktu dan sumber daya dari Pemerintah Indonesia dalam penanganannya.

Permasalahan Konflik di Papua

Akar masalah mendasar yang menyebabkan berlarutnya konflik di Papua adalah pertama, akibat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan antara Pemerintah Indonesia dengan Kelompok Papua Merdeka; kedua, dampak penanganan konflik sebelumnya yang membuat luka batin, trauma dan dendam yang dalam bagi masyarakat Papua yang menjadi korban; ketiga, perbedaan tingkat kesejahteraan, taraf hidup dan status sosial antara masyarakat pendatang, masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan yang masih sangat tajam; dan keempat adanya peran asing (*invisible hand*) yang tidak menginginkan Papua damai dan sejak awal mensponsori gerakan Papua Merdeka. Keseluruhan akar permasalahan ini tumbuh subur pada berbagai macam permasalahan



Masyarakat Pribumi Yang Hanya Menjual Sayur di Pinggir Jalan

sosial yang belum terselesaikan sampai saat ini dan bukan pada permasalahan teritorial. Permasalahan teritorial Papua sebenarnya sudah selesai pada tahun 1969 dengan keluarnya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 yang menyatakan bahwa wilayah Papua adalah sah bagian dari Indonesia. Yang tersisa adalah permasalahan sosial yang memicu berbagai permasalahan lain termasuk masalah keamanan.

Permasalahan sosial masih kental melekat dalam kehidupan rakyat Papua seperti banyak daerah masih terisolasi, kondisi sosial yang tidak berjalan baik, masih terjadi kesenjangan, ketimpangan, marginalisasi dan diskriminasi yang menyebabkan kondisi psikologi masyarakat Papua tertekan terutama mereka yang hidup di daerah pedalaman dan pegunungan. Permasalahan Papua adalah permasalahan Bangsa Indonesia yang sudah terlanjur memilih jalan panjang. Realitanya sudah sangat luas dan dalam, mempengaruhi berbagai macam dimensi dan spektrum kehidupan masyarakat dalam sebuah negara.

Dengan permasalahan yang kompleks dan masifnya dampak yang terjadi, timbul pertanyaan, masih adakah harapan untuk tetap membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera?

Dinamika situasi dan kondisi keamanan di Papua

Pada tahun 2001, melalui Undang-undang Nomor 21, Pemerintah Indonesia menetapkan Otonomi Khusus bagi Propinsi di Papua dalam rangka mempercepat dan mengintensifkan pembangunan Papua. Pemberian otonomi khusus dimaksudkan untuk memberikan posisi dan hak-hak istimewa bagi Papua dalam mekanisme pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan. Namun dengan status otonomi khusus disertai alokasi dana yang besar, ternyata masih tidak efektif menyelesaikan Konflik Papua. Penggunaan dana otsus banyak yang tidak tepat sasaran bahkan diselewengkan oleh oknum tertentu.

Pendekatan pembangunan dan kesejahteraan yang dilakukan ternyata tetap tidak menyurutkan aksi kelompok pro kemerdekaan, yang menyebabkan pasang surutnya situasi keamanan. Selain melakukan aksi teror, kelompok ini juga terus melakukan propaganda politik menggunakan berbagai media. Eskalasi konflik terus terjadi seperti kontak tembak antara Kelompok Bersenjata Papua Merdeka dengan Aparat TNI/Polri, penyanderaan, penembakan dan pembunuhan masyarakat sipil, pembakaran fasilitas umum dan pengusiran warga pendatang oleh orang asli Papua. Terbaru, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya menyandera pilot Susi Air, Phillip Max Mehrstens di Nduga dan pembakaran rumah-rumah pendatang di Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai yang didalangi oleh organisasi KNPB. Kejadian-kejadian tersebut menambah panjang rangkaian konflik Papua. Keadaan ini kemudian menjadi narasi-narasi propaganda yang merusak citra Indonesia di dunia internasional. Gencarnya aksi kekerasan bersenjata dan propaganda Kelompok

yang menginginkan Papua Merdeka dapat merongrong keamanan nasional dan menjadi acuan disintegrasi bangsa Indonesia. Ibarat simpul yang mengikat sekumpulan kayu bakar, maka Papua adalah simpul pengikatnya sedangkan kayu bakar adalah Daerah-daerah lain di Indonesia. Bila simpul terlepas, maka terceriberaikan pula lah seluruh kayu bakarnya. Pengalaman lepasnya Timor Timur dan Pulau Sipadan-Ligitan dari pangkuan NKRI selakinya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Bila cara penanganan sama, maka dapat dipastikan, hasilnya pun akan sama.

Upaya penanganan konflik.

Konflik di Papua tidak dapat dijawab hanya dengan otonomi khusus, operasi militer ataupun operasi penegakan hukum semata. Penanganannya harus dilakukan secara holistik yang menyentuh akar permasalahan sosial sesungguhnya. Program, kegiatan dan operasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dari semua Kementrian, Lembaga dan Instansi harus terpadu, terintegrasi, terkoordinir dengan baik, saling mendukung serta berkesinambungan, bukan dilakukan secara parsial baik ditinjau dari dimensi materi kegiatan maupun waktu pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk kegiatan dan operasi yang dilakukan oleh TNI. Satu kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada kegiatan lain. Bila suatu upaya yang dilakukan gagal, maka akan merusak upaya yang lain yang telah ataupun yang sedang dikerjakan, sehingga sia-sia semua usaha yang sudah dikerjakan dan sumber daya yang sudah dikeluarkan. Semua kembali ke titik nol. Oleh karena itu penanganan masalah Papua harus dilaksanakan dengan hati-hati dan bijaksana.

Penanganan konflik Papua harus dilakukan dengan hati, karena musuh sebenarnya berada di pikiran, jiwa dan perasaan orang Papua. Solusi harus

bersumber dari hati, yang menggerakkan logika untuk berpikir bagaimana cara aplikatif untuk mengecat hati masyarakat Papua yang masih bergambar Bintang Kejora menjadi Merah Putih.

Aturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk menyelesaikan masalah di Papua sudah sangat cukup untuk menjadi dasar bertindak bagi semua Kementerian dan Lembaga dalam Pemerintahan Indonesia. Mulai



TNI Bersama Kemenkes RI Menggunakan Speed Boat mengendalikan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

dari UU No.21 tahun 2001, Inpres No.9 tahun 2017, Keppres No.20 tahun 2020, Inpres No.9 tahun 2020, Inpres No.1 tahun 2021, PP No.106 tahun 2021, PP No.107 tahun 2021, Perpres No.121 tahun 2020 dan terakhir Perpres No.24 tahun 2023. Semua intinya mengamanatkan tentang percepatan pembangunan Papua untuk setara dengan daerah lain di Indonesia. Percepatan pembangunan dianggap dapat mengeliminir permasalahan sosial yang selama ini mengendap dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua serta menumbuhkan harapan baru untuk mencapai masyarakat aman, adil, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Harapan ini menjadi roh penyelesaian konflik, dimana masyarakat orang asli Papua merasa: 1) bangga menjadi orang

Indonesia; 2) terhormat menjadi orang Indonesia; 3) punya harga diri menjadi orang Indonesia; 4) punya keyakinan menyerahkan hidupnya kepada NKRI; 5) punya harapan hidup bersama Indonesia. Musuh sebenarnya dari Konflik Papua adalah “Semua Pihak yang menghambat pembangunan” karena pembangunan adalah kunci penyelesaian masalah sosial.

Permasalahan pembangunan di Papua juga sangat terkait erat dengan “*political will*”. Pendekatan politik akan membuka jalan bagi berfungsinya pendekatan lain seperti pendekatan kesejahteraan, agama, budaya, penegakan hukum dan pelestarian alam. Pola penanganan konflik secara politik dilakukan dengan cara pertama, tidak naik ke tokoh politik, tetapi turun ke masyarakat papua; kedua, tidak maju berkonfrontasi tetapi mundur menyelesaikan masalah sosial masyarakat; ketiga, tidak memisahkan tetapi menyatukan; dan keempat, tidak menunggu tetapi menciptakan.

Penyelesaian permasalahan Papua pada akhirnya akan ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri dengan berbagai dinamika politik dan sosial di dalamnya. Untuk memenangkan konflik di Papua pada hakekatnya adalah “Memenangkan Generasi”, yaitu mengganti secara perlahan Generasi didikan Belanda dan Generasi jaman Peralihan saat Pepera menjadi “Generasi Indonesia” yang terdidik dengan baik oleh Indonesia dan mapan bersama Indonesia. Usaha memenangkan generasi dilaksanakan perlahan-lahan dengan membuka isolasi; membuat kohesi; meningkatkan kompetensi; mengembalikan kepercayaan; mengobati luka hati, trauma dan dendam dari orang



Satgas TNI dalam Upaya Memenangkan Generasi di Papua

asli Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang menjadi korban akibat penanganan yang salah sebelumnya. Win-win Solution dari berbagai aspek antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat dihindari. Orientasinya adalah semua pihak mendapatkan peran dan porsi yang setara dalam proses pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan.

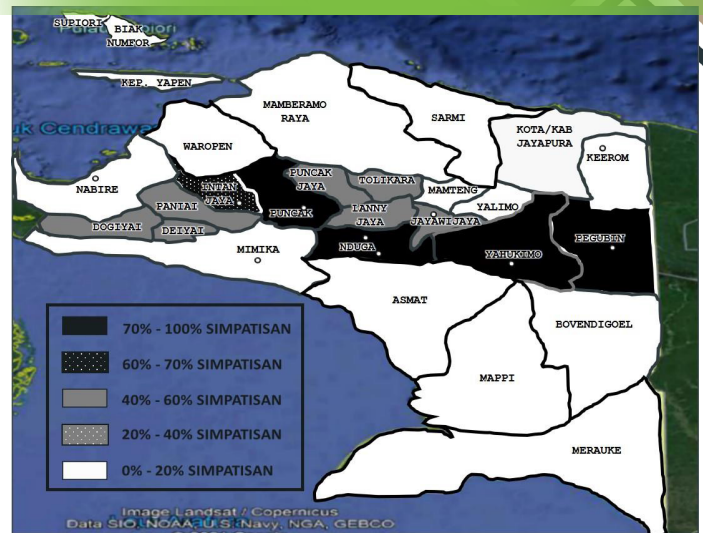
Berikutnya, kunci memenangkan generasi adalah meningkatkan potensi dan kompetensi Generasi Indonesia untuk diarahkan menduduki dan berperan pada simpul-simpul penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Papua, yaitu simpul Elit Politik, Birokrasi, TNI-Polri, Teknokrat, Elit Partai, Kelompok LSM, Oposisi Pemerintah, Pemuda dan Mahasiswa, Media Massa dan simpul Massa. Pada posisi ini, mereka akan terus menyuarakan tentang paham kebaikan menjadi bagian Indonesia. Bila simpul-

simpul ini sudah dikuasai oleh Generasi Indonesia maka niscaya konflik di Papua dapat diselesaikan. Hal ini terbukti dari keadaan daerah yang sudah dipimpin oleh Generasi Indonesia, situasinya kondusif dan aman serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengamanatkan TNI untuk melakukan 3 hal, yaitu 1) memberikan dukungan pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan; 2) mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil; 3) membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis

Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat. Tugas-tugas khusus TNI ini sangat tepat dilaksanakan melalui operasi penggalangan dengan metoda pembinaan teritorial. Operasi intelijen, operasi teritorial dan operasi tempur yang sedang berjalan perlu dikonsolidasikan ke dalam satu format operasi penggalangan yang terpadu dimana terdapat kesatuan visi, misi dan kodat dalam bertindak. Setiap satuan TNI akan melaksanakan peran spesifiknya masing-masing dalam pola operasi penggalangan untuk menarik, menekan, putar balik, pecah belah dan adu domba dengan sasaran akhir untuk mengecat Bintang Kejora menjadi Merah Putih dalam jiwa, pikiran dan perasaan orang Papua secara keseluruhan. Tentunya operasi ini dilakukan dalam jangka panjang dan berkesinambungan untuk terus mencetak generasi Indonesia yang pada masanya akan masuk pada simpul-simpul penting masyarakat Papua guna menyelesaikan permasalahan mendasar Papua dengan sendirinya. Prinsipnya, masalah Papua akan diselesaikan dan ditentukan oleh orang Papua sendiri. Aman atau tidaknya Papua, akan ditentukan oleh orang Papua sendiri.

Situasi dan kondisi Papua secara umum aman. Walaupun demikian dinamika kecil berupa gangguan-gangguan sporadis dari kelompok Papua Merdeka di beberapa daerah tertentu masih terus terjadi. Mengadaptasi keadaan ini, TNI perlu memetakan wilayah berdasarkan kondisi keamanannya untuk digunakan dalam rangka menerapkan pendekatan operasi penggalangan. Tiga pendekatan operasi penggalangan yang sudah diterapkan oleh Kodam XVII/Cenderawasih sebagai bagian dari TNI adalah 1) *soft approach*, 2) *culture approach* dan 3) *hard approach*. *Soft approach* dilakukan melalui bakti sosial dan komunikasi sosial pada daerah-daerah yang sudah mapan. *Culture approach*, dilakukan dengan mengedepankan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan



Penggolongan Daerah Operasi di Wilayah Papua

tokoh kepemudaan untuk menyebarkan paham kebaikan secara luas kepada masyarakat di seluruh wilayah Papua melalui ajaran agama, kegiatan adat, sosial dan budaya. Hard approach dilakukan pada daerah-daerah yang berada dalam kekuasaan kelompok bersenjata Papua Merdeka dengan tindakan tegas dan kekuatan senjata menggunakan teknik dan taktik militer yang sesuai aturan. Bila anggota kelompok tersebut tertangkap akan diserahkan kepada Polri untuk diproses hukum.

Bahwa konflik Papua yang masih terus terjadi sampai saat ini bersumber pada permasalahan sosial masyarakat Papua yang masih terisolasi, terbelakang dan tertinggal. Perlu pembangunan menyeluruh di segala bidang untuk meningkatkan taraf hidup orang asli Papua. Musuh sebenarnya dalam konflik Papua adalah mereka yang menghambat pembangunan dan untuk memenangkan konflik di Papua dilakukan melalui cara memenangkan generasi melalui operasi penggalangan. Permasalahan di Papua akan dapat diselesaikan oleh orang Papua sendiri.

Masih ada harapan untuk terus membangun Papua dalam bingkai NKRI guna mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan langkah-langkah tindakan

yang teratur, terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Instansi terkait dalam Pemerintahan Indonesia termasuk TNI.

TNI mengambil perannya dalam menyelesaikan konflik di Papua dengan melakukan operasi penggalangan dengan metode pembinaan teritorial dengan menggunakan tiga pendekatan yang senjata utamanya adalah bakti sosial dan komunikasi sosial dengan tetap menjaga kewaspadaan untuk sewaktu-waktu siap melaksanakan operasi tempur.

Dari uraian di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh program pembangunan dan kegiatan penanganan konflik Papua dengan melakukan **REORIENTASI, REPOSISI, REKONSOLIDASI, PENGUATAN KEMITRAAN, REFORMULASI, RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI TATA LAKSANA** dari seluruh program, kegiatan, mekanisme dan organisasi yang sedang berjalan di Papua.



PENGUATAN KARAKTER PRAJURIT MELALUI SEJARAH SATUAN

Apabila membuka lembaran sejarah berdirinya negara bangsa, banyak tokoh, pemikir, dan ideolog yang memberi penekanan bahwa bangsa itu menyangkut sesuatu yang sifatnya rohaniah, kejiwaan, dan mentalitas. Bangsa tidak hanya menyangkut urusan fisik berupa bangunan saja meskipun itu merupakan penanda peradaban.¹ Demikian halnya pembentukan satuan di jajaran TNI AD bersandar kepada “rasa”, “*esprit de corps*”. Aktualisasinya bisa berkembang menjadi ikatan batin dan karakter yang kemudian menjadi pembeda satuan yang satu dengan satuan yang lain di dalam jajaran TNI AD. *“Ingatlah selalu sifat-sifat prajurit, prajurit itu pantang menyerah, selalu tabah, selalu loyal, selalu tulus dan selalu rela berkorban untuk kejayaan dan kemajuan rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”* kata Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara HUT ke-77 TNI di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kekuatan diri dari masing-masing warga negara termasuk prajurit TNI dan kekuatan kohesi sosial dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kekuatan yang diharapkan adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan bagi prajurit TNI adalah mewujudkan jati dirinya



OLEH : BRIGJEN TNI SIDIK
(KADISJARAHAD)

sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional (UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI). Sedangkan kohesi sosial yang dibutuhkan adalah kekuatan kebersamaan, komitmen dan kearifan untuk bahu membahu dalam membangun bangsa, menjaga, menegakkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sejarah mencatat, peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, sangat memiliki makna dan merupakan momen yang tidak akan pernah terlupakan, mempunyai hikmah dan pelajaran yang sangat besar bagi kehidupan yang akan datang. Salah satu kutipan yang paling terkenal mengenai Sejarah dan pentingnya belajar Sejarah ditulis oleh filsuf Spanyol, George Santayana, yaitu *“Mereka yang tidak mengenal masa lalunya, dikutuk*

¹Wahyudi Djaja, “Ngrumat Adat, Drajat Kangkat”, Narasi, 1 Mei 2018, hlm. 75

untuk mengulanginya". Dalam sejarah Indonesia, institusi, terutama negara merupakan kekuatan yang menggerakkan sejarah. Militer sebagai salah satu bagian institusi negara mengambil peran yang sangat penting dalam proklamasi dan revolusi. Ketika negara dalam kondisi genting di tahun 1948 pada waktu Agresi II perang Kemerdekaan tentara bergerilya dan berhasil mempertahankan eksistensi bangsa, dengan meyakinkan PBB, Setelah itu peran tentara sangat penting terutama dengan berhasilnya melumpuhkan penjajah dari luar (Sekutu yang diboncengi NICA) dan pemberontakan-pemberontakan dalam negeri. Tentara dalam hal ini TNI merupakan kekuatan riil dan kekuatan sejarah yang harus diperhitungkan dalam setiap peristiwa perjalanan bangsa dan Negara Indonesia sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.



Parade Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam peringatan puncak HUT TNI ke-70 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon Banten 5 Oktober 2015

Pentingnya Ilmu Sejarah bagi Prajurit dalam penguatan Karakter.

Bertolak dari tujuan yang tidak mudah untuk dicapai, maka merupakan tantangan besar untuk membantu para prajurit menumbuhkan kesadaran sejarah bahwa sejarah sebagai ilmu yang tidak bisa ditinggalkan, secanggih apa pun kemajuan teknologi di zaman

ini. Fakta yang ada saat ini di lapangan, sejarah menjadi ilmu yang tidak dilihat bahkan dikesampingkan atau tidak usah dipelajari. Banyak yang beranggapan dirinya tidak penting mendapatkan pelajaran sejarah dan akan menjadi beban bila diharuskan mempelajari sejarah, seperti contohnya mempelajari sejarah satuannya sendiri, padahal mereka-mereka sebagai pelaku, saksi sejarah satuannya. Kecuali bagi mereka yang memang tertarik pada sejarah. Cara pandang prajurit itu tidak sepenuhnya salah. Hal ini dapat ditanggapi untuk menjadi sebuah refleksi, mengapa ada prajurit yang berpendapat demikian.

Pemikiran prajurit, belajar sejarah sudah terbayang dengan setumpuk materi yang penuh dengan hafalan tahun, tempat, tokoh-tokoh perjuangan, yang tidak mudah dimengerti, untuk apa mempelajari kejadian yang sudah berlalu. Ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian sejarah karena pengajaran sejarah yang kurang tepat dan kurang komprehensif. Ada kemungkinan pengajaran sejarah konvensional menyebabkan pengajaran sejarah tidak memberi arti bagi kehidupan manusia (H.S. Commencer, 1966: 1-14). Pengajaran seperti itu menyebabkan pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang tidak bermakna. Lebih-lebih orang mengatakan sejarah hanya penyebutan fakta-fakta dan angka tahun saja (*opsomming van feiten en jaartalen*), ini tentunya sangat menjemukan.²

Sering orang khilaf bahwa sejarah tidak mempunyai nilai. Nilai sejarah (*the value of history*), sebagaimana yang biasa disebutkan dalam salah satu definisi sejarah, bahwa sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di dunia yang berhubungan dengan kemajuan, lembaga, budaya dan peradabannya. Yang sangat penting adalah orang harus tahu apa yang dikerjakan orang lain. Pada dasarnya khalayak mengambil

²Suhartono W Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.1.

pelajaran dari sejarah untuk setuju dan mengkritisi kebijakan dan keputusan mutakhir, sehingga masyarakat sadar tentang nilai Sejarah. *Cicero (106-43 SM), negarawan Romawi, mengatakan bahwa Sejarah adalah guru kehidupan (Historia magistra vitae)*, dan ketertarikan terhadap pelajaran masa lampau oleh pemimpin dan publik figur dari masyarakat sekarang sangat penting untuk membantu pengamatannya.

Sudah ditunjukkan bahwa kebutuhan utama untuk mengetahui dan memahami masa lampau dimaksudkan untuk memberi arah yang tepat terhadap masyarakat kontemporer. Dari serangkaian penerapan studi sejarah, yang diperlukan adalah cinta kebenaran, habit ketepatan, metode belajar, rasa kewajaran, pengetahuan yang relatif untuk disiplin lain. Akar masa sekarang ada di masa lampau. Menurut Frank H. Carver dalam *Values of Historical Research* yang sangat penting bagi sejarawan adalah menemukan kebenaran yang dalam memfokuskan kebenaran, ia menginstruksikan remaja dan generasi muda, mendorong rasa patriotik, menginspirasi hal-hal ambisius, mendisiplinkan memori, membangkitkan imajinasi, menanamkan penilaian yang baik, mempromosikan toleransi, dan memperkuat moralitas dan agama. Butir-butir itu sebagaimana inti dari nilai Sejarah adalah moral judgement yang disampaikan kepada masyarakat lewat *public history* (L. Jordannova, 2004, 168-171).³

Sebagai prajurit dengan tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara tentunya setiap prajurit dituntut memiliki karakter yang kuat. Pengembangan pendidikan karakter untuk prajurit diimplementasikan melalui aktualisasi nilai-nilai sejarah perjuangan TNI AD, yang terpusat

pada 23 karakter utama yaitu: religius, persatuan dan kesatuan, percaya kepada kekuatan sendiri, kemanusiaan, loyalitas, integratif/ manunggal, kepemimpinan dan kepeloporan, kemerdekaan, tidak kenal menyerah dan pantang mundur, rela dan ikhlas berkorban, senasib sepenanggungan dan setia kawan, nasionalisme, kepahlawanan, demokratis, perdamaian, keprajuritan, kejujuran, kesabaran, militansi, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berani, harga diri, dan patriotisme.



Kesaksian Veteran pejuang generasi '45 kepada generasi muda TNI tentang perjuangan menghadapi Belanda di dalam Palagan Ambarawa 15 Desember 1945

Pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh melengkapi dimensi keterpanggilan prajurit dalam sejarah sebagai pelaku bagi perubahan dirinya sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupinya, pendidikan karakter sesungguhnya memusatkan diri pada pertumbuhan individu prajurit yang cerdas, baik, dan mampu bertanggungjawab atas pertumbuhan dirinya sendiri dan orang lain. Selain menjadi individu prajurit yang memiliki kepribadian secara sehat, pendidikan

³Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.7.

karakter yang utuh dan menyeluruh membidik dinamika keberadaan individu prajurit dalam masyarakat sebagai pelaku perubahan. Sebagai individu yang sehat, seorang prajurit dapat melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Sebagai individu yang hidup dalam kebersamaan, seorang prajurit mampu bertumbuh dan mengembangkan komunitas dan masyarakat menjadi lebih baik, adil dan manusiawi dari apa yang ada sekarang.

Penguatan perubahan sendiri dirinya bagi prajurit tentunya melalui proses tidak instan banyak faktor yang membentuk salah satunya melalui penguatan kesadaran tentang pentingnya sejarah bagi dirinya dari mulai tingkat dasar dan berjenjang. Baik pada pendidikan pembentukan, lanjutan bahkan sampai pendidikan spesialisasi. Pengenalan tokoh-tokoh pejuang militer di lembaga pendidikan atau di satuan jajaran TNI AD menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan salah satunya, seperti mengenal Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Besar DR. A.H. Nasution, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Jenderal TNI M.Yusuf dan tokoh lainnya sangat penting untuk dipelajari sehingga prajurit akan memahaminya dan secara langsung akan menguatkan karakter pada diri prajurit tersebut dengan meneladani nilai-nilai perjuangannya yang luar biasa dan diaplikasikan di medan tugas dimanapun berada.

Tanggung Jawab Komandan Satuan dan Simulasi dalam Mempelajari Sejarah satuan

Inilah waktunya bagi komandan satuan untuk menunaikan tugas mulia dan menjadi bagian untuk bertanggung jawab atas keberadaan sejarah di satuannya saat ini dan di masa mendatang. Hal ini menjadi tantangan sekaligus panggilan agar komandan satuan mampu menyajikan materi sejarah khususnya

sejarah satuannya dan mengemasnya dengan bumbu penguatan nilai karakter sehingga materi yang disampaikan akan menjadi hidup seolah memiliki roh dan prajurit mampu menangkap spirit yang dimunculkan oleh seorang komandan satuan.



Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin apel gelar pasukan di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022

Melalui penyampaian materi sejarah khususnya sejarah satuannya yang berisi rekaman sejarah pengabdian satuan mulai dari satuan tersebut dilahirkan atau dibentuk, deretan operasi penugasan yang dilakukan dan keberhasilan yang dicapai. Di dalam lintasan sejarah satuan tersebut terdapat catatan tentang keberhasilan para komandan satuan dengan prajurit yang hebat/berprestasi dalam medan tugas operasi ataupun yang gugur karena peristiwa heroik, tentunya penting untuk diketahui oleh seluruh prajurit di satuannya. Sehingga melalui materi sejarah satuan, seorang komandan dapat membantu prajuritnya dalam menanamkan penguatan karakter mereka.

Sejarah satuan mengandung nilai-nilai sejarah perjuangan yang harus hidup dan terpatrit di dada setiap prajurit. Sejarah satuan sarat dengan nilai-nilai karakter yang dapat digali dan diintegrasikan melalui proses pembelajaran. Ketika materi yang disampaikan tentang sejarah

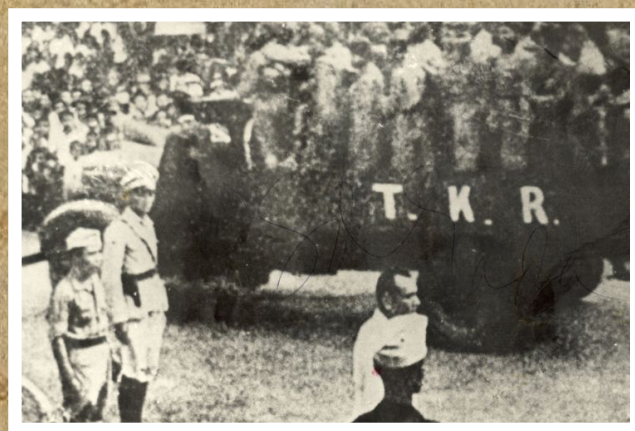
satuan dalam penugasan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, komandan satuan dapat menanamkan rasa syukur bahwa pada saat ini mengalami hidup dalam suasana damai, merupakan penguatan karakter untuk membangun nilai religiusitas. Di sisi lain komandan satuan dapat menanamkan kesadaran Sejarah kepada para prajurit bahwa keberadaan satuan mereka sampai saat ini merupakan hasil dari karakter kerja keras, loyalitas, kepemimpinan dan kepeloporan, senasib sepenanggungan dan setia kawan, kejujuran, militansi, dan patriotisme dari para pendahulu mereka. Dengan contoh-contoh dan *story telling* peristiwa di dalam sejarah satuannya maka diharapkan para prajurit mampu meneladani karakter positif sekaligus menumbuhkan kesadaran sejarah serta pengakuan generasi masa kini akan kehebatan para pendahulu.

Peristiwa bersejarah dari sebuah satuan di jajaran TNI AD yang melandasi lahir atau terbentuknya satuan tersebut dapat disampaikan dengan metode role playing atau bermain peran. Metode ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan imajinasi dan penghayatan prajurit dalam memerankan tokoh melalui skenario yang disusun berdasarkan sejarah satuannya. Setelah semua prajurit menjalankan tugasnya untuk tampil, maka komandan satuan meminta para prajuritnya untuk menuliskan apa yang dirasakan pada saat memerankan salah satu tokoh dan apa saja nilai positif yang ditemukan dari serangkaian proses pembelajaran tersebut. Melalui metode ini prajurit dapat melihat aktualisasi nilai-nilai Sejarah perjuangan TNI AD, yang terpusat pada 23 karakter utama nya.



Drama kolosal pertempuran arek-arek Suroboyo bertajuk "Radio Bung Tomo" pada Upacara HUT ke-71 TNI yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Makodam V/Brawijaya

Penguatan karakter dengan menanamkan nilai-nilai sejarah perjuangan TNI AD merupakan suatu hal yang tidak boleh ditunda mengingat situasi zaman yang sangat dinamis perubahannya dapat berpengaruh negatif kepada semua lapisan masyarakat termasuk prajurit TNI AD. Oleh sebab itu, integrasi melalui penyampaian materi sejarah dengan kemasan yang bagus dan tidak membosankan serta mendidik dapat dirangkai dalam berbagai bentuk salah satunya dalam pelaksanaan tradisi satuan tersebut. Setiap personel baru diperkenalkan sejarah satuannya sehingga mereka akan memahami satuannya dan pada diri prajurit dengan sendiri mempunyai kebanggaan, cinta terhadap satuannya. Hal inilah merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh oleh komandan satuan dan institusi TNI. Namun demikian diperlukan waktu yang lama dan proses yang panjang bagi sebuah nilai untuk menguatkan karakter prajurit. Nilai yang ditanam bagaikan benih yang akan tumbuh di tanah subur, perlu pemeliharaan yang tepat dan didukung budaya lingkungan yang positif agar dapat membantu prajurit menginternalisasi nilai sejarah tersebut dalam memperkuat karakternya sebagai prajurit berjati diri : prajurit pejuang, prajurit rakyat, prajurit nasional dan prajurit professional. **"Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" (*Never Leave History*)**, disampaikan Bapak Proklamator Indonesia, Presiden Soekarno pada saat pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966.



ALUTSISTA ARMED TNI AD SAAT INI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah berimplikasi pada globalisasi yang melanda di seluruh dunia. Globalisasi tersebut melahirkan berbagai perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia termasuk salah satunya revolusi industri 4.0 yang telah mendatangkan perubahan pada berbagai bidang yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Bagi dunia militer, revolusi industri 4.0 telah mengubah cara-cara berperang yang baru. Loncatan teknologi yang super cepat melahirkan ide-ide baru yang diterapkan dalam sistem persenjataan militer sehingga model-model peperangan menjadi *unpredictable*. Guna menghadapi perubahan yang sangat cepat itu, organisasi militer di seluruh dunia berlomba-lomba melakukan peningkatan kemampuan melalui modernisasi Alutsista dengan cara meng-*upgrade* sistem teknologi komputer, sistem komunikasi, sistem gerak, kemampuan munisi, dan daya jelajah senjata sehingga diharapkan adaptif terhadap perkembangan lingkungan militer dan memiliki daya hancur yang sangat dasyat.

Artileri Medan (Armed) TNI AD sebagai salah satu bagian penentu kemenangan perang, menyadari bahwa zaman berubah dengan cepat sehingga Armed TNI AD senantiasa harus mengikuti perkembangan teknologi kesenjataan dunia dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Armed TNI AD sudah mengembangkan Alutsistanya diantaranya dengan mendatangkan Meriam 105 mm KH 178, Meriam 155 mm KH 179, Meriam 155 mm M109A4, Meriam 155 mm Caesar, MLRS Astros (*Multiple Launch Rocket System*



**OLEH: KOLONEL ARM NURSAMSUDIN
(KASUBDITBINSIAPSAT DAN ALUTSISTA
SDIRSEN PUSENARMED)**

Artillery Saturation Rocket System) II MK 6, yang cukup canggih dan mempunyai jarak tembak cukup jauh sampai dengan 90 km serta efek kehancuran yang cukup dahsyat mencapai 5 Ha dalam sekali penembakan. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain, hal ini masih cukup tertinggal. Dikarenakan negara lain sudah mempunyai Alutsista dengan jangkauan antar benua dan efek ledakan yang lebih dahsyat. Selain itu masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi oleh Armed TNI AD.

Berdasarkan latar belakang kondisi yang telah diuraikan di atas penulis mencoba menulis tentang bagaimana Alutsista Armed TNI AD ini sehingga menjadikan masukan dalam pengembangan Alutsista kedepan.

Saat ini Armed TNI AD telah memiliki sistem kesenjataan yang cukup mumpuni

diantaranya: MLRS Astros II MK 6, Meriam 155 mm Caesar, Meriam 155 mm M109A4, Meriam 155 mm KH 179, Meriam 105 mm KH 178, Meriam 105 mm A1, Meriam 76 mm serta *Weapon Locating Radar (WLR)*. Namun pada pembahasan kali ini penulis hanya akan membahas Alutsista modern yang dimiliki Armed TNI AD.



MLRS Astros II MK 6 melaksanakan penembakan

MLRS Astros II MK 6 merupakan Produksi Avibras, Brazil. Kemampuan tembak senjata berat MLRS ASTROS tersebut dapat melakukan peluncuran roket multi laras dengan berbagai gerak manuver dalam memberikan bantuan tembakan dan menghancurkan sasaran secara mandiri/*Artillery Strike*. Diantara munisi yang dapat digunakan adalah roket SS-30 berhulu-ledak *High Explosive* memiliki panjang 3,9 meter dan berat 68 kg per unitnya dan mampu menjangkau sasaran sejauh 30 km. Sementara itu Roket SS-40, mempunyai jarak jangkauan 15-35 km dengan berbagai jenis hulu ledak, baik *High Explosive*, *cluster* ataupun *Dual Purpose*. Untuk jenis SS-60 mempunyai jarak jangkauan 20-60 km yang bisa mencapai sasaran di jarak 60 km hanya 117 detik usai diluncurkan. Jenis SS-80 dengan jarak jangkauan 90 km dapat bermuatan senjata kimia mematikan untuk melakukan perang Bio kimia. Serta yang paling menghancurkan adalah jenis SS-150 dengan jarak jangkauan sejauh 150 km dan AV/MT-300 MT dengan daya jelajahnya yang dapat menjangkau 300 km. Namun saat ini Armed TNI AD masih belum mempunyai jenis SS-150 dan AV/MT-300 MT.

Meriam 155 mm Caesar merupakan buatan Nexter Perancis yang memiliki kemampuan jarak capai 30 km dan munisi ERFB Base Bleed hingga 40 km sedangkan bila menggunakan munisi V-LAP (*Velocity Enhance Long Range Artillery Projectile*) dapat menghancurkan sasaran pada jarak 55 km. Dari aspek keamanan, jenis teknologi munisi yang digunakan sudah memiliki standar IMU (*Insensitive Munition*) yaitu tidak akan meledak karena benturan, terkena tembakan munisi ringan atau detonasi dari luar (selain sistem penembakan meriam) sehingga menjamin keamanan awak Meriam dari ledakan sebelum munisi ditembakkan. Kemampuan daya tembak (*fire power*) yang dapat menggetarkan lawan tersebut didukung oleh sistem

komputerisasi canggih yang terintegrasi dengan adanya peralatan balistik komputer, *Inertial Navigation* unit untuk menentukan kedudukan sendiri sebagai data perhitungan penembakan dan *muzzle velocity radar* untuk mengukur kecepatan awal proyektil sehingga akurasi tembakan dapat optimal yang seluruhnya sudah terintegrasi diatas kendaraan. Di atas platform kendaraan, meriam 155 mm Caesar mampu membawa 18 butir proyektil dan isian dorong yang dengan mudah dijangkau oleh personel pelayan pucuk sehingga memudahkan dalam reload munisi. Keunggulan dari Meriam 155 mm Caesar salah satunya adalah berat tempur yang hanya 18 ton menjadikan meriam tersebut yang teringan di kelasnya sehingga sangat lincah dalam mobilitas dan melintasi medan sulit di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari meriam 155 mm Caesar adalah platform kendaraan ini menggunakan chasis 6x6 dengan dimensi yang memungkinkan diangkut oleh pesawat C-130 Hercules.

Selain dibidang persenjataan yang bersifat memberikan tembakan, Armed TNI AD memiliki teknologi pencari dan



Meriam 155 mm Caesar melaksanakan penembakan

penemu sasaran untuk mempermudah, mempercepat dan menambah akurasi pemberian bantuan tembakan yang disebut dengan *Weapon Locating Radar* (WLR). *Weapon Locating Radar* yang dimiliki Armed TNI AD saat ini merupakan program kegiatan Litbanghan bidang materiel Pussenarmed bekerjasama dengan PT Elektroteknika Utama ITB pada TA 2020 s.d. 2021. Kegiatan Litbang Prototype *Weapon Locating Radar* ini merupakan rekayasa materiel Litbang Pussenarmed untuk memenuhi kebutuhan kesisteman Alutsista Armed, kebutuhan teknis dan taktis yang dapat mendeteksi datangnya tembakan dari sarana Bantem musuh untuk kemudian dapat diketahui arah, jarak dan kedudukan hingga koordinat dari sarana Bantem musuh. Fungsi *Prototype Weapon Locating Radar* ini untuk mencari dan menemukan kedudukan Artileri Medan musuh dan lokasi ledakan munisi hasil tembakan sendiri melalui deteksi lintasan munisi/proyektil yang ditembakkan dengan jarak maksimal 20 km. Sistem kerja *Weapon Locating Radar* pencari dan penemu sasaran sebagai berikut: 1. Mendeteksi lintasan peluru yang ditembakkan oleh senjata Artileri Medan musuh. 2. Analisa arah dan jarak datangnya tembakan melalui penghitungan *Parabolic/back azimuth*. 3. Kedudukan/posisi dari senjata Artileri Medan musuh dapat diprediksi. Namun WLR ini masih belum digunakan untuk memenuhi satuan Armed yang ada karena masih bersifat uji coba serta dalam proses pengembangan. Tetapi dari hasil

uji coba, WLR ini sudah dapat berfungsi dengan baik.



Weapon Locating Radar program Litbanghan

Dengan adanya Alutsista yang sudah dimiliki, Armed TNI AD terus berusaha untuk mengembangkan Alutsistanya agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Saat ini Armed TNI AD akan menerima Rudal ITBM (*Indonesia Tactical Ballistic Missile*) 600 buatan Turki yang mampu menembak sampai dengan jarak 280 km. Keunggulan Rudal ITBM ini walaupun mampu menembak sampai dengan jarak 280 km tetapi akurasiya tidak perlu diragukan karena munisi dipandu ke sasaran dengan menggunakan panduan satelit yang memiliki CEP (*Circular Error Probability*) kurang dari 10 m. Salah satu kelebihan dari Rudal ITBM ini karena menggunakan sistem satelit navigasi global (GPS+GLONAS) sehingga tidak mengandalkan satelit militer salah satu negara. Adapun kendaraan peluncur yang digunakan adalah Tatra T3C-928.90, V8 dengan tenaga mesin 300 Kw yang mampu beroperasi dengan kecepatan maksimal 85 km/jam dan daya jelajah 700 km. Kendaraan ini menggunakan chasis kendaraan taktis roda ban 8x8 sehingga mampu menjelajah di medan yang sulit dilalui. Rudal ITBM ini rencana akan mulai diterima di Indonesia mulai tahun 2025.



Gambar Rudal ITBM 600

Armed TNI AD memang telah memiliki persenjataan yang cukup canggih, namun apabila dibandingkan dengan negara lain, hal ini masih kalah jauh karena negara lain telah mengembangkan Alutsista yang menjangkau antar benua. Seperti halnya Rusia yang mempunyai Rudal RS-28 Sarmat yang mampu menjangkau sasaran hingga 18.000 km. Selain Rusia, yang paling gencar mengembangkan Rudal adalah Korea Utara yang mempunyai Rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17 yang mampu menjangkau sasaran sejauh 1.000 km. Meskipun kekuatan militer suatu negara tidak hanya dinilai dari canggihnya Alutsista yang dimiliki saja, tetapi dengan adanya Alutsista yang canggih maka akan menjadi pertimbangan negara untuk mengganggu kedaulatan suatu negara lainnya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas diperoleh kesimpulan bahwa Alutsista Armed TNI AD saat ini masih perlu adanya pengembangan sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya guna mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI.



DOKUMENTASI ALUTSISTA ARMED TNI AD



ANALISIS PENINGKATAN STATUS KOREM 072/PAMUNGKAS MENJADI KOMANDO DAERAH MILITER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**OLEH : LETKOL INF YUDHI NOVRIZAL, S.I.P., M.HAN
(KASIREN KOREM 072/PAMUNGKAS DAM IV/DIP)**

Segala sesuatu yang hidup dan tumbuh di dunia ini tentunya akan mengalami perubahan-perubahan dan kita sebagai insan manusia yang diberikan anugrah oleh Tuhan dibekali akal dan kecerdasan serta memiliki harapan positif menuju kearah yang lebih baik. Era perkembangan yang ada saat ini dalam berinteraksi pada kehidupan bermasyarakat menghendaki perubahan yang masif dan adaptif, begitu pula dengan organisasi suka tidak suka apapun itu perspektifnya, organisasi akan mengalami perubahan untuk memenuhi berbagai tuntutan tugas sesuai dengan amanah undang-undang. Menurut Robbins (2006) dalam Rahadian (2013), pada dasarnya perubahan yang dilakukan organisasi-organisasi mengarah pada peningkatan

efektifitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Lebih lanjut, perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik dan sumber daya manusia. Tuntutan perubahan organisasi menyelimuti TNI AD untuk bisa melihat dengan cermat atas perkembangan lingkungan strategi dihadapkan dengan tuntutan tugas yang dihadapi saat ini.

Sebagai salah satu organisasi pada tubuh TNI AD Korem 072/Pamungkas yang membawahi beberapa Kodim, dan didukung beberapa satuan pendukung seperti Polisi Militer, Zeni Bangunan, Pembekalan dan Angkutan, Peralatan, Perhubungan, Kesehatan, dan lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan kekuatan dan gelar kekuatan menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk mempersiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Korem 072/Pamungkas yang berada di bawah Komando Kodam IV/Diponegoro mempunyai teritorial di wilayah eks. Karesidenan Yogyakarta dan eks. Karesidenan Kedu. Sebagai bagian dari tubuh TNI-AD, Korem 072/Pamungkas memiliki peran dan tugas utama dalam menjaga keamanan wilayah, mendukung tugas pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya, Korem 072/Pamungkas bekerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya guna menciptakan stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut.

Refleksi yang dapat dipetik pada gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian dari wilayah kerja Korem 072/Pmk terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa, dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian

selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Daerah ini memiliki keragaman karakteristik topografi, mulai dari daerah gunung di sebelah utara, daerah perbukitan di sebelah barat dan timur, serta pantai di bagian selatan (jogjapro.go.id).

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pegunungan Selatan dan Gunung berapi Merapi. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo. DIY adalah salah satu dari 38 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. DIY di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan satuan fisiografis, DIY terdiri dari Pegunungan Selatan dan Gunung berapi Merapi. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo. Posisi DIY yang terletak antara 7°33' - 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' - 110°50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km². Jenis Tanah DIY, 33,05 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09 persen Regosol, 12,38 persen Lathosol, 10,97 persen Grumusol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen Alluvial, dan 2,48 persen adalah tanah jenis Rensina (lapakgis.com).

DIY terdiri dari satu Kota dan empat kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/Kemantren, 438 kalurahan dan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Propinsi DIY tahun 2023 sejumlah 4,1 juta jiwa (BPS DIY, 2023). Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 ini menegaskan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (sistem otonomi daerah yang khusus) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (<https://id.wikipedia.org>)

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai julukan sebagai Kota Pelajar, Kota Budaya dan Kota Wisata dimana budaya Jawa gaya Yogyakarta menjadi salah satu hal yang menarik wisatawan lokal maupun Mancanegara, hal ini dikarenakan keberadaan Kasultanan Yogyakarta yang memilih mempertahankan budaya Jawa murni yang telah ada sejak masa Kasultanan Mataram. Selain itu Provinsi DIY dikenal juga sebagai Kota pelajar dimana terdapat 137 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berada di DIY, sehingga kota ini diwarnai dinamika yang cukup tinggi karena banyak pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang cukup ternama dan terbaik di Indonesia berada di DIY diantaranya Universitas Gadjah Mada, UNY, ISI Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi pada 27 Mei 2006, erupsi gunung merapi selama Oktober-November 2010, hal tersebut dikarenakan letak geografis Propinsi DIY dibagian tengah-selatan pulau Jawa pada 8° 30'-7° 20' Lintang Selatan, dan 109° 40'-111° 0' Bujur Timur. Gunung Merapi merupakan gunung api aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. (<https://id.wikipedia.org>).

Tuntutan perubahan organisasi dihadapkan dengan kondisi wilayah kerja yang ada, sebagai salah seorang pejabat perencanaan di satuan, penulis merasa perlu menginformasikan sekaligus sebagai bahan laporan kepada satuan atas dan publik sebagai wujud tanggung jawab jabatan pada era keterbukaan saat ini, bagaimana kondisi wilayah kerja dihadapkan dengan tuntutan tugas terhadap perubahan-perubahan yang

dihadapi di wilayah kerja Korem 072/Pamungkas yang bertujuan terwujudnya tata kelola sistem pertahanan yang baik dan adaptif melalui analisis peningkatan status Korem 072/Pamungkas menjadi Komando Daerah Militer DIY.



Beberapa tinjauan dalam tulisan ini diantaranya 1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1950 dan diperbarui dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1955 Provinsi DIY menyandang predikat sebagai Provinsi dengan keistimewaan atau otonomi khusus, yang saat ini Gubernur dijabat oleh Sri Sultan HB X sejak Tahun 1998 dan Wakil Gubernur dijabat oleh KGPAA Paku Alam X sejak Tahun 2017. 2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-Undang ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas, wewenang, dan kewenangan TNI. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai bagian dari struktur TNI dalam tingkat operasional. 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. PP ini mengatur tentang pembentukan dan organisasi TNI, termasuk penjelasan mengenai pembentukan dan tugas Kodam dalam tingkat operasional. 4) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pembinaan Kedaulatan,

Pertahanan dan Keamanan Wilayah, serta Percepatan Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Inpres ini menyatakan pentingnya optimalisasi pembinaan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan wilayah. Dalam instruksi ini juga termuat upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan wilayah di tingkat operasional, yang diwujudkan dalam peran dan tugas Kodam. 5) Kebijakan Strategis TNI. Perubahan dari Korem menjadi Kodam juga dapat didasarkan pada kebijakan strategis TNI yang disusun berdasarkan pertimbangan strategis nasional dan kebutuhan operasional TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Reformasi di bidang pertahanan melahirkan pemahaman yang memerlukan implementasi di lapangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Mengingat Provinsi DIY sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota budaya sehingga dinamika ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Negara cukup tinggi.

Perkembangan Lingkungan Strategis Global

1) Ancaman Non-Tradisional. Selain ancaman militer konvensional, negara-negara dihadapkan pada ancaman non-tradisional seperti terorisme, kriminalitas lintas batas, perang siber, dan peredaran narkoba. Ancaman-ancaman ini menuntut respons yang berbeda dan kerjasama internasional yang erat untuk menghadapinya.

2) Kerjasama Keamanan dan Pertahanan. Di era globalisasi, kerjasama keamanan dan pertahanan antara negara-negara menjadi semakin penting. Negara-negara berusaha untuk meningkatkan

kemitraan, pertukaran intelijen, dan latihan bersama guna menghadapi ancaman bersama dan membangun kepercayaan di antara sesama negara.

3) Proliferasi Senjata Nuklir. Masalah proliferasi senjata nuklir dan teknologi nuklir menjadi salah satu fokus perhatian dunia. Upaya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong negara-negara untuk mengikuti perjanjian nuklir internasional merupakan bagian penting dalam lingkungan strategis global.

4) Perang Asimetris. Perkembangan teknologi telah membuka kemungkinan untuk perang asimetris, di mana negara-negara dengan sumber daya yang terbatas dapat menghadapi negara-negara yang lebih besar secara tidak seimbang melalui strategi dan taktik yang berbeda.

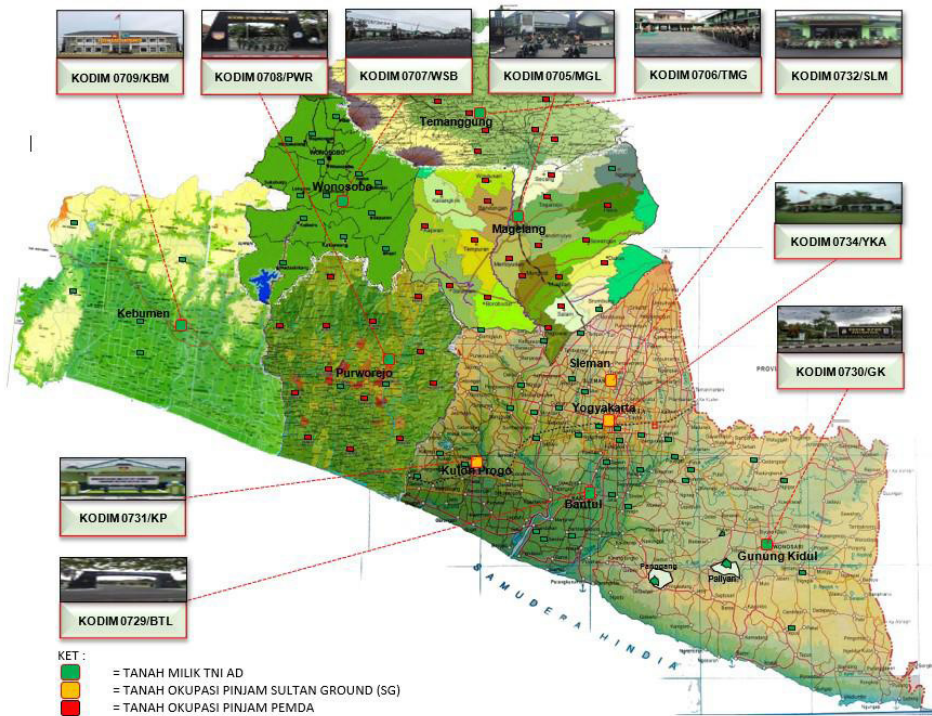
5) *Cybersecurity*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan tantangan baru dalam bentuk serangan siber. Negara-negara harus memperkuat pertahanan siber mereka dan meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman siber.

6) Masalah Kemanusiaan. Konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah dunia menuntut respons yang tepat dari negara-negara untuk membantu korban perang, pengungsi, dan warga sipil yang terdampak.

7) Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan dapat menyebabkan ketegangan antar negara terkait sumber daya alam dan dampaknya terhadap keamanan.

8) Penggunaan Teknologi dalam Keamanan. Perkembangan teknologi militer, termasuk kecerdasan buatan dan teknologi otonom, juga dapat memiliki dampak besar pada strategi dan taktik keamanan negara.

Perkembangan Lingkungan Strategis Regional



1) Persepsi Keamanan Negara Tetangga. Peningkatan status dari Korem menjadi Kodam mungkin akan mempengaruhi persepsi keamanan negara-negara tetangga di wilayah sekitar DIY. Negara-negara tetangga dapat mengamati perubahan tersebut sebagai pergeseran dalam kemampuan militer dan peran strategis DIY dalam wilayah.

2) Kerjasama Militer Regional. Peningkatan status menjadi Kodam dapat berdampak pada kerjasama militer dan keamanan regional. DIY, sebagai wilayah dengan potensi budaya, pendidikan, dan pariwisata yang penting, mungkin menjadi pusat kerjasama militer dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi tantangan keamanan bersama.

3) Pengaruh pada dinamika politik regional. Peningkatan status militer DIY dapat mempengaruhi dinamika politik regional. DIY telah menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan kebijakan, dan perubahan ini mungkin memengaruhi hubungan politik dan

diplomasi antara DIY dengan negara-negara tetangga.

4) Hubungan dengan pemerintah pusat. Peningkatan status Korem menjadi Kodam mungkin juga mempengaruhi hubungan DIY dengan pemerintah pusat, termasuk dalam hal pembangunan wilayah, anggaran pertahanan, dan koordinasi kebijakan strategis.

5) Potensi Anakronisme Sejarah. Sebagai wilayah dengan status istimewa, DIY memiliki sejarah yang khas dalam kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan kebudayaan. Peningkatan status menjadi Kodam dapat menciptakan tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah dan budaya DIY dalam lingkungan strategis yang terus berubah.

6) Pengaruh pada Pembangunan Wilayah. Peningkatan status Korem menjadi Kodam mungkin memiliki dampak pada pembangunan wilayah DIY. Fokus dan alokasi sumber daya dapat berubah untuk mendukung tugas militer dan pertahanan wilayah.

Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

1) Kemampuan Pertahanan Nasional. Peningkatan status Korem menjadi Kodam dapat mempengaruhi kemampuan pertahanan nasional secara keseluruhan. Dengan peran dan kewenangan yang lebih luas, Kodam akan menjadi unsur penting dalam memastikan kesiapan dan keandalan militer dalam menghadapi berbagai potensi ancaman.

2) Pembagian Wilayah Strategis. Peningkatan status ini dapat melibatkan penyesuaian dalam pembagian wilayah strategis nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan dan koordinasi dalam pertahanan wilayah.

3) Kebijakan Keamanan Nasional. Peningkatan status Korem menjadi Kodam dapat mencerminkan perubahan dalam kebijakan keamanan nasional yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

4) Peningkatan Kesiapan Militer. Peningkatan status ini mungkin mempengaruhi peningkatan kesiapan militer dan kemampuan operasional TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) dalam menghadapi berbagai ancaman di tingkat nasional.

5) Kerjasama dalam dan luar negeri. Peningkatan status Korem menjadi Kodam dapat mempengaruhi kerjasama militer dalam negeri dengan pihak-pihak terkait, seperti Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, perubahan ini juga dapat mempengaruhi hubungan dengan mitra-mitra internasional dalam hal pertahanan dan keamanan.

6) Pembinaan Teritorial. Pembinaan teritorial adalah aspek penting dalam strategi keamanan nasional. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara pembinaan teritorial dilaksanakan di tingkat nasional untuk memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

7) Anggaran Pertahanan. Peningkatan status Korem menjadi Kodam mungkin melibatkan perubahan dalam alokasi anggaran pertahanan

nasional untuk mendukung peran dan tugas Kodam yang lebih luas.

8) Potensi dampak pada wilayah. Peningkatan status satuan juga dapat mempengaruhi wilayah tempat Kodam berada, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam wilayah tersebut.

Perkembangan Lingkungan Strategis Lokal

1) Pengaruh pada wilayah tanggung jawab. Peningkatan status dari Korem menjadi Kodam dapat mempengaruhi wilayah tanggung jawab dan kewenangan operasional TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) di DIY. Pemekaran menjadi Kodam dapat menyebabkan penyesuaian dalam batas wilayah tanggung jawab dan struktur organisasi militer di wilayah tersebut.

2) Pembinaan teritorial dan kemanunggalan dengan rakyat. DIY memiliki nilai historis dan budaya yang khas serta peran khusus dalam pembinaan teritorial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Perubahan menjadi Kodam dapat mempengaruhi pendekatan dan strategi dalam pembinaan teritorial serta hubungan antara TNI dengan masyarakat setempat.

3) Kerjasama dengan pemerintah daerah. Peningkatan status dari Korem menjadi Kodam juga dapat mempengaruhi kerjasama dan koordinasi antara TNI dengan pemerintah daerah DIY dalam berbagai hal, termasuk pengamanan, penanggulangan bencana, dan pembangunan wilayah.

4) Potensi ancaman keamanan. Perubahan lingkungan strategis dapat mempengaruhi pemetaan dan penilaian potensi ancaman keamanan di wilayah DIY. Peningkatan status menjadi Kodam dapat mempengaruhi taktik dan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi potensi ancaman yang lebih kompleks.

Dari latar belakang dan perkembangan lingkungan yang terjadi

dan kondisi wilayah Korem 072/Pmk DIY dengan segala permasalahan yang perlu dicermati dan diantisipasi, maka perlu pendalaman pokok-pokok permasalahan dan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal terhadap perlunya peningkatan status Korem menjadi Kodam Baru di DIY dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan berdasar kepada wilayah administratif DIY.

Tinjauan Aspek-Aspek

1) Aspek Geografis. Letak Geografis. DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa, Indonesia. Secara geografis, DIY berada di antara 7° 43' - 8° 12' Lintang Selatan dan 110° 00' - 110° 32' Bujur Timur. DIY memiliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah bagian selatan DIY umumnya datar dengan beberapa bukit dan perbukitan. Sementara itu, bagian utara DIY merupakan daerah pegunungan dengan beberapa gunung, seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Wilayah DIY dilalui oleh beberapa sungai, termasuk Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Code. Sungai-sungai ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian dan sumber daya air di wilayah tersebut. Meskipun DIY tidak berbatasan langsung dengan laut, wilayah pantai dan pesisir terdapat di sebelah selatan DIY, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Pantai-pantai ini menjadi daya tarik pariwisata yang penting bagi DIY. DIY memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung antara Oktober hingga April, sementara musim kemarau berlangsung antara Mei hingga September. DIY berada di wilayah yang rawan terhadap bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi dan gempa bumi. Letusan Gunung Merapi pada tahun

2010 dan 2021 menyebabkan kerusakan dan pengungsian bagi masyarakat di sekitarnya.

2) Aspek Topografis. DIY memiliki peran penting dalam menentukan kondisi alam dan lingkungan wilayah tersebut. Topografi dan iklimnya mempengaruhi sektor pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup. Selain itu, potensi bencana alam juga harus menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah dan upaya mitigasi risiko bencana.

3) Aspek Historis. Sejak abad ke-8 hingga abad ke-10, wilayah DIY merupakan pusat kekuasaan dari Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah Jawa dan menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara pada masa itu. DIY memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah dinas Wakil Residen (sekarang menjadi Museum Proklamasi) di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, namun sebelumnya naskah proklamasi disempurnakan di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan, DIY menjadi wilayah yang memiliki status istimewa dengan sistem pemerintahan kerajaan. Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Gubernur DIY yang pertama dan wilayah ini diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia dengan otonomi khusus. DIY juga menjadi basis pergerakan nasional dan kegiatan perjuangan dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan dan aktivitas kebijakan politik nasional berpusat di Yogyakarta selama masa pendudukan Belanda dan setelahnya. DIY telah menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. DIY memiliki beberapa universitas terkemuka, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menjadi salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia. Kekayaan sejarah dan budaya DIY dapat dilihat dalam berbagai situs bersejarah dan candi, seperti Candi Borobudur dan Candi

Prambanan, yang merupakan Warisan Dunia UNESCO. Selain itu, DIY juga memiliki tradisi budaya, seperti wayang kulit dan tari-tarian Jawa yang terkenal. Aspek historis DIY telah memberikan identitas unik bagi wilayah ini dan tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. DIY memiliki peran khusus dalam pembangunan nasional dan menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

4) Aspek Demografi. Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk DIY tergolong relatif kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hingga September 2021, DIY memiliki jumlah penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Meskipun DIY memiliki luas wilayah yang tergolong kecil, kepadatan penduduknya relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sebagian besar penduduk DIY berada pada rentang usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Namun, seperti halnya di sebagian besar wilayah Indonesia, DIY juga menghadapi fenomena penuaan penduduk, di mana jumlah penduduk lansia (di atas usia 65 tahun) semakin meningkat. DIY memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Sleman. Universitas-universitas ternama seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) berada di DIY dan menjadi pusat pendidikan tinggi. DIY adalah salah satu wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia. Banyak penduduk yang bermigrasi ke wilayah perkotaan seperti Yogyakarta untuk mencari pekerjaan atau mengejar pendidikan. DIY memiliki keragaman etnis dan budaya. Meskipun mayoritas penduduk adalah Jawa, DIY juga dihuni oleh beberapa etnis minoritas seperti Sunda, Batak, dan Madura. Budaya Jawa masih mendominasi, dan tradisi budaya seperti batik, wayang kulit, dan tari-tarian Jawa masih dijaga dan dilestarikan.



Aspek demografi DIY memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah terkait pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Data demografi yang akurat menjadi dasar untuk perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi penduduk DIY.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, dibentuknya Kodam di DIY dapat membantu pemerintah daerah dalam melestarikan budaya Jawa melalui program dan kegiatan TNI AD yang dapat mempertahankan budaya Jawa murni yang telah ada sejak masa Kasultanan Mataram. Selain itu sebagai Kota pelajar dengan dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia kerawanan wilayah dapat muncul sewaktu-waktu di DIY.



Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan status Korem menjadi Kodam, antara lain:

Faktor Internal

1) Tugas Kodam IV/Diponegoro menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial, untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah Provinsi DIY, untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Provinsi DIY. 2) Faktor Kesetaraan dan Koordinasi, saat ini Korem dipimpin oleh Danrem berpangkat Brigjen TNI (Bintang Satu), Korem 072/Pmk membawahi 5 Kodim berada di wilayah Kedu (Jawa Tengah) dan 5 Kodim berada di wilayah provinsi DIY, sedangkan untuk Kepolisian Daerah (Polda) DIY di Pimpin oleh Kapolda berpangkat Bintang Dua (Irjen Pol) dengan dibentuknya Kodam diharapkan dapat menyetarakan kepangkatan unsur pimpinan instansi TNI dan POLRI di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, akan dapat mempermudah koordinasi dalam membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai permasalahan (penanganan konflik sosial, Pam VVIP, penanggulangan bencana alam dan Pam Obvitnas). Sesuai dengan pernyataan diatas, perubahan dilakukan mengarah pada peningkatan efektifitas organisasi yang bertujuan untuk optimalisasi kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi (Robbins, 2006 dalam Rahadian, 2013).

Pertimbangan

1) Peningkatan Status Korem menjadi Kodam Baru di Yogyakarta, akan berdampak pada penataan dan restrukturisasi satuan jajaran TNI AD yang ada saat ini khususnya Kodam IV/ Diponegoro. 2) Pemenuhan personel disesuaikan TOP Kodam membutuhkan jumlah personel cukup besar dan memakan proses waktu, sehingga pengisian personel akan ditentukan oleh Komando Atas melalui proses bertahap dengan skala prioritas. 3) Pemenuhan materiel sebagai kelengkapan satuan disesuaikan dengan Orgas Kodam yang akan ditentukan oleh Komando Atas melalui proses bertahap dengan skala prioritas. Korem 072/Pamungkas sebagai organisasi selalu ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengutamakan kepuasan kepada para penentu kebijakan.

Faktor Eksternal

1) Sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada di wilayah Prov DIY sangat melimpah untuk dapat dikelola secara lebih baik dan dimobilisasi menjadi sumberdayapertahanan,dalam perspektif manajemen pertahanan. 2) Yogyakarta mendapat Julukan Kota Budaya dan Kota Pelajar sehingga banyak universitas yang tersedia oleh karena itu ribuan mahasiswa penjurur Nusantara berdatangan untuk menempuh pendidikan di DIY, sehingga dapat dikatakan sebagai “miniatur Indonesia”.

Pertimbangan

1) Pembangunan Korem menjadi Kodam sangat tergantung pada alokasi dukungan anggaran dan sarana/prasarana yang disiapkan oleh pemerintah mulai dari penyiapan lahan, pembangunan pangkalan sampai dengan pengadaan materiel. Khusus pembangunan pangkalan di DIY terkendala oleh status tanah yang rata-rata milik sultan (Sultan Ground). 2) Kondisi keamanan di DIY sangat kondusif, namun angka kriminalitas meningkat dibandingkan

pada tahun 2021 yaitu sebanyak 704 kasus. Pada kriminalitas kenakalan remaja di DIY banyak dilakukan oleh anak/remaja usia 14 tahun hingga 19 tahun yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, biasanya masyarakat Yogyakarta menyebutnya “Klithih” karena dilakukan pada malam hari dan menjadi sebuah fenomena sendiri. Pada awalnya, “Klithih” hanyalah berupa kegiatan perundungan antar geng, namun semakin lama yang targetnya berkembang dari geng musuh menjadi masyarakat awam. Selain itu salah satu organisasi kedaerahan tersebut adalah organisasi Orang Papua dengan kegiatannya melakukan unjukrasa yang disertai pengibaran bendera Bintang Kejora karena mendukung Kemerdekaan Papua. Adanya organisasi tersebut sering terjadi pergesekan/keributan yang menyebabkan konsentrasi masa dari kedua organisasi dan menimbulkan korban jiwa. Mc Calman dan Paton (1992) dalam Hakim dan Sugiyanto (2017) menyatakan bahwa tuntutan perubahan berasal dari perubahan eksternal yang sedang dihadapi oleh kebanyakan organisasi modern dewasa ini di dunia internasional, oleh sebab itu keadaan sosial sebagai faktor eksternal menuntut Korem 072/Pamungkas sebagai organisasi untuk dapat berubah menghadapi tuntutan tugas yang semakin hari kedepan semakin kompleks.

Mengingat tugas Kodam menyelenggarakan pembinaan kemampuan, gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial, dan untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah Provinsi DIY. Dihadapkan dengan hal tersebut peningkatan status Korem menjadi Kodam dapat menjadi peluang wilayah diantaranya; 1) Membantu mengatasi konflik sosial yang mungkin terjadi akibat heterogenitas dan dinamika masyarakat yang cukup tinggi dan 2) Membantu melaksanakan pengamanan wilayah bersama POLRI dan

aparat daerah lainnya untuk mengatasi kriminalitas seperti fenomena “Klithih” serta meminimalisir kerawanan terhadap aktifitas kegiatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ada di daerah Yogyakarta.

Selain peluang ada beberapa kendala yang dihadapi, pertama lahan yang akan digunakan untuk pangkalan berstatus “Sultan Ground” menjadi pertimbangan tersendiri dalam pembentukan Kodam baru; Kedua pemenuhan personel dan materiel disesuaikan dengan Orgas Kodam sehingga membutuhkan jumlah personel dan materiel cukup besar oleh karena itu memerlukan waktu yang relatif lama, pengisian personel akan ditentukan oleh Komando Atas melalui proses bertahap dengan skala prioritas.

Harapan dibentuknya Kodam di DIY dapat membantu pemerintah daerah dalam rangka mengatasi permasalahan kondisi sosial, kondisi keamanan wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melaksanakan upaya khusus dalam bentuk pendampingan/pengawasan dan pembinaan dalam pemberdayaan potensi wilayah.

Peningkatan status Korem menjadi Kodam tentunya perlu mendapatkan perhatian yang khusus, dari beberapa persoalan yang telah dibahas, menjadi refleksi setiap pejabat perencanaan untuk mewujudkan tindak lanjut secara nyata, tataran kewenangan untuk mengatasi permasalahan tentunya perlu di inventarisir, langkah konkrit yang dilakukan disatukan setidaknya memiliki road map yang berisikan bagaimana penataan organisasi, personel, materiel dan pangkalan yang akan dikembangkan menjadi setingkat Kodam namun demikian besarnya tanggung jawab moral dan tuntutan tugas yang semakin kompleks menuntut adanya peningkatan organisasi militer secara efektif dan efisien menjadi kunci faktor kritis menuju sukses menjawab tugas yang diberikan oleh Negara.

KAPABILITAS GELAR KEKUATAN TNI AD

DI PERBATASAN NEGARA YANG OPTIMAL SECARA BERKELANJUTAN

Perbatasan negara merupakan penanda wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional yang bersifat strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 30).¹ Untuk kepentingan tersebut, TNI menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan dengan menggelar kekuatan TNI AD di kawasan perbatasan darat dalam bentuk Komando Tugas Gabungan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat (Kogasgab Pamwiltasrat). Kekuatan tersebut dikelola untuk mewujudkan kapabilitas dalam bentuk kemampuan operasional untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan perbatasan darat. Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, pengelolaan kekuatan dan kapabilitas tersebut dilakukan oleh TNI AD bersama-sama dengan Mabes TNI dan Kemhan sesuai peran masing-masing sebagai Unit Organisasi (UO).

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)², kapabilitas berarti kecakapan atau kemampuan melakukan sesuatu. Dalam konteks perencanaan, pertahanan negara dibangun dengan pendekatan perencanaan berbasis kapabilitas (*Capacity Based Planning/ CBD*). Dalam pendekatan ini, pertahanan negara tidak cukup dibangun untuk menghasilkan kemampuan yang statis dan bebas pengaruh, tetapi kemampuan itu juga harus berdampak teratasi/terjawabnya persoalan tantangan tugas/ancaman yang dihadapi.³ Oleh sebab itu, gelar kekuatan TNI AD di perbatasan



**OLEH : LETKOL INF HASAN ABDULLAH, M.Si(HAN) M.P.M.
(DANBRIGIF 19/KHATULISTIWA KODAM XII/TANJUNGPURA)**

harus dapat mewujudkan kapabilitas yang optimal secara berkelanjutan, yaitu kemampuan yang dapat mengatasi/menjawab persoalan tantangan tugas/ancaman yang dihadapi selama operasi itu berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi permasalahan utama dalam esai ini adalah, “Bagaimana mewujudkan kapabilitas gelar kekuatan TNI AD di perbatasan yang optimal secara berkelanjutan?”. Untuk menjawab permasalahan utama tersebut, esai ini mengulas tiga hal. Pertama, bagaimana gelar kekuatan TNI AD di perbatasan. Kedua, bagaimana proses pembangunan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Daring*. Dipetik Agustus 27, 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapabilitas>.

³ Davis, P. K. (2002). *Analytical architecture for capabilities-based planning, mission-system analysis, and transformation*. Santa Monica: RAND.

kapabilitas gelar kekuatan TNI AD di perbatasan. Ketiga bagaimana hasil pembangunan kapabilitas gelar kekuatan TNI AD di perbatasan. Permasalahan utama dan ketiga ulasan tersebut akan dibahas dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan dengan studi kasus gelar kekuatan TNI AD di perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Kodam XII/Tanjungpura.



Selain kepentingan strategis pertahanan dan keamanan negara, wilayah perbatasan juga mengandung kepentingan negara pada aspek politik, ekonomi dan kesejahteraan serta sosial budaya. Pembahasan permasalahan utama esai ini memiliki nilai penting yaitu terwujudnya perbatasan negara yang aman secara berkelanjutan sehingga menjamin terselenggaranya seluruh kepentingan negara di perbatasan, termasuk aspek-aspek di luar pertahanan dan keamanan.

Pembahasan secara analisis deskriptif melalui studi kasus memberikan nilai guna berupa gambaran tentang kondisi dan kapabilitas gelar kekuatan TNI AD di perbatasan. Selain itu, pembahasan tentang proses pembangunan dan hasil kapabilitas gelar kekuatan TNI AD

di perbatasan dapat menjadi titik awal pemahaman konsep kapabilitas yang berkelanjutan dalam diskursus operasi militer TNI AD.

Gelar Kekuatan TNI AD di Perbatasan (Studi Kasus Wilayah Kalbar Kodam XII/Tpr)

Operasi pengamanan perbatasan darat RI-Malaysia wilayah Kalbar memiliki sejumlah tantangan tugas.⁴ Garis perbatasan negara sepanjang 970 km melintasi kontur medan yang pada umumnya sulit dilalui. Dalam kondisi tersebut, RI-Malaysia masih memiliki sembilan masalah klaim perbatasan (*Outstanding Boundary Problems/OBP*). Selain itu, terdapat 123 jalur lintas batas ilegal yang rawan terhadap pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan, dan peredaran Narkoba. Lintas batas manusia antar negara di kawasan tersebut juga memiliki kerawanan terhadap penyebaran paham-paham anti ideologi negara dan terorisme. Di samping itu, kondisi wilayah perbatasan yang relatif belum berkembang juga memiliki kerawanan timbulnya konflik komunal/horizontal serta rendahnya kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).



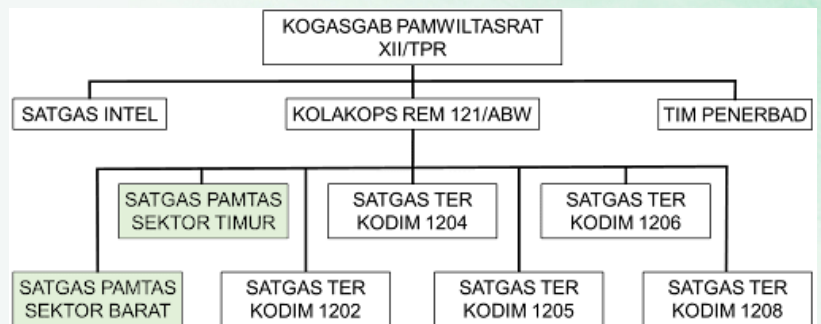
⁴Kodam XII/Tpr. (2023). *Paparan Satgas Pamtas RI-Malaysia TA 2023 di Wilayah Kodam XII/Tpr*. Kubu Raya: Kodam XII/Tpr.



Gelar kekuatan TNI AD di perbatasan darat Indonesia-Malaysia wilayah Kalbar Kodam XII/Tpr disusun dalam Kogasgab Pamwiltasrat XII/Tpr dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial (Binter) dan Komunikasi Sosial (Komsos), mengamankan patok perbatasan, mencegah kegiatan ilegal dan penyelundupan, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan. Unsur-unsurnya terdiri Satgas Intel, Kolakops Rem 121/Abw, dan Tim Penerbad. Adapun Kolakops Rem 121/Abw terdiri dari dua Satgas Pamtas dan lima Satgas Teritorial (Bagan 1). Setiap unsur dalam Kogasgab Pamtaswiltasrat XII/Tpr dilengkapi dengan fasilitas, senjata, peralatan, dan materiel lainnya yang menunjang pelaksanaan tugasnya dalam operasi pengamanan perbatasan.



Adapun unsur-unsur Kogasgab Pamwiltasrat XII/Tpr yang dominan dalam tugas pengamanan perbatasan darat adalah dua Satgas Pamtas di bawah Kolakops Rem 121/Abw. Kedua Satgas tersebut dibagi dalam dua sektor. Sektor barat digelar dalam 26 pos dan sektor timur sejumlah 25 pos. Masing-masing Satgas merupakan satu Satuan Setingkat Batalyon (SSY) dari satuan batalyon organik TNI AD berkekuatan 350 orang. Pada bulan Agustus 2023, Satgas Yon Armed 16/Tk ditempatkan di sektor barat dan Yon Armed 10/Brajamusti berada di sektor timur.



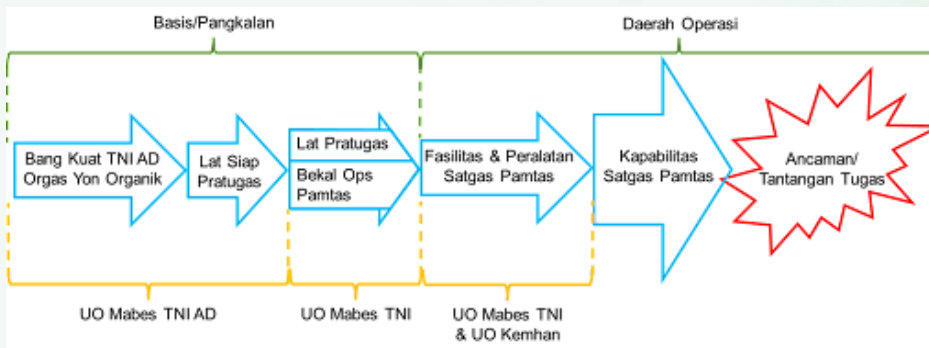
Bagan 1. Struktur Organisasi Kogasgab Pamwiltasrat XII/Tpr dengan Satgas Pamtas sebagai unsur dominan.

Proses Pembangunan Kapabilitas Gelar Kekuatan TNI AD di Perbatasan

Kapabilitas Satgas Pamtas sebagai unsur gelar kekuatan TNI AD di perbatasan dibangun melalui beberapa skema yang diselenggarakan oleh beberapa UO di lingkungan Kemhan TNI. Diawali dari skema dasar pembangunan kekuatan TNI AD untuk sesuai organisasi dan tugas (Orgas) batalyon organik, yang selanjutnya diperkuat dengan skema latihan penyiapan pratugas. Pembangunan kapabilitas pada kedua skema ini diselenggarakan oleh UO Mabes TNI AD dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UO TNI AD.

Skema selanjutnya adalah latihan pratugas dan dukungan bekal operasi pengamanan perbatasan yang

diselenggarakan oleh UO Mabes TNI tertuang dalam Renstra UO Mabes TNI. Skema-skema ini diselenggarakan ketika satuan tersebut masih berada di basis/pangkalan. Setelah berada di daerah operasi, kapabilitas Satgas Pamantas diperkuat lagi dengan sejumlah fasilitas dan peralatan yang telah tersedia di daerah operasi pengamanan perbatasan yang pembangunannya diselenggarakan oleh UO Mabes TNI dan UO Kemhan yang tertuang dalam Renstra UO masing-masing.



Bagan 2. Skema pembangunan kapabilitas Satgas Pamantas.



Hasil Kapabilitas Gelar Kekuatan TNI AD di Perbatasan

Dengan kapabilitas yang telah dibangun melalui beberapa skema dalam wujud kekuatan personel, materiel, fasilitas, latihan dan doktrin serta

kemampuan yang dimiliki, Yon Armed 16/Tk dan Yon Armed 10/Bradjamusti sebagai unsur Satgas Pamantas di bawah Kolakops Rem 121/Abw, selama tiga bulan pelaksanaan operasi hingga bulan Agustus 2023 berhasil mengamankan 16 orang pelintas batas ilegal, 5 kasus penyelundupan, 22 pucuk senjata api ilegal, dan 6 kasus narkoba, total 56 kasus. Sedangkan hasil operasi Satgas sebelumnya Yonif 645/Gty dan Yon Armed 19/105 Tarik selama satu tahun berhasil mengamankan 405 orang pelintas batas ilegal, 14 kasus penyelundupan, 1 kasus penebangan liar, 113 pucuk senjata api ilegal, dan 8 kasus narkoba, total 551 kasus.

Meskipun hasil pelaksanaan operasi Satgas Pamantas tersebut cukup signifikan secara kuantitas, namun belum menggambarkan kapabilitas yang optimal. Di sisi lain, masih terdapat kendala-

kendala yang menghambat pelaksanaan tugas sehingga mengurangi dampak operasi terhadap permasalahan/ancaman di perbatasan. Hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) pada tahun 2020, 2021, dan 2022⁵ menunjukkan kondisi beberapa fasilitas dan gelar alat komunikasi (Alkom) yang digunakan dalam operasi Pamantas RI-Malaysia wilayah Kalbar tertinggi pada angka 75% (Tabel 1). Sedangkan Laporan Pelaksanaan Operasi Pamantas Kodam XII/Tpr bulan Agustus 2023 juga menyatakan masih adanya kerusakan peralatan drone, keterbatasan alat transportasi, keterbatasan gelar Alkom, minimnya pengetahuan dan peralatan Satgas untuk mendeteksi bahan-bahan Narkoba, dan tidak efektifnya JIPP. Berkurangnya dampak operasi Pamantas terhadap permasalahan di perbatasan akibat kendala-kendala tersebut menunjukkan belum optimalnya kapabilitas gelar kekuatan Satgas Pamantas.

⁵Simbolon, R. (2022). *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Lintas Batas Negara Tahun 2020-2024*. Bogor: BNPP RI.

Tabel 1. Kondisi fasilitas dan peralatan Satgas Pamtas hasil survei BNPP RI.

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021	2022
Pos Pamtas	50%	75%	75%
JIPP	50%	50%	60%
Helipad	30%	30%	50%
Gelar Alkom	60%	50%	50%

Fasilitas dan peralatan yang rusak berdasarkan data hasil survei BNPP RI dan laporan Kodam XII/Tpr tersebut, tentunya pernah mengalami saat berfungsi dengan baik. Ketika berfungsi dengan baik, fasilitas dan peralatan itu dapat mendukung operasional Satgas Pamtas untuk pemantauan, berpindah tempat/transportasi, dan komunikasi, sehingga kapabilitas Satgas Pamtas menjadi optimal. Ketika fasilitas dan peralatan itu rusak dan tidak segera diperbaiki melalui dukungan pemeliharaan dan perawatan (Harwat), maka kapabilitas Satgas Pamtas menjadi tidak optimal dan optimalnya kapabilitas Satgas Pamtas ketika fasilitas dan peralatan itu masih berfungsi baik tidak berlanjut.



Demikian pula halnya dengan keterbatasan fasilitas dan peralatan akibat tidak adanya dukungan pengadaan. Kapabilitas Satgas Pamtas optimal hanya untuk unsur Satgas Pamtas tertentu yang mendapat dukungan atau dapat menggunakan fasilitas atau peralatan tersebut. Secara keseluruhan, kapabilitas Satgas Pamtas menjadi tidak optimal karena masih ada unsur-unsurnya yang tidak menggunakan fasilitas atau peralatan tersebut.



Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran

Ketiadaan dukungan Harwat dan pengadaan guna mendukung operasional Satgas Pamtas erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan beserta penganggarnya oleh tiap UO penyelenggara pembangunan kapabilitas Satgas Pamtas pada setiap skema (Bagan 2). Dengan keterlibatan tiga UO yang berbeda, maka perlu adanya keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan beserta penganggaran terkait operasi Satgas Pamtas di UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI, dan UO Kemhan.

Mengacu pada sistem perencanaan fiskal nasional Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) (Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penjelasan)⁶, perencanaan program dan kegiatan beserta penganggarnya didesain sebagai strategi untuk mencapai visi serta tujuan dan sasaran strategis jangka waktu lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra. Oleh sebab itu, sinkronisasi program, kegiatan, dan penganggaran terkait operasi Satgas Pamtas khususnya aspek dukungan pengadaan dan Harwat ini harus dilakukan sejak penyusunan Renstra. Selanjutnya, keselarasan Renstra UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI, dan UO Kemhan nantinya ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran tahunan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen operasional yang mendasari dukungan pengadaan dan Harwat guna operasional Satgas Pamtas yang optimal secara berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, gelar kekuatan TNI AD di perbatasan saat ini didesain dan dibangun untuk menghasilkan kapabilitas yang optimal dalam menghadapi tantangan tugas/ancaman

sesuai tugas yang ditetapkan. Proses pembangunan kapabilitas tersebut melibatkan UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI, dan UO Kemhan melalui beberapa skema yang berkelanjutan sejak satuan masih berada di basis/pangkalan sampai di daerah operasi. Hasil pembangunan kapabilitas menunjukkan kuantitas keberhasilan tugas yang cukup signifikan. Namun dengan adanya kendala-kendala akibat dukungan Harwat dan pengadaan beberapa jenis fasilitas dan peralatan, kapabilitas yang dibangun belum optimal dan belum berkelanjutan. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian program, kegiatan, dan penganggaran terkait operasi Satgas Pamtas khususnya aspek dukungan pengadaan dan Harwat fasilitas dan peralatan antara ketiga UO yang terkait mulai dari perencanaan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra masing-masing UO. Penyesuaian Renstra masing-masing UO tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran tahunan yang sinkron sehingga dapat mewujudkan kapabilitas gelar kekuatan TNI AD di perbatasan yang optimal secara berkelanjutan.

⁶Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

PENGEMBANGAN PERAN KODIM DI WILAYAH PAPUA

**DALAM MEWUJUDKAN PEMBINAAN
TERITORIAL YANG KOLABORATIF BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENDEKATAN
KESEJAHTERAAN BERNILAI GUNA**



**OLEH : LETKOL INF BUDIANTO HAMDANI DAMANIK
(DANDIM 0317/TBK KOREM 033/ WIRA PRATAMA
KODAM I/BUKIT BARISAN)**

Pendekatan kesejahteraan bernilai guna saat ini menjadi pilihan utama Pemerintah dalam menghadapi gerakan separatis karena menempatkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika dihadapkan pada gerakan separatis, maka Pemerintah harus mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan serta memulihkan stabilitas wilayah yang terkena dampak konflik. Pemerintah Indonesia secara cepat mengambil langkah-langkah strategis yang dianggap

ideal, yaitu: pendekatan kesejahteraan¹ (*soft approach*) dan dikawal oleh kekuatan pertahanan yang berfokus pada kegiatan teritorial satuan kewilayahan dengan meningkatkan pembangunan dalam lima sasaran prioritas, berupa: sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, perekonomian serta pembangunan infrastruktur dengan memberdayakan Orang Asli Papua sesuai amanat UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua, maka penting dipahami bahwa

¹ Wonda, Damai Di Antara Pusaran Konflik Papua (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2015) hlm. 27-28

pendekatan kesejahteraan bernilai guna yang dilakukan oleh satuan kewilayahan sepatutnya diukur berdasarkan sejauh mana nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau keputusan dalam waktu jangka panjang.

Perjalanan panjang gerakan separatis di wilayah Papua mulai tahun 1960 sampai dengan saat ini semakin menunjukkan bahwa pola atau strategi yang dikembangkan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KKB/KST/KSTP) semakin memenuhi unsur-unsur adaptabilitas/fleksibilitas, efektifitas, keunggulan taktis dan dukungan masyarakat yang tentunya menjadi unsur paling terpenting, dimana perubahan antar generasi ternyata tidak merubah sudut pandang (perspektif) ideologi mereka untuk tetap memisahkan Papua dari Indonesia atau membentuk negara sendiri. Kondisi ini selaras dengan pendapat Konfusius² “meskipun memiliki tiga Angkatan bala tantara yang sangat kuat, komandannya masih bisa ditangkap. Namun, ideologi yang diyakini seseorang tidak mudah digoyahkan oleh siapapun”. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini terjadi tidak terlepas dari masa lalu sehingga menyebabkan dampak jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan disinilah pentingnya pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan outcome jangka panjang berupa peningkatan sumber daya manusia khususnya pendidikan sejak dini sebagai awal mendoktrinisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, NKRI).

Vitalitas peran Kodim dengan melaksanakan pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama pemerintah daerah melalui pendekatan kesejahteraan menjadi jawaban untuk memperlemah kekuatan Kelompok Separatis Bersenjata

(KKB/KST/KSTP) khususnya kelompok yang dikategorikan memiliki visi kuat (harga mati) dengan tujuan utama adalah untuk menurunkan dukungan simpatisan yang berafisiliasi. Dalam mewujudkan pembinaan teritorial yang kolaboratif ini diperlukan kemampuan Dandim selaku Perancang Utama (Main Designer) kegiatan binter di wilayah untuk mengembangkan model yang “tepat guna-tepat sasaran” dalam arti pentingnya menggunakan sesuatu dengan efektif serta mengarahkan usaha kepada tujuan yang tepat sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan TNI AD yang berada di wilayah Kodim setempat (Organik dan BKO) dan endurance binter dapat terjaga. Dari penjelasan tersebut, terdapat 3 identifikasi permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu: Pertama, Kodim belum memainkan peran lebih besar sebagai perancang utama (*main designer*) kegiatan binter di wilayah untuk mengembangkan model yang “tepat guna - tepat sasaran”; Kedua, Masih adanya keraguan dari pemerintah daerah untuk mengkolaborasikan program-programnya dengan Kodim sehingga tidak tersistem dengan baik; Ketiga. Kodim belum dapat mengembangkan pendekatan kesejahteraan bernilai guna untuk jangka panjang dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimilikinya.



²Wang, The Wisdom Of Confucius (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011) hlm. 91

Selama kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2021, telah terjadi peningkatan konflik vertikal di Papua. Menurut data *Centre For Strategic And International Studies* (CSIS)³ terdapat 91 kasus dengan melibatkan 16 korban pada tahun 2015, pada tahun 2021 terjadi 68 kasus dengan melibatkan 114 korban dan pada tahun 2022 terjadi trend penurunan sebanyak 51 kasus dengan melibatkan 70 korban, namun persentase kematian warga sipil meningkat sebesar 43% (tenaga kerja proyek infrastruktur, tenaga guru hingga tenaga Kesehatan saat melaksanakan tugas di Papua). Memasuki tahun 2023, Kelompok Separatis Bersenjata (KKB/KST/KSTP) semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan beberapa aksi sehingga mengakibatkan korban jiwa dari pihak TNI maupun masyarakat sipil. Adapun lokasi konflik bersenjata yang sering terjadi di wilayah Keerom, Timika⁴, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Nduga⁵. Data ini menunjukkan bagaimana aktifitas Kelompok Separatis Bersenjata (KKB/KST/KSTP) di beberapa wilayah Papua yang semakin meningkat mengindikasikan adanya dukungan dari simpatisan yang telah berafiliasi dengan masyarakat setempat maupun tokoh lokal.



Sejarah perang di seluruh dunia telah membuktikan bahwa dukungan dari rakyat sangatlah penting untuk meraih kemenangan. Dalam hal ini Kelompok Separatis Bersenjata (KKB/KST/KSTP) sebagai pasukan yang tidak terorganisir dapat diindikasikan memiliki dukungan⁶ dari simpatisan sehingga memiliki motivasi yang tinggi dan semangat juang yang kuat karena mereka merasa bahwa mereka berjuang untuk kepentingan bersama dengan mengembangkan taktik perang irregular (*asymmetric warfare*). Perang Irregular⁷ memiliki karakteristik yang berbeda dengan perang konvensional, dimana tidak ada kekuatan yang jelas pada pihak lawan, biasanya terjadi di wilayah yang sulit dijangkau atau terpencil dan berjalan pada waktu yang cukup lama. Kondisi ini sebenarnya telah dilalui oleh para pejuang (TNI-Rakyat) pada masa kemerdekaan, dimana TNI dapat mengalahkan Penjajah (Belanda, Jepang, dll) karena dukungan penuh dari rakyat terhadap tujuan kemerdekaan. Begitu juga yang terjadi pada peperangan Vietnam, dimana Amerika Serikat⁸ sebagai kekuatan yang memiliki superioritas teknologi dan senjata dapat dikalahkan oleh Vietnam dengan dukungan rakyat. Dalam konteks konflik bersenjata di Papua, maka peran penting yang harus dilakukan Kodim adalah “memenangkan hati dan pikiran” rakyat Papua sehingga dibutuhkan suatu kesabaran, ketahanan serta kemampuan beradaptasi.

BAGAIMANA AGAR KODIM DAPAT BERPERAN LEBIH BESAR DALAM PEMBINAAN TERITORIAL?

Dengan mengacu pada UU TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara maka menjadi dasar hukum bagi Kodim untuk dapat leluasa melaksanakan pembinaan

³ <https://news.republika.co.id/berita/rp3l8v409/csis-ada-eskalasi-konflik-di-papua>

⁴ <https://seputarpapua.com/view/tertembak-kelompok-separatis-di-puncak-2-prajurit-tni-dievakui-ke-timika.html>

⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6183785/6-fakta-penembakan-kkb-di-nduga-papua-pendeta-ustaz-jadi-korban>

⁶ <https://portalnawacita.com/eksistensi-kelompok-separatis-didukung-para-pengkhianat-negara/>

⁷ Rich and Duyvesteyn, *Studies In Insurgency, Counterinsurgency And National Security* (Routledge:NewYork,2014)

⁸ Joes, Anthony, *Urban Guerrilla Warfare* (The University Press Of Kentucky: Kentucky,2007)

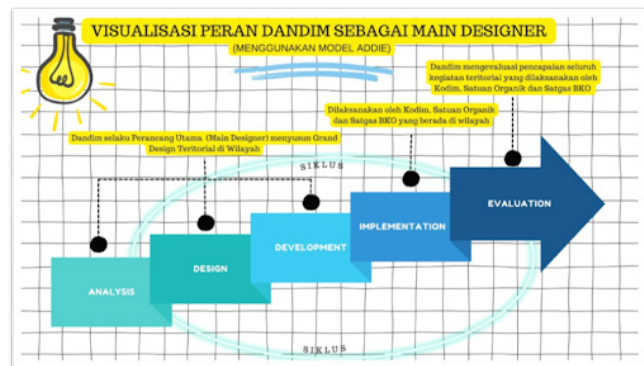
teritorial yang dijabarkan pada Doktrin Kartika Eka Paksi khususnya fungsi utama TNI AD, yaitu: Pertempuran dan Teritorial. Namun dalam mengembangkan perannya, Kodim memiliki tantangan di dalam internal berupa organisasi yang hingga saat ini belum berkembang sesuai dengan tuntutan tugas atau belum dikategorikan ideal baik secara struktur organisasi, kekuatan personel maupun kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh personel Kodim selaku aparat teritorial sehingga akan sangat sulit untuk mencapai hasil ketiga sasaran binter yang telah ditentukan RAK (Ruang, Alat, Kondisi) Juang dan melaksanakan ketiga metode binter (Bhakti TNI, Binwanwil, Komsos). Namun kondisi tersebut bukanlah menjadi hambatan jika Dandim dapat mengoptimalkan peran Satuan Penugasan BKO yang ada di wilayah tersebut untuk melaksanakan kegiatan binter sesuai *Grand Design* Dandim selaku Perancang Utama (*Main Designer*) dari kegiatan binter di wilayah untuk pencapaian hasil jangka pendek, menengah dan panjang.



Satgas BKO Apter di Koramil Persiapan Mayuberi berikan peralatan olahraga warga pedalaman Papua

Menurut Rich and Duyvesteyn⁹ “*Yet the implication that war does not require careful thinking but only bold action is obviously wrong*”, maka mewujudkan Ruang, Alat, Kondisi (RAK) Juang yang tangguh melalui metode binter (Bhakti TNI, Binwanwil, Komsos) untuk mendukung pertempuran merupakan

kegiatan yang terukur dan sangat sulit dilakukan karena pada dasarnya kegiatan tersebut memiliki karakteristik keilmuan (teoritis) khusus dan kemampuan teknis (pragmatis) yang berbeda-beda, sedangkan kondisi di intansi militer lebih cenderung bersifat pragmatis tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan semakin diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa satuan-satuan BKO menyelenggarakan kegiatan binter Satnonkowi¹⁰ sesuai keinginannya masing-masing tanpa terkoordinir oleh Kodim sebagai satuan kewilayahan yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan binter secara umum. Peran Dandim sebagai perancang utama (*main designer*) dalam mendesain kegiatan pembinaan teritorial memiliki arti penting dalam menyatukan karya atau menghubungkan semua bagian produksi kegiatan teritorial yang dilaksanakan oleh Satuan kewilayahan maupun satuan non kewilayahan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai visi keseluruhan serta menciptakan karya yang kohesif melalui pengembangan model *Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*.



Model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Avaluation*).

⁹Rich and Duyvesteyn, Op.Cit., Hlm 10

¹⁰Bujuk Induk Pembinaan Teritorial Nomor Skep/98/V/2007

BAGAIMANA MEWUJUDKAN PEMBINAAN TERITORIAL YANG KOLABORATIF BERSAMA PEMERINTAH DAERAH?

Mewujudkan pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama Pemerintah Daerah tidaklah mudah karena banyaknya hambatan yang dihadapi berupa perbedaan persepsi, regulasi, manajemen dan lainnya sehingga kegiatan binter di wilayah kerap kali berjalan masing-masing dengan hanya sebatas pencapaian jangka pendek atau bersifat formalitas tanpa adanya perencanaan yang matang, hal ini senada dengan penjelasan Pangdam I/BB Mayjen TNI A. Daniel Chardin, S.E., M. Si. kepada para Dansat Kowil pada saat Apel Dansat jajaran Kodam I/BB “tentang hakekat kegiatan binter harusnya dapat tersistem dengan baik dengan program Pemerintah Daerah sehingga hasil pencapaiannya untuk jangka panjang karenadidalamnyaterdapatperencanaan, seperti salah satu contohnya adalah TMMD. Perencanaan yang matang membantu upaya kolaboratif ke arah yang benar, menghindari hambatan dan memaksimalkan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama”. Disinilah pentingnya duduk bersama antara Kepala Daerah bersama Dandim untuk menyamakan persepsi maupun perseptif tentang binter dalam mewujudkan kegiatan yang kolaboratif sehingga hasil yang dicapai bermanfaat *physically/non-physically* ataupun *tangible/intangible*.

Dalam mewujudkan pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama pemerintah daerah, maka Dandim harus memiliki rancangan besar (*grand design*) tentang kegiatan binter di wilayahnya baik yang dilakukan oleh Kodim maupun satuan BKO mengacu pada visi holistik dan strategis yang merangkum tujuan, rencana serta langkah-langkah yang akan diambil dalam suatu proyek atau inisiatif pendekatan kesejahteraan bernilai guna.

Rancangan besar adalah sebagai bentuk proposal yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan suatu ide/gagasan tersebut memiliki nilai ataupun potensi yang bermanfaat bagi kepentingan daerah sehingga dapat menarik minat pemerintah daerah untuk menselaraskan dengan program-programnya, seperti salah satu contoh pendekatan kesejahteraan bernilai guna adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kegiatan kolaboratif ini dapat diperkuat dengan suatu regulasi atau MoU (*memorandum of understanding*) antara pemerintah daerah kabupaten dengan Kodam.



Personel Satgas BKO Yonif 125/Smb mengajar anak-anak di Sekolah.

APA BENTUK PENDEKATAN KESEJAHTERAAN BERNILAI GUNA UNTUK JANGKA PANJANG ?

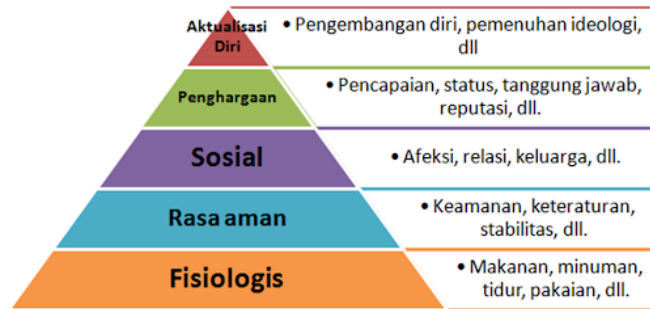
Menurut penelitian Agus Sumule¹¹ terdapat 600.000 anak Papua yang tidak bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya dan wilayah Papua mengalami kekurangan guru¹² sebanyak 20.000 orang. Data ini cukup menjadi suatu sinyal ancaman kedepannya bagi Pemerintah Indonesia karena akan terjadi siklus kemiskinan maupun ketimpangan sosial yang tinggi di wilayah Papua dan berpotensi dimanfaatkan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KKB/KST/KSTP). Kondisi ini menjadi suatu acuan bagi

¹¹ <https://papuabarat.tribunnews.com/2023/06/21/40000-an-anak-tak-sekolah-dan-kekurangan-guru-di-papua-barat-ini-saran-akademisi-unipa-ke-pemda>

¹² <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html>

Kodim untuk menitikberatkan pada segmentasi generasi muda sebagai bagian yang sangat penting dalam pendekatan kesejahteraan bernilai guna karena mereka akan menentukan masa depan Papua kedepannya, hal ini senada dengan pernyataan Nelson Mandela “perhatikan generasi muda karena merekalah calon pemimpin masa depan yang akan membentuk dunia yang lebih baik”. Namun acap kali kegiatan ini tidak menjadi prioritas karena hasilnya tidak terlihat secara cepat dibandingkan dengan pembangunan fisik, maka penting dipahami bahwa pendekatan kesejahteraan bernilai guna yang dilakukan oleh satuan kewilayahan sepatutnya diukur berdasarkan sejauh mana nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau keputusan dalam waktu jangka panjang. Kegiatan ini harusnya dapat berjalan karena satuan jajaran TNI AD pada umumnya memiliki sarana prasarana pendidikan berupa sekolah Yayasan Kartika mulai tingkat TK sampai dengan SMA yang dapat dikembangkan menjadi sekolah unggulan dan sarana olahraga di pangkalan militer (Kodim/Batalyon) sebagai pusat pengembangan atlet olahraga apabila dikolaborasikan dengan pemerintah daerah di kabupaten/kotamadya wilayah Papua.

Pendidikan bagi generasi muda Papua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan, sikap dan pemahaman terhadap berbagai isu termasuk separatisme, begitu juga dengan mendorong generasi muda Papua untuk berprestasi dalam bidang olahraga tentunya akan memberikan suatu keyakinan kepada mereka bahwa Kodim berperan besar dalam pengembangan kemajuan generasi muda Papua. Dalam hal ini, maka teori Maslow¹³ tentang hirarki kebutuhan manusia sangat relevan sekali untuk menjadi acuan, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan,



Teori Maslow

kebutuhan sosial/bergaul, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Pendekatan kesejahteraan bernilai guna saat ini menjadi pilihan utama Pemerintah dalam menghadapi gerakan separatis karena menempatkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sehingga peran Kodim dalam kegiatan pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama pemerintah daerah menjadi jawaban untuk memperlemah kekuatan kelompok separatis bersenjata dengan tujuan utama adalah untuk “merebut hati dan pikiran rakyat”. Dalam mewujudkan pembinaan teritorial yang kolaboratif ini diperlukan kemampuan Dandim selaku perancang utama dalam menyusun rancangan besar tentang kegiatan binter di wilayahnya, dimana rancangan besar tersebut adalah sebagai bentuk proposal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat diseleraskan dengan program-programnya khususnya di bidang pendidikan dengan memanfaatkan sarana prasarana berupa sekolah Yayasan Kartika mulai tingkat TK sampai dengan SMA yang dapat dikembangkan menjadi sekolah unggulan dan sarana olahraga di pangkalan militer (Kodim/Batalyon) sebagai Pusat Pengembangan Atlet Olahraga.

¹³Maslow, Motivation and Personality (Harper&Row:NewYork,1998)



Bersama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan mengedukasi para pelajar melalui metode Field Trip sebagai realisasi dari Merdeka Belajar.

Untuk mewujudkan pembinaan teritorial yang kolaboratif bersama pemerintah daerah melalui pendekatan kesejahteraan bernilai guna, maka penulis menyarankan agar mengembangkan sekolah dibawah Yayasan Kartika mulai tingkat TK sampai dengan SMA di setiap wilayah Papua menjadi sekolah unggulan dan memberikan perhatian lanjutan, berupa: Pertama. Pemberian beasiswa kepada para pelajar Orang Asli Papua (OAP) yang berprestasi; Kedua. Dandim diberikan kewenangan merekomendasikan para pelajar yang berprestasi di wilayahnya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau Pendidikan Ikatan Dinas di bawah naungan Kemhan maupun TNI.

(Esay terbaik pada pelaksanaan Apel Dansat Tersebar Kodam I/Bukit Barisan TA 2023 tentang Binter jangka panjang di Papua)

OPTIMALISASI OPERASI PENANGANAN KONFLIK DI PAPUA

GUNA MENGATASI KELOMPOK SEPARATIS TERORIS PAPUA (KSTP) BERSENJATA DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Merujuk pada berbagai sumber informasi terbuka yang ada saat ini, tercatat 247 entitas yang dapat dikategorikan sebagai organisasi atau kelompok teror oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia, kelompok teror yang ada saat ini pada umumnya berbasis agama seperti JI, JAD, MIT dan yang sedang memanas saat ini yaitu berkarakter separatis seperti Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Papua.¹ Menindaklanjuti adanya kelompok teroris di Papua, ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan menurut kerangka regulasi yang menjadi rujukan utama. Pertama, **pendekatan hukum** di mana kekerasan sebagai tindakan pidana yang diatur dalam KUHP di mana Polri diletakkan sebagai instansi penjurur. Kedua, **pendekatan militer** yang melihat ancaman teror di Papua berasal dari kelompok separatis dan dianggap dapat mengancam integritas NKRI. Oleh karenanya pemerintah menggelar Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang TNI.² Ketiga, pendekatan keamanan yaitu perpaduan antara KUHP dengan Undang-undang yang lebih spesifik terutama anti teror, teritorial, intelijen dan kepolisian. Pendekatan ini cenderung memberikan kewenangan lebih kepada aparat untuk menggelar operasi intelijen, operasi keamanan dalam negeri dan operasi teritorial.

Implementasi fungsi teritorial di daerah Papua, baik dalam bentuk operasi maupun pembinaan, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia



OLEH : MAYOR INF SUTAJI, S.SOS., M.TR.OPSLA.
(DANYONIF 100/RAIDER KODAM I/BB)

pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 April 2021 di Istana Negara, di mana Presiden menyampaikan bahwa operasi penegakan hukum dan keamanan di Papua dilakukan dengan **manajemen yang lebih terkoordinasi dan tidak perlu melibatkan terlalu banyak Satuan Tugas**, artinya supaya memaksimalkan peran Polda, Kodam dan Pemda.⁴ Dari arahan Presiden RI tersebut terdapat dua hal yang tersirat, yaitu bahwa penyelesaian permasalahan di Papua dapat dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan hukum di mana Polri berperan sebagai penjurur, serta pendekatan keamanan dengan memberikan wewenang kepada aparat untuk melaksanakan operasi yang terkoordinasi dengan baik dan diutamakan pada operasi teritorial dengan didukung oleh operasi intelijen dan operasi tempur. Menindaklanjuti hal tersebut, maka TNI

¹Tim Analis LAB 45. Tilik Data "Sekuritisasi Kelompok Teror Papua", 3 Mei 2021

²Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³Tim Analis LAB 45. Juni 2021

⁴Paparan Deputi Kemenko Polhukam pada Rakor Pelibatan TNI Pasca Penetapan Status KKB Papua menjadi Kelompok Teroris pada tanggal 10 Mei 2021.

pun mengubah konsep operasi di Papua yang sebelumnya Satgas menggelar operasi untuk menciptakan keamanan di wilayah Papua secara mobile menjadi Satgas Kodim yang melaksanakan tugas pokok Kodim dan Koramil melalui kegiatan Pembinaan Teritorial dan Komunikasi Sosial⁵ dengan tujuan mewujudkan masyarakat Papua yang aman dan sejahtera dalam bingkai NKRI dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk menetralsir kelompok teroris yang berkarakter separatis di Papua melalui optimalisasi fungsi teritorial. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa operasi teritorial yang digelar selama ini masih belum efektif dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari kelompok teroris yang berkarakter separatis termasuk gangguan keamanan terhadap masyarakat setempat.

Tantangan terbesar bagi setiap satuan dan prajurit yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua, selain kondisi medan, cuaca yang sulit dan penyakit malaria yang sudah menjadi *endemic* di Tanah Papua adalah KSTP. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, pada tahun 2021 telah terjadi aksi kekerasan dan teror KSTP di wilayah Papua sebanyak 106 kasus dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 34 orang. Selanjutnya pada kurun waktu sampai dengan bulan Desember tahun 2022, telah terjadi aksi KSTP sebanyak 90 kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia sejumlah 53 orang dan korban luka sebanyak 27 orang⁶. Sedangkan pada Tahun 2023 ini juga masih terjadi aksi-aksi KSTP mulai dari aksi kerusakan di Wamena pada 23 Februari 2023, aksi penculikan terhadap pilot Susi Air, Philip Mark Mehrstens, aksi penyerangan KSTP ke Pos Satgas Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada tanggal 3 April 2023 yang mengakibatkan 1 personel TNI AD

gugur⁷ serta kotak tembak dengan Tim Gabungan Satgas Yonif R 321/GT dan Prajurit Kopassus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 yang mengakibatkan 4 personel TNI AD gugur.

Melihat eskalasi ancaman yang semakin meningkat, diperlukan adanya suatu pola operasi pertempuran yang adaptif dan berdimensi keamanan oleh Satgas dalam mengatasi masalah Papua. Apalagi fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa KSTP memiliki tambahan persenjataan, baik yang berasal dari rampasan maupun upaya KSTP itu sendiri, berupa senjata sniper, drone, teleskop thermal dan HP Satelit.⁸ Adaptasi KSTP terhadap perkembangan teknologi dalam melakukan serangan ini membuat serangan-serangan mereka kepada satgas TNI menjadi semakin efektif yang dibuktikan dengan beberapa korban yang dialami oleh TNI akibat serangan-serangan tersebut. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pemenuhan perlengkapan militer yang sama untuk menghadapinya seperti yang diungkapkan dalam Rapat Evaluasi Satgas Operasi Dalam Negeri bahwa keterbatasan dukungan alat pengintai (drone), NVG dan Thermal untuk pergerakan pada malam hari menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasi.⁹

Berdasarkan uraian tentang latar belakang dan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa satuan-satuan yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua belum sepenuhnya dapat mengatasi dan menetralsir KSTP di Papua, sehingga dengan besarnya harapan untuk meminimalisir jatuhnya kembali korban dari pihak TNI dihadapkan dengan keterbatasan yang dimiliki, maka penulis mencoba mencari penyebab timbulnya permasalahan yang terjadi dan bermuara pada dua permasalahan yang perlu diidentifikasi untuk ditemukan

⁵TR Panglima TNI No TR/1164/2021 tanggal 27 November 2021 tentang reorganisasi Satgas Pamtas Mobile menjadi Satgas Kodim.

⁶<https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-kekerasan-di-papua-turun-namun-korban-meningkat/6980721.html>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 15:10 Wib.

⁷<https://www.jawapos.com/hasional/01566071/daftar-4-prajurit-tni-yang-tewas-diserang-kkb>, diakses pada 6 Mei 2023 pukul 14:00 Wib

⁸Paparan Perkembangan Situasi Wilayah Kodam XVII/Cen, Februari 2023

⁹Rapat Purna Tugas Satgas Ops DN TA. 2021.

solusinya, yaitu: 1. Belum optimalnya kemampuan dan kekuatan tempur satuan-satuan jajaran TNI AD dalam rangka melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua; dan 2. Belum optimalnya penerapan pola operasi yang adaptif dalam rangka mengatasi KSTP di Papua. Dari kedua permasalahan tersebut maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu "Bagaimana optimalisasi operasi penanganan konflik di Papua guna mengatasi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) dalam rangka menjaga keutuhan NKRI?" Selanjutnya Penulis mencoba menganalisa dari berbagai sudut pandang untuk menjawab persoalan tersebut sehingga satuan Infanteri memiliki kemampuan tempur yang optimal untuk meminimalisir timbulnya kerugian personel dan materiil selama pelaksanaan tugas operasi di Papua. Merujuk dari penjelasan tentang identifikasi masalah serta rumusan masalah di atas, maka **pentingnya** pembuatan tulisan ini adalah untuk merumuskan strategi dan konsep operasi yang tepat guna mengatasi KSTP di Papua dengan mengoptimalkan peran dan kemampuan Satuan Infanteri yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua. Adapun **metode penulisan** yang digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif di mana penulis berusaha untuk menguraikan berbagai permasalahan dan kemungkinan solusi yang ditawarkan melalui pengamatan langsung di lapangan dan studi kepustakaan dengan melihat berbagai data sekunder seperti media cetak, media elektronik, jurnal dan berbagai buku referensi yang berkaitan dengan topik dalam tulisan ini.

Nilai guna dalam penulisan penulisan essay ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi satuan-satuan yang saat ini disiapkan dan yang telah diberangkatkan tugas operasi di wilayah Papua dan berbagai permasalahan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti sehingga

pelaksanaan tugas operasi di Papua dapat lebih optimal. Adapun **maksud** dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi operasi penanganan konflik di Papua melalui penyiapan satuan-satuan yang terlibat dalam tugas operasi ke wilayah Papua dan perumusan strategi dan konsep operasi yang tepat guna mengatasi KSTP di Papua. Sedangkan tulisan ini **bertujuan** untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut di bidang operasi khususnya operasi mengatasi KSTP di Papua melalui penerapan konsep operasi yang tepat dengan melibatkan satuan-satuan yang disiapkan secara optimal. **Ruang Lingkup** tulisan ini mencakup pendahuluan, pembahasan dan penutup serta penulisan ini dibatasi pada penyiapan satuan-satuan yang terlibat dalam tugas operasi ke wilayah Papua dan perumusan strategi dan konsep operasi yang tepat guna mengatasi KSTP di Papua.

Berdasarkan uraian pendahuluan tentang latar belakang serta persoalan yang ada, maka penulis mencoba menguraikan persoalan-persoalan tersebut dengan menggunakan data dan fakta, harapan/keinginan yang ideal berdasarkan aturan, analisa, kendala kelemahan serta upaya mengatasi dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan. Sebagaimana penulis sudah sampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan operasi penanganan konflik di Papua belum sepenuhnya optimal dilaksanakan guna mengatasi KSTP di Papua dihadapkan dengan sudah banyaknya personel dan satuan TNI yang telah dikerahkan untuk melaksanakan tugas operasi di Papua. Adapun permasalahan pelaksanaan operasi penanganan konflik di Papua yang belum optimal yaitu dikarenakan belum optimalnya kemampuan dan kekuatan tempur satuan-satuan jajaran TNI AD dalam rangka melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua dan belum optimalnya penerapan pola operasi yang adaptif dalam rangka mengatasi KSTP di Papua.

OPTIMALISASI KEMAMPUAN DAN KEKUATAN TEMPUR SATUAN TNI AD: PENYIAPAN KEMAMPUAN DAN KEKUATAN TEMPUR SATUAN TNI AD.

Dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua, sejauh ini TNI telah menggelar operasi di wilayah Papua dan Papua Barat. Sejumlah Satuan Infanteri dan ribuan Personel TNI telah bertugas di wilayah Papua. Berdasarkan data Mabes TNI Tahun 2023, saat ini telah tergelar sebanyak 18 Satgas yang

sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua dan melibatkan personel sebanyak 7.552 orang.¹⁰

Diharapkan dengan adanya Satgas dan Personel TNI yang telah tergelar saat ini, keutuhan NKRI dan stabilitas keamanan di wilayah Papua dapat



Gambar 1. Gelar Kekuatan Satgas TNI di Papua Tahun 2023
Sumber: Paparan Asops Kasad pada Apel Dansat TNI AD TA 2023

terjamin. Namun dalam kenyataannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini dapat terlihat dari data dan fakta terkait aksi-aksi KSTP yang menyebabkan kerugian personel baik masyarakat sipil, TNI dan Polri yang telah terjadi dalam kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2023 yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan data dan fakta tersebut, dimana banyaknya korban dari pihak TNI yang luka maupun meninggal

dunia akibat aksi serangan KSTP di Pos-Pos Satgas TNI maupun pada saat patroli, menunjukkan bahwa kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua guna mengatasi KSTP belum optimal.

Kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI yang belum optimal tersebut tentunya dipengaruhi beberapa faktor baik pada saat penyiapan satuan sebelum berangkat tugas operasi maupun pada saat setelah berada di daerah operasi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Angkatan Darat, bahwa satuan-satuan tempur dan banpur yang akan melaksanakan tugas operasi telah ditetapkan. Bagi Satuan yang akan melaksanakan tugas operasi maka akan melaksanakan tahapan penyiapan tugas operasi mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Terkait dengan penyiapan materi latihan bagi satuan yang akan melaksanakan tugas operasi, maka akan melaksanakan Program Latihan Standarisasi Siap Operasi (Proglatsiapops). Pada tahun 2021 s.d. 2022, satuan yang akan melaksanakan tugas operasi ke wilayah Papua melaksanakan Proglatsiapops mulai dari latihan tingkat perorangan, latihan taktis tingkat Tim, Latihan Taktis Tingkat Kompi, Latihan Penyiapan Pratugas dan Latihan Pratugas. Adapun materi yang dilatihkan adalah dominan materi teritorial. Kondisi ini sejalan dengan pola operasi yang saat itu diterapkan di wilayah Papua yaitu Pola Operasi dengan pendekatan Teritorial. Adapun satuan dan personel yang berangkat tugas operasi ke wilayah Papua pada periode tersebut adalah menggunakan nomenklatur Satuan Tugas Organik (Satgas Organik) yang melaksanakan tugas-tugas Kodim dan Koramil di wilayah Papua. Melalui pola operasi yang lebih mengutamakan pendekatan teritorial tersebut, diharapkan penanganan KSTP

¹⁰Paparan Asops Kasad pada Apel Dansat TNI AD TA 2023

di wilayah Papua dapat berhasil dan KSTP dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun dalam kenyataannya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Justru dengan pola operasi yang dilaksanakan pada saat itu, membuat KSTP semakin brutal dan semakin kuat dengan persenjataan yang dimiliki baik dari hasil rampasan TNI maupun dukungan dari negara lain. Situasi inilah yang akhirnya menyebabkan Satgas TNI yang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua seolah-olah kehilangan kemampuan dan kekuatan tempur menghadapi KSTP dampak dari materi latihan yang telah dilatihkan pada saat penyiapan satuan sebelum berangkat tugas dan pola operasi yang dilaksanakan kurang bisa menjawab tuntutan tugas dan perkembangan situasi.

Setelah satuan berada di daerah operasi, maka satuan tersebut akan disebar ke beberapa Pos Satgas sesuai dengan pembagian sektor yang telah ditentukan oleh Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) yang merupakan Korem-Korem di wilayah Papua dimana operasi tersebut dilaksanakan. Dengan semakin kuat dan pengaruhnya KSTP di daerah operasi, ternyata KSTP melaksanakan aksinya tidak hanya di perkampungan atau tempat dimana TNI tidak berada, namun KSTP justru berani melaksanakan aksinya dengan menyerang Pos-Pos Satgas TNI di Papua. Dalam kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2023 telah terjadi beberapa kali serangan yang dilakukan KSTP ke Pos-Pos Satgas TNI di Papua. Dari kejadian penyerangan KSTP ke Pos-Pos Satgas TNI yang mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia personel TNI, seolah-oleh menunjukkan kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI dalam bertahan di Pos-Pos TNI lemah.

Selain kekuatan dan militansi dari KSTP, tantangan yang dihadapi oleh prajurit dan Satgas TNI di Papua adalah kondisi medan dan cuaca yang ekstrim. Prajurit

dan Satuan yang akan melaksanakan tugas operasi ke wilayah Papua harus memiliki militansi, naluri tempur, moril dan kemampuan fisik yang tangguh dan prima serta memiliki mindset bahwa tugas operasi adalah suatu kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga prajurit akan melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi dan tidak melakukan tugas-tugas di luar tugas pokok. Dalam melaksanakan misinya, KSTP menggunakan hutan sebagai tempat untuk bersembunyi dan merencanakan aksinya. Kondisi hutan, medan dan cuaca di Papua sangat ekstrim dan sulit untuk ditaklukkan. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan militansi, naluri tempur, moril dan kemampuan fisik yang tangguh dan prima. Namun pada periode tahun 2020 s.d. 2022, kondisi fisik prajurit dan satuan TNI yang berpengaruh terhadap tingkat militansi, naluri tempur dan moril prajurit yang melaksanakan tugas operasi di Papua mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan pemberlakuan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat yang tertuang dalam ST Kasad No ST/1661/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang penekanan pencegahan terjadinya korban personel pada pelaksanaan tes kesemaptan jasmani. Dimana berdasarkan ST Kasad tersebut, ketentuan batas nilai minimal kesemaptan jasmani bagi prajurit di satuan tempur dan banpur adalah minimal 51. Dengan ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung menyebabkan prajurit dan satuan yang melaksanakan tugas operasi ke Papua memiliki tingkat kemampuan fisik yang kurang dan berdampak terhadap tingkat militansi, naluri tempur dan moril prajurit. Selain itu tingkat militansi, naluri tempur dan moril prajurit dan satuan yang melaksanakan tugas operasi juga dipengaruhi oleh latihan-latihan yang telah dilaksanakan sebelum berangkat tugas operasi. Dengan materi latihan yang lebih mengutamakan

materi teritorial dan intelijen pada saat melaksanakan Proglatsiapops, tentunya akan mengurangi tingkat militansi dan naluri tempur prajurit dalam menghadapi KSTP di Papua. Selain itu militansi, naluri tempur dan moril prajurit juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang diterima prajurit selama melaksanakan tugas operasi di Papua relatif rendah jika dibandingkan dengan hak-hak dan kesejahteraan yang diterima oleh Satuan dari Kepolisian yang melaksanakan tugas operasi di Papua, sehingga mengakibatkan prajurit berusaha mencari usaha sampingan dengan melakukan pengamanan-pengamanan ilegal, illegal logging dan kegiatan lainnya untuk menambah moril prajurit meskipun hal tersebut tidak dibenarkan.

Bagi setiap prajurit dan satuan yang akan berangkat tugas operasi ke wilayah Papua tentunya akan dilengkapi dengan Alkap perorangan dan satuan yang mumpuni dan mendukung pelaksanaan tugas operasi. Berdasarkan Perpang TNI No 40 Tahun 2014 tentang dukungan bekal umum operasi dan penugasan di lingkungan TNI sampai dengan Perubahan Kedua atas Perpang TNI No 40 Tahun 2014 yang tertuang dalam STR Panglima No STR/55/2023 tanggal 17 Januari 2023, ternyata belum sepenuhnya dapat menjawab tuntutan tugas satuan yang melaksanakan tugas operasi. Mengingat kondisi medan yang ekstrem di Papua, tentunya Satgas TNI memerlukan teknologi untuk membantu Satgas dalam melaksanakan pengintaian udara berupa drone. Bagi satuan yang saat ini sedang melaksanakan tugas operasi di Papua, drone menjadi perlengkapan modern yang mutlak dimiliki oleh pasukan di lapangan untuk mengoptimalkan kemampuan intelijen selama pelaksanaan operasi tempur. Fungsi drone di Papua saat ini sebatas hanya menjalankan fungsi surveillance atau pengintaian terhadap kemungkinan lawan yang dihadapi. Namun sayangnya sampai dengan saat

ini dukungan drone bagi setiap satuan yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua belum menjadi alkap satuan yang menjadi dukungan dari Komando Atas. Selain itu, kondisi yang seolah-olah menyebabkan kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI dalam mengatasi KSTP di Papua kurang optimal adalah adanya perintah dari Komando Atas kepada setiap satuan yang melaksanakan tugas operasi ke wilayah Papua untuk tidak membawa Mortir dengan alasan pertimbangan keamanan dan untuk menghindari pelanggaran HAM. Tentunya kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI di Papua.

Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, maka dapat dianalisa beberapa penyebab kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di Papua belum optimal yaitu: 1) Program Latihan Standarisasi (Proglatsi) yang dilaksanakan Satuan TNI yang standby di homebase dan yang akan berangkat tugas operasi belum menjawab tuntutan tugas. 2) Sistem Pengamanan Posko Satgas TNI masih lemah dan kurang efektif. 3) Kondisi militansi, naluri tempur, moril, mindset dan kemampuan fisik prajurit yang melaksanakan tugas operasi belum optimal. 4) Dukungan Alkap perorangan dan satuan belum optimal.

Setelah penulis menganalisa tentang persoalan penyebab kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di Papua belum optimal, maka dapat ditentukan **kendala serta kelemahan yang ada** dalam memecahkan setiap persoalan tersebut. Adapun **kendala** yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di Papua yaitu; 1) Proglatsi bagi satuan yang standby di homebase, latihan hanya dilaksanakan sampai dengan tingkat regu. 2) Belum dilengkapinya

Satgas TNI yang melaksanakan tugas operasi di Papua dengan Teknologi Surveillance Post System. 3) Hak-hak dan kesejahteraan Prajurit TNI relatif rendah jika dibandingkan dengan personel kepolisian yang tugas operasi di Papua. 4) ST Kasad tentang batas minimum nilai kesemaptaan jasmani pada tahun 2020 s.d. 2022 yang mengakibatkan kemampuan fisik prajurit menurun. 5) Drone belum menjadi DSPP Satgas yang akan berangkat tugas operasi ke Papua. 6) Kebijakan Pimpinan TNI terkait dengan larangan membawa dan menggunakan mortir ke daerah operasi di Papua. Adapun **kelemahan** yang ada antara lain: 1) Dalam pelaksanaan latihan dengan metode drill taktis, drill tempur dan gladi lapangan baik bagi satuan yang standby di homebase dan akan berangkat tugas operasi masih bersifat satu pihak dikendalikan. 2) Belum diadakannya Teknologi Surveillance Post System untuk membantu sistem pengamanan Pos Satgas TNI di Papua baik oleh Mabesad maupun Mabes TNI. 3) Hak-hak dan kesejahteraan prajurit TNI yang melaksanakan tugas operasi di Papua sudah diatur dalam Perpres. 4) Prajurit kurang termotivasi dengan batas minimal nilai kesemaptaan jasmani 51. 5) Pengadaan Drone dibebankan kepada satuan yang akan berangkat tugas operasi. 6) Pelanggaran HAM apabila terdapat kesalahan sasaran dalam penggunaan mortir.

Dengan kendala dan kelemahan di atas maka penulis akan menyajikan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dan kelemahan tersebut. Sebelum menguraikan tentang upaya mengatasi, maka untuk memperkuat upaya mengatasi dapat melihat adanya **peluang** maupun kekuatan. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh satuan-satuan yang akan dan sedang melaksanakan tugas operasi di Papua adalah sebagai berikut: 1) Bagi satuan yang standby di homebase memanfaatkan proglatsi yang telah diprogramkan dengan baik dan ditambah dengan melaksanakan

Latihan Dalam Satuan (LDS) dengan materi-materi yang dapat meningkatkan militansi, disiplin tempur, naluri tempur, mahir navigasi dan manuver, mahir menembak, mahir gerakan perorangan, mahir beladiri dan fisik yang prima. 2) Keberadaan Universitas atau Praktisi IT yang dapat diajak kerja sama untuk menciptakan Teknologi Surveillance Post System untuk membantu sistem pengamanan Pos Satgas TNI di Papua. 3) Skill dan keterampilan Prajurit untuk bercocok tanam di daerah operasi untuk membantu memenuhi kebutuhan logistik sendiri dan membantu masyarakat, sehingga dapat meningkatkan moril prajurit. 4) Adanya ralat ST terkait dengan pemberlakuan batas minimum nilai kesemaptaan jasmani Prajurit Kopassus, Kostrad dan Raider semula 51 menjadi 71 melalui ST Kasad No ST/3309/2022 tanggal 16 Desember 2022. 5) Satuan Infanteri swadaya pengadaan drone. 6) Perubahan Pola operasi dari yang sebelumnya dominan melaksanakan pendekatan persuasif dan teritorial menjadi dominan melaksanakan tugas tempur untuk mencari, mendekati dan menghancurkan. Sedangkan **kekuatan** yang dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaan latihan dengan metode drill taktis, drill tempur dan gladi lapangan baik bagi satuan yang standby di homebase dan akan berangkat tugas operasi dapat dilatihkan dengan **sifat dua pihak dikendalikan atau dua pihak tidak dikendalikan** untuk menimbulkan realisme latihan dan meningkatkan militansi dan naluri tempur prajurit. 2) Satuan Infanteri dapat menginisiasi pembuatan Teknologi Surveillance Post System. 3) Beban tugas operasi di Papua yang berat dan resiko kematian yang sangat tinggi untuk dijadikan pertimbangan peningkatan hak-hak dan kesejahteraan yang diterima Prajurit TNI yang sedang tugas operasi di Papua. 4) Adanya program-program pembinaan jasmani yang dimiliki satuan untuk meningkatkan kemampuan fisik prajurit seperti Senam Sparko, lari barbel dan

program lari dan program lainnya. 5) Melaksanakan pengadaan Drone secara swadaya satuan. 6) Satuan-satuan Infanteri memiliki Mortir dan prajurit yang terlatih untuk mengoperasikan Mortir.

Dengan melihat peluang dan kekuatan tersebut, maka **upaya untuk mengatasi kendala dan peluang** dalam peningkatan kemampuan dan kekuatan tempur Satgas TNI di wilayah Papua yang kurang optimal antara lain: 1) Melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS) dengan materi-materi yang dapat meningkatkan militansi, disiplin tempur, naluri tempur, mahir navigasi dan manuver, mahir menembak, mahir gerakan perorangan, mahir beladiri dan fisik yang prima serta pada latihan dengan metode drill taktis, drill tempur dan gladi lapangan baik bagi satuan yang standby di homebase dan akan berangkat tugas operasi dilatihkan dengan **sifat dua pihak dikendalikan atau dua pihak tidak dikendalikan** untuk menimbulkan realisme latihan dan meningkatkan militansi dan naluri tempur prajurit. 2) Satuan bekerjasama dengan Universitas atau Praktisi IT untuk menciptakan Teknologi Surveillance Post System untuk membantu sistem pengamanan Pos Satgas TNI di Papua. 3) Membekali prajurit dengan pengetahuan dan keterampilan Prajurit untuk bercocok tanam di daerah operasi untuk membantu memenuhi kebutuhan logistik sendiri dan membantu masyarakat, sehingga dapat meningkatkan moril prajurit. 4) Melaksanakan Pembinaan Jasmani secara rutin dan benar dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di satuan seperti seperti Senam Sparko, lari barbel dan program lari dan program lainnya dengan target nilai batas minimal kesempataan jasmani adalah 71. 5) Satuan Infanteri swadaya pengadaan drone. 6) Melatih prajurit untuk menggunakan dan menembak mortir pada malam hari dikombinasikan dengan penggunaan drone.

PENERAPAN POLA OPERASI YANG ADAPTIF: PERPADUAN HARD POWER DAN SOFT POWER.

Kehadiran TNI, khususnya Satuan Infanteri di wilayah Papua, harus bisa memberikan keamanan bagi warga masyarakat setempat terhadap berbagai ancaman gangguan keamanan dari pihak KSTP di Papua, seperti kontak tembak, pembakaran fasilitas umum, ancaman teror kepada masyarakat, penyerangan ke Pos-Pos TNI dan kegiatan lainnya yang mengganggu stabilitas keamanan serta menimbulkan kerugian personel dan materiil, baik di pihak TNI maupun masyarakat. Hingga saat ini terdapat 6 jenis Satgas yang telah digelar di wilayah Papua dengan masing-masing tugas pokok yang berbeda, di antaranya Satgas Pamtas RI-PNG Statis, **Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan**, **Satgas Pamtas RI-PNG Mobile**, **Satgas Pengamanan Obyek Vital Nasional** dan **Satgas Damai Cartenz (BKO Polri)**.

Pelaksanaan tugas operasi di wilayah Papua memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan gelar penugasan di beberapa wilayah Indonesia sebelumnya. Meskipun sudah berlangsung selama beberapa dekade, namun keinginan bertempur lawan masih tetap hidup bahkan semakin *massive* yang ditandai dengan munculnya beberapa fenomena baru KSTP di Papua seperti ketersediaan senjata dan alkap tambahan yang canggih hasil dari rampasan TNI yang menjadi korban mereka, berani melakukan penghadangan kendaraan TNI-Polri, melakukan penyerangan ke Pos-Pos TNI dan munculnya tokoh-tokoh KSTP baru yang berusia muda namun cenderung lebih agresif dibandingkan tokoh-tokoh tua dalam melaksanakan aksinya. KSTP di Papua tidak bisa disamakan dengan Insurjen bersenjata lainnya, apalagi disamakan dengan Insurjen yang dihadapi oleh tentara AS di Irak, sehingga pola operasi yang digelar pun perlu disesuaikan dengan lawan yang

dihadapi.¹¹

Konsep operasi yang digelar di Papua saat ini mengedepankan tiga operasi utama, yaitu **operasi intelijen**,

Tabel 1. Perbandingan Insurjen Bersenjata yang di hadapi TNI dan Tentara AS di Irak

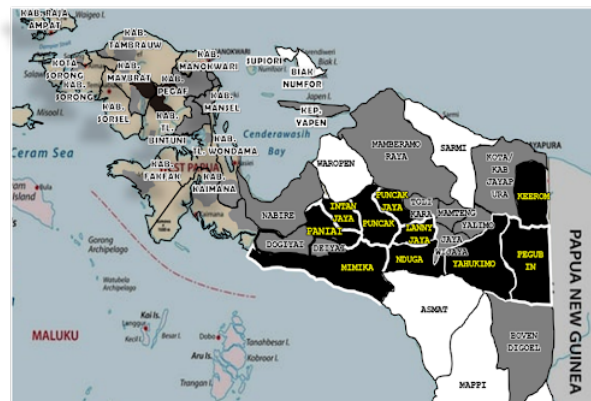
KETERANGAN	INSURJEN	
	IRAK	INDONESIA
Anatomi	Bekas Tentara	Kelompok Bersenjata
Persenjataan	Standar Militer	Campuran
Modus Operasi	Serangan dan bom bunuh diri serta berbagai bentuk/jenis pemboman lainnya	Penghadangan, serangan terhadap Pos TNI-Polri dan penduduk sipil
Karakter	Fanatik, Agresif, Militan	Timbul tenggelam
Organisasi	Solid dan terstruktur	Amatir
Medan Operasi	Perkotaan dan padang pasir (terbuka)	Pedesaan dan hutan gunung (tertutup)
Lokasi	Di lingkungan penduduk WN non AS	Di lingkungan penduduk WNI

Sumber: Buku OLI Bukan Hanya Operasi Militer, J. Suryo Prabowo, 2013

operasi tempur dan operasi teritorial.¹²

Kegiatan di bidang intelijen difokuskan pada kegiatan pengumpulan data dan keterangan tentang KSTP di Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung, melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap aktivitas lawan dan pengamanan berita atau informasi. Dalam operasi tempur kegiatan yang dilaksanakan yaitu patroli dan ambush dengan tujuan agar KSTP keluar dari daerah pertahanannya dan menyerahkan diri ke NKRI. Sedangkan di bidang teritorial kegiatan yang dilaksanakan yaitu membantu kesulitan masyarakat di Papua, terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Namun berdasarkan laporan evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh Staf Operasi Mabes TNI, pelaksanaan tugas operasi di Papua dinilai masih belum optimal dikarenakan masih adanya kerugian personel dan materiil selama pelaksanaan tugas tersebut. Penerapan kemampuan tempur, manuver dan tembakan, khusus dalam menetralsir KSTP di wilayah Papua dijabarkan dalam bentuk operasi tempur yang adaptif, di mana operasi ini mampu digelar secara berimbang dengan kedua operasi lainnya, yaitu operasi intelijen dan operasi

teritorial. Bagaimanakah operasi tempur yang adaptif dalam rangka mengatasi KSTP di Papua? Langkah pertama adalah menentukan klasifikasi daerah operasi di wilayah Papua. Pengklasifikasian daerah dapat dilakukan dengan membagi daerah operasi menjadi 3 kategori yaitu daerah hitam, daerah kelabu dan daerah putih.



Gambar 2. Klasifikasi Daerah Operasi di Papua
Sumber: Paparan Asops Kasad pada Apel Dansat TNI AD TA 2023

Daerah hitam merupakan daerah dengan kategori daerah rawan dimana daerah tersebut berada di bawah pengaruh KSTP sepenuhnya dan digunakan sebagai basis operasi serta melakukan aksi-aksinya. Konsep operasi yang dilaksanakan di daerah hitam ini adalah dominan operasi tempur untuk mengatasi KSTP. Adapun pasukan dan satuan yang dikerahkan dalam rangka mengatasi KSTP di daerah hitam ini adalah pasukan yang memiliki kualifikasi khusus dan berasal dari Satuan Kopassus, Kostrad dan Yonif Raider PMK. Selanjutnya adalah klasifikasi **daerah kelabu** yaitu daerah dimana berada dalam pengaruh TNI dan KSTP sama kuatnya. Konsep operasi yang dilaksanakan di daerah kelabu ini adalah operasi tempur didukung operasi intelijen dan operasi teritorial. Operasi di daerah ini adalah ditujukan untuk mengatasi KSTP

¹¹Buku OLI Bukan Hanya Operasi Militer, J. Suryo Prabowo, Jakarta 2013.

¹²Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI tentang Operasi Mengatasi Pemberontakan Bersenjata.

untuk selanjutnya menjadikan daerah kelabu ini menjadi **daerah putih**. Adapun pasukan dan satuan yang dikerahkan dalam rangka mengatasi KSTP di daerah kelabu ini adalah pasukan dari Satuan Yonif Raider. Berikutnya adalah klasifikasi daerah putih yaitu daerah operasi dimana daerah tersebut sepenuhnya berada di bawah pengaruh pasukan TNI. Konsep operasi yang dilaksanakan di daerah putih ini adalah dominan operasi teritorial didukung operasi intelijen dan operasi tempur. Operasi di daerah ini adalah ditujukan untuk menjadikan dan mempertahankan daerah tersebut benar-benar berada dibawah pengaruh dan binaan pasukan TNI serta mencegah masuknya pengaruh dari kelompok KSTP. Adapun pasukan dan satuan yang dikerahkan dalam melaksanakan operasi di daerah kelabu ini adalah pasukan dari Satuan Non Yonif Raider.

Selain itu, operasi tempur yang adaptif diharapkan mampu digelar dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi yang ada untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas operasi di wilayah Papua. Operasi ini digelar dengan menggunakan dua metode, yaitu metode **Hard Power** dan metode **Soft Power**. Metode **Hard Power** dilakukan dalam rangka membantu Polri dalam melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum di seluruh wilayah Papua, dilaksanakan secara persuasif, menggunakan pendekatan intelijen dan penggalangan, memberikan status DPO kepada KSTP yang melakukan tindak kekerasan, melaksanakan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terdampak kekerasan KSTP dan meningkatkan sinergitas dengan Polri dan Pemda setempat dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua. Sedangkan metode **Soft Power** dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan teritorial secara persuasif, kekeluargaan dan humanis melalui pendekatan agama, sosial ekonomi, budaya dan pelestarian alam Papua.

Kedua metode tersebut diterapkan oleh Satuan-Satuan Infanteri yang tergabung dalam beberapa Satgas di Papua, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan dalam hal keamanan. Satgas tersebut di antaranya adalah **Satgas Pemburu atau Mobile, Satgas Pengamanan, Satgas Bantuan dan Satgas Teritorial**. Pertama, **Satgas Pemburu atau Mobile** memiliki tugas 1) mencari posisi KST; 2) mengisolasi KST ketika sudah ditemukan dan 3) menghancurkan KST bersenjata, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kekuatan pasukan yang dikerahkan untuk Satgas pemburu ini tidak dalam jumlah besar, melainkan disesuaikan dengan 1) kekuatan insurjen; 2) karakter, agresivitas dan mobilitas insurjen; 3) kualitas persenjataan dan teknologi militer yang dibekalkan; 4) spesifikasi/kualifikasi pasukan yang ditugaskan; 5) karakteristik daerah operasi; dan dukungan transportasi militer yang tersedia. Kedua, **Satgas Pengamanan** memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terhadap beberapa tempat, yaitu 1) pemukiman penduduk yang berada di daerah rawan terhadap gangguan KSTP termasuk pemukiman penduduk yang merupakan daerah kelahiran KSTP; 2) instalasi vital bandara, pelabuhan dan mengamankan rute utama menuju daerah tersebut; 3) menduduki titik-titik ketinggian untuk mengamankan rute penerbangan dan ancaman penembakan dari KSTP; dan 4) mengamankan perbatasan darat dengan negara Papua Nugini. Ketiga, **Satgas Dukungan** memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dari Satgas Pemburu dan Satgas Pengamanan yaitu 1) mendukung tersedianya data intelijen melalui operasi intelijen dan tugas-tugas intelijen lainnya 2) mendukung tersedianya kebutuhan logistik, baik transportasi maupun bekal ulang 3) mendukung evakuasi dan kesehatan termasuk bekal ulang persediaan obat-obatan bagi Satgas Pemburu maupun Satgas Pengamanan. Keempat, **Satgas Teritorial**

yang merupakan Satuan Infanteri organik Kodam XVII/Cen maupun Satuan Non Yonif Raider dan bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya masing-masing serta berkolaborasi dengan Kementerian terkait untuk mengatasi persoalan agama, sosial ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pelestarian alam Papua.

Tabel 2. Konsep dan Metode Operasi di wilayah Papua

SATGAS	KOMPOSISI PASUKAN	TUGAS	METODE
Pemburu atau Mobile	Kopassus, Kostrad dan Yonif Raider PMK	Mencari posisi KSTP, mengisolasi KSTP dan menghancurkan KSTP sesuai dengan prosedur hukum	Hard Power
Pengamanan	Yonif Raider	Amankan pemukiman penduduk di daerah rawan, amankan obvit dan perbatasan darat dengan PNG	Hard Power dan Soft Power
Dukungan	Kodama tau Balakpus TNI AD	Berikan dukungan intelijen dan dukungan lainnya sesuai fungsi	Soft Power
Teritorial	Kodam, Yonif NonRaider, Balakpus TNI AD atau Kementerian terkait	Melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya berkolaborasi dengan ementerian terkait	Soft Power

Sumber: Essay Konsep Aktualisasi Satuan Infanteri Modern Dalam Operasi Tempur yang Adaptif, Kunto Adi Setiawan, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa operasi tempur yang diselenggarakan di Papua memiliki keterkaitan antara Satgas yang satu dengan Satgas lainnya, sehingga operasi yang digelar tidak dapat berdirisendiri. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas operasi tersebut, juga dipengaruhi oleh sarana pendukungnya terutama modernisasi dari alat perlengkapan yang digunakan. Interoperabilitas antar perangkat mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas operasi di masa mendatang, terutama dalam rangka menetralsir KSTP di Papua.

Berbicara tentang organisasi, maka hal tersebut tidak terlepas dari penyusunan dan komposisi pasukan ke dalam Satgas dengan struktur komando yang proporsional, relevan dengan tugas yang akan diemban.¹³ Sesuai dengan RMA yang sudah dibahas sebelumnya, maka penguatan organisasi difokuskan pada

unit kecil, di mana dengan penguatan pada unit kecil ini akan membentuk Satgas yang mumpuni, efektif dan efisien. Definisi unit kecil dalam hal ini adalah satuan setingkat regu atau diperkuat yang disesuaikan dengan skala ancaman yang akan dihadapi di daerah operasi. Diharapkan dengan kekuatan tersebut Satuan Infanteri yang sedang bertugas di Papua memiliki mobilitas dan kualitas tempur yang tinggi dalam taktik gerilya dan Operasi Lawan Insurgensi (OLI). Gangguan yang kerap dijumpai Satgas di Papua di antaranya penghadangan, pertempuran perjumpaan dan menghadapi gangguan tembakan. Tindakan yang tepat untuk mengatasi gangguan tersebut adalah unit yang bersifat responsif, fleksibel dan memiliki daya tembak yang cukup deteren.¹⁴ *Among several considerations influenced the new organization's design, the most important was the need for improved mobility and increased flexibility.*¹⁵ Ini berarti bahwa mobilitas yang semakin membaik dan fleksibilitas yang meningkat menjadi beberapa pertimbangan penting yang memengaruhi desain organisasi yang baru. Oleh karenanya khusus untuk Satgas Pemburu dan Satgas Pengamanan hendaknya dibentuk oleh personel-personel yang memiliki keunggulan dibandingkan prajurit lain pada umumnya, baik fisik, motivasi bertempur, kemampuan tempur atau spesialisasi dan kelebihan lainnya, serta ditunjang oleh alat perlengkapan pendukung yang canggih dan modern.

Secara umum untuk membangun *unit readiness* atau kesiapan satuan difokuskan pada tiga aspek yaitu *organizing, training, dan equipping*.¹⁶ Dalam penyusunan organisasi Satgas, faktor manusia atau personel merupakan suatu hal yang sangat vital. Sebab sehebat apapun teknologi persenjataan maupun teknologi pendukung pertempuran yang dimiliki tidak akan berarti apa-apa apabila

¹³Rapat Purna Tugas Operasi Dalam Negeri Tahun 2021.

¹⁴Resume Evaluasi Satgas Operasi Dalam Negeri Tahun 2021.

¹⁵CSI, 1999, *Sixty Years of Reorganizing for Combat: A Historical Trend Analysis*, CSI Report No 14, Fort Leavenworth, Kansas: CSI, halaman 4.

¹⁶U.S. Department of the Army, 2016, *Leaders' Guide for Building Personal Readiness and Resilience*, U.S. Department of the Army

motivasi bertempur maupun keterampilan personel dalam memanfaatkan teknologi tersebut tidak ada. Teknologi memang tidak mempengaruhi *Nature of War* seperti yang dikatakan oleh Murray and Knox dalam bukunya *The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050*, namun sangat berpengaruh kepada karakteristik dari peperangan.¹⁷ Adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan mendorong efektivitas dan lethality dari satuan yang melaksanakan operasi. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk memprioritaskan pelatihan dan pembekalan personel individu sesuai realitas daerah operasi, sehingga mampu mengintegrasikan skill prajurit, sistem senjata, logistik dan aset lainnya dengan tepat.

Ketidaksiapan dalam mendukung distribusi logistik dengan cepat dan tepat akan mengurangi efektivitas pelaksanaan penugasan. Permasalahan distribusi logistik senantiasa menjadi hal yang klasik dan merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas operasi satuan yang bertugas di Papua. Salah satunya adalah kendala pada saat pendistribusian ke Titik Kuat atau salah satu Pos Satgas yang hanya bisa diakses melalui udara. Kondisi tersebut menjadikan pendistribusian logistik menjadi terhambat ditambah cuaca di Papua yang sangat cepat berubah-ubah. Medan penugasan Papua berupa *restricted terrain* dengan kontur pegunungan tinggi dan terjal memberikan tantangan yang lebih tinggi terutama dari sisi distribusi maupun evakuasi sehingga dalam hal ini diperlukan armada transportasi yang cukup dan mumpuni agar pendistribusian logistik maupun evakuasi personel dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga momentum operasi tetap dapat berjalan dengan baik. Di sinilah **Satgas Dukungan** berperan dalam memberikan dukungan dalam hal pendistribusian logistik dan evakuasi personel, termasuk dukungan lainnya yang bertujuan mendukung

Satgas Pemburu dan Satgas Pengamanan menyelesaikan tugas pokoknya. Diharapkan Satgas Pemburu dan Pengamanan tidak lagi terbebani dengan urusan logistik, evakuasi, transportasi, dsb, sehingga mereka tetap fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing. **Satgas Teritorial** melaksanakan berbagai kegiatan berkolaborasi dengan Kementerian terkait untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi di Papua, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Di bidang kesehatan dapat diselenggarakan Program Papua Sehat yaitu pelaksanaan Bhakti Kesehatan dengan membentuk pemenuhan fasilitas kesehatan yang ada di Papua, pengobatan gratis, termasuk bantuan kesehatan bagi keluarga dan simpatisan KSTP di Papua guna merangkul dan menggalang KSTP beserta simpatisannya. Di bidang pendidikan program yang dapat digelar yaitu **Program Papua Pintar** di mana dalam program ini dilakukan dengan membantu pemenuhan fasilitas pendidikan, pemberian buku-buku dan alat tulis, internet gratis, beasiswa untuk pelajar putra asli Papua, tenaga pengajar dari Aparat Teritorial setempat, dsb. Program berikutnya yaitu **Program Papua Sejahtera** yang dilakukan dengan membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Papua, seperti air, listrik, bahan makanan, termasuk pembangunan honai, rumah ibadah, sekolah serta fasilitas umum lainnya. Diharapkan dengan program-program tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap NKRI sehingga keinginan untuk merdeka dan ancaman teror dari KSTP di Papua dapat dinetralisir.

Dari uraian pembahasan di atas dapat **disimpulkan** bahwa pelaksanaan tugas operasi di wilayah Papua dinilai masih belum optimal dikarenakan masih adanya kerugian personel dan materiil baik warga sipil maupun Personel Satgas TNI

¹⁷Williamson Murray dan MacGregor Knox, 2001, *The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050*, Cambridge: Cambridge University Press, halaman 177-178.

yang disebabkan karena kemampuan dan kekuatan tempur satuan-satuan jajaran TNI AD dan penerapan pola operasi dalam rangka mengatasi KSTP di Papua belum optimal. Adapun optimalisasi kemampuan dan kekuatan tempur satuan-satuan jajaran TNI AD dan penerapan pola operasi dalam rangka mengatasi KSTP di Papua dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut: 1) Melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS) dengan materi-materi yang dapat meningkatkan militansi, disiplin tempur, naluri tempur, mahir navigasi dan manuver, mahir menembak, mahir gerakan perorangan, mahir beladiri dan fisik yang prima serta pada latihan dengan metode drill taktis, drill tempur dan gladi lapangan baik bagi satuan yang *standby* di *homebase* dan akan berangkat tugas operasi dilatihkan dengan sifat **dua pihak dikendalikan atau dua pihak tidak dikendalikan** untuk menimbulkan realisme latihan dan meningkatkan militansi dan naluri tempur prajurit. 2) Satuan bekerjasama dengan Universitas atau Praktisi IT untuk menciptakan Teknologi *Surveillance Post System* untuk membantu sistem pengamanan Pos Satgas TNI di Papua. 3) Membekali prajurit dengan pengetahuan dan keterampilan Prajurit untuk mengajar dan bercocok tanam di daerah operasi untuk membantu memenuhi kebutuhan logistik sendiri dan membantu masyarakat, sehingga dapat meningkatkan moril prajurit. 4) Melaksanakan Pembinaan Jasmani secara rutin dan benar dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di satuan seperti seperti Senam Sparko, lari barbel dan program lari dan program lainnya dengan target nilai batas minimal kesemaptaan jasmani adalah 71, sehingga prajurit akan memiliki fisik yang prima dan dapat menaklukkan medan di daerah operasi di Papua dengan mudah. 5) Satuan Infanteri swadaya pengadaan drone. 6) Melatih prajurit untuk menggunakan dan menembak mortir pada malam hari dikombinasikan dengan penggunaan

drone. 7) Menerapkan **pola operasi tempur yang adaptif** dalam rangka mengatasi KSTP di Papua dengan mengklasifikasikan daerah operasi di wilayah Papua menjadi 3 kategori yaitu daerah hitam, daerah kelabu dan daerah putih. 8) Menerapkan konsep operasi dengan menggunakan metode *Hard Power* dan metode *Soft Power*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat **disarankan** ke Komando Atas dan satuan-satuan Infanteri jajaran TNI AD yang akan dan sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal yaitu: 1) Bagi satuan-satuan yang *standby* di *homebase*, selain melaksanakan latihan sesuai Proglatsi, agar diperbanyak melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS) dengan materi-materi yang dapat meningkatkan militansi, disiplin tempur, naluri tempur, mahir navigasi dan manuver, mahir menembak, mahir gerakan perorangan, mahir beladiri dan fisik yang prima serta pada latihan dengan metode drill taktis, drill tempur dan gladi lapangan dilatihkan dengan sifat **dua pihak dikendalikan atau dua pihak tidak dikendalikan** untuk menimbulkan realisme latihan dan meningkatkan militansi dan naluri tempur prajurit. 2) Dalam rangka menjawab penerapan **pola operasi yang adaptif**, agar Slatad menyusun materi latihan dalam Proglatsiapops bagi satuan yang akan melaksanakan tugas operasi ke wilayah Papua sesuai dengan klasifikasi daerah yang akan dituju, dimana untuk klasifikasi Daerah Hitam melaksanakan latihan dengan materi 100% Tempur, Daerah Kelabu melaksanakan latihan dengan materi 80% Tempur dan 20 % Binter dan Daerah Putih melaksanakan latihan dengan materi 80% Tempur

dan 20 % Binter. 3) Agar Pussenif, **Mabesad dan Mabes TNI** untuk menciptakan dan mengadakan Teknologi *Surveillance Post System* untuk membantu sistem pengamanan Pos Satgas TNI di Papua. 4) Agar Pussenif, Mabesad dan Mabes TNI untuk melengkapi satuan yang akan melaksanakan tugas operasi ke wilayah Papua dengan drone. 5) Agar **Mabesad dan Mabes TNI** mengajukan kenaikan hak-hak dan kesejahteraan prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua. 6) Agar **Mabesad dan Mabes TNI** memberikan izin kepada Satgas TNI di Papua untuk membawa dan menggunakan senjata mortir untuk mengatasi KSTP di Papua dikombinasikan dengan drone agar perkenaan akurat dan dapat meminimalisir salah sasaran. 7) **Mabes TNI** disarankan menerapkan pola operasi tempur yang adaptif dalam rangka mengatasi KSTP di Papua dengan mengklasifikasikan daerah operasi di wilayah Papua menjadi 3 kategori yaitu daerah hitam, daerah kelabu dan daerah putih. 8) **Mabes TNI** disarankan menerapkan konsep operasi dengan menggunakan metode *Hard Power* dan metode *Soft Power*. 9) **Mabes TNI** disarankan agar terdapat keterlibatan Kementerian terkait dalam mendukung kegiatan teritorial guna merebut hati dan pikiran masyarakat Papua sekaligus mewujudkan kesejahteraan di wilayah. 10) Keberadaan Satgas Dukungan pada organisasi Satgas yang direkomendasikan oleh penulis diharapkan mampu mengurangi beban Satuan depan dalam hal distribusi logistik, evakuasi personel maupun transportasi sehingga momentum operasi di Papua tidak terhenti.

Demikian tulisan mengenai **Optimalisasi Operasi Penanganan Konflik di Papua Guna Mengatasi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP)** dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI ini dibuat mudah-mudahan memberikan manfaat kepada satuan-satuan Infanteri dan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

(Esay terbaik pada pelaksanaan Apel Dansat Tersebar Kodam I/Bukit Barisan TA 2023 tentang konsepsi/optimalisasi operasi di Papua)

INTERNALISASI PANCASILA GUNA MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PRAJURIT

Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial, politik dan agama dengan cara drastis dan kekerasan. Dalam perkembangannya, bahwa radikalisme kemudian diartikan juga sebagai paham yang menginginkan perubahan besar. Hal ini dapat menyebabkan perubahan yang cepat dan berpotensi menyimpang dari norma-norma yang ada. Upaya untuk memahami akar masalah dan menyediakan ruang bagi dialog terbuka dan konstruktif dapat membantu mencegah radikalisme yang berbahaya. Pancasila sebagai ideologi negara mengikat seluruh warga negara Indonesia, dan setiap warga negara diwajibkan untuk menghormati dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan identitas nasional dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan pembangunan di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Prajurit merupakan sebuah profesi yang bersifat khusus dimana menurut tradisi Stoic, tugas paling mulia prajurit adalah menanggung bahaya kematian dan luka serta tunduk pada nasib kematian tertentu.¹



**OLEH : MAYOR INF MUKHLIS, S.A.G.
(KASILITBANG BAGLITBANG DISBINTALAD)**

Pengertian ideologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan konsep bersistem yang menjadi asas pendapat guna memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, maknanya adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan, atau paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara, maka ideologi Pancasila menjadi pedoman arah negara mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah bangsa ternyata ideologi Pancasila tidak selalu di implementasikan secara murni dan konsisten sehingga muncul rongrongan terhadap eksistensi ideologi Pancasila.

¹ Clausewitz di abad 21. unhan



Sebagai suatu ideologi negara, Pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami pasang surut. Beberapa fakta disampaikan sbb: 1) Menhan Ryamizard dalam sambutannya saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, seperti dikutip Antara. Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sekitar 3% anggota TNI terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul *"Menhan Prihatin Ada Prajurit TNI Terpapar Radikalisme"*.² Selain itu, ada kelompok mahasiswa sebanyak 23,4% setuju dengan negara Islam/khilafah, lalu 23,3% pelajar SMA. 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila." 2) Melalui survei Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (UGM) bersama Indonesia Presidential Studies (IPS) berjudul *Pandangan Publik tentang Pancasila*, diketahui hasilnya: a) 90,6% responden menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pandangan bahwa Pancasila adalah Ideologi NKRI yang dapat digunakan untuk menentukan identitas bangsa Indonesia. b) Sementara 63,5%

masyarakat juga sangat setuju / setuju dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi untuk mewujudkan negara Indonesia yang religius berdasarkan agama mayoritas/Islam.³ 3) Setara Institute bersama *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) merilis hasil survei kondisi toleransi siswa SMA yang menunjukkan

83,3% siswa SMA responden mendukung persepsi Pancasila bukan ideologi yang permanen atau bisa diganti.⁴ 4) Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa mengatakan Pratu Lukius desersi dan membelot dengan bergabung ke KKB Papua pada tanggal 12 Februari 2021, artikel detiknews, *"Cap Pengkhianat ke Oknum Tentara Membelot Gabung KKB Papua"*.⁵



Internalisasi Pancasila bagi prajurit diharapkan dapat mewujudkan nasionalisme prajurit sebagai garda terdepan pertahanan negara. Sebagaimana fakta bahwa ada oknum prajurit yang terpapar radikalisme,

²<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/19/13153421/menhan-prihatin-ada-prajurit-tni-terpaparadikalisme#.Editor>

³Harian Republika 12 April 2021 (link BPIP)

⁴Harian republika 18 mei 2023

⁵<https://news.detik.com/berita/d-5536334/cap-pengkhianat-ke-oknum-tentara-membelot-gabung-kkb-papua>.

maka harus ada upaya memelihara, meningkatkan dan memulihkan kondisi mental ideologinya. Pada sisi lainnya dimana generasi muda Indonesia yang dikenal sebagai kaum milenial dan generasi Z menunjukkan kecenderungan berpendapat bisa mengganti ideologi Pancasila. Generasi muda yang akan menjadi sumber prajurit dan generasi muda prajurit selanjutnya. Mudah-mudahan akses informasi baik bahan bacaan maupun informasi lainnya melalui media sosial (youtube, facebook, twitter, tiktok, dsb) juga turut memengaruhi cara berpikir dan merespons suatu permasalahan khususnya tentang ideologi. TNI sebagai lembaga yang sangat dipercaya masyarakat merupakan kebanggaan bagi segenap prajurit.⁶ Profesi prajurit yang sungguh mulia menjadi acuan keteladanan bagi keluarga maupun masyarakat di sekitarnya, maka mewujudkan jatidiri TNI ditengah keluarga dan masyarakat menjadi sebuah tantangan.

Tahapan proses dalam kegiatan internalisasi Pancasila guna mencegah bahaya radikalisme di kalangan prajurit melalui: **Pertama**, Pemahaman ideologi Pancasila. Proses pembinaan pemahaman nilai Ideologi Pancasila melalui pembelajaran/penataran/ pengkajian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila guna membangun kesadaran dan kesepahaman prajurit untuk memperkuat identitas kebangsaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Proses pembinaan pemahaman ini melalui pembelajaran/penataran/ pengkajian pengetahuan teori tentang ideologi Pancasila dan sosialisasi tentang Pancasila. **Kedua**, Penanaman ideologi Pancasila. Penanaman ideologi Pancasila merupakan upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan nilai - nilai Pancasila dalam diri setiap prajurit. Penanaman nilai - nilai ini bertujuan untuk membentuk kesadaran, sikap dan perilaku yang



konsisten dengan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan sehari - hari. Dalam lingkungan prajurit proses penanaman ini dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain; diskusi tentang Pancasila, simulasi Pancasila, seminar/sarasehan tentang Pancasila. **Ketiga**, Internalisasi ideologi Pancasila. Internalisasi nilai ideologi Pancasila merupakan proses di mana prajurit mengadopsi, memahami, dan menerapkan nilai - nilai Pancasila dalam sikap, pemikiran dan perilaku sehari - hari. Internalisasi tersebut mengarah pada kesadaran yang mendalam tentang pentingnya nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam lingkungan prajurit bertumpu kepada upaya untuk membudayakan dan menghidupkan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, menghormati kebebasan orang lain dalam hidup beragama, hidup rukun, saling mencintai dan menghormati dengan berbagai bentuk perbedaan yang ada (suku, agama, ras dan antar golongan). Proses internalisasi dapat dilaksanakan dengan: a) Meningkatkan iman dan takwa. Prajurit TNI AD wajib memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agamanya. b) Bersikap dan berperilaku sesuai akhlak/ moral yang mulia. Setiap prajurit yang mengamalkan Pancasila akan melahirkan sikap saling menghormati, suka menolong, sadar akan hak dan kewajiban,

⁶Sindonews 03 april 2022

mengembangkan perbuatan yang luhur, adil, saling menghargai, mau bekerja keras dan sikap positif lainnya. c) Hidup sederhana. Prajurit yang mengamalkan Pancasila hidup dalam kesederhanaan dan menjauhkan diri dari kehidupan yang berlebihan. Kesederhanaan tercermin dalam beberapa hal: kesatu, dalam bertutur kata. Menggunakan tata bahasa yang benar, membiasakan diri dalam mengungkapkan pendapat/perasaan dengan tutur kata yang sopan, santun serta sadar akan kesamaan kedudukannya terhadap orang lain. Kedua, dalam berpakaian. Berpakaian tidak berlebihan serta tidak menonjolkan diri, memperlihatkan sifat dan gejala eksentrik yang senantiasa berupaya menarik perhatian, disamping selalu rapi dan bersih dalam berpakaian. Ketiga, dalam rumah tangga. Rumah tangganya menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya dengan menunjukkan kesederhanaan dan meniadakan gaya hidup eksklusif sehingga tidak memicu kecemburuan sosial. Keempat, dalam pergaulan. Sederhana dalam bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, mengandung arti senantiasa bersikap ramah-tamah, suka bertegur sapa, menyatu dan tidak

mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat serta selalu menjaga kerukunan pergaulan dengan lingkungan. Kelima, sederhana dalam bersikap. Sederhana dalam bersikap dengan senantiasa memberikan keteladanan yang baik dan tidak arogan dengan mendorong warga sekitar untuk bersama membangun lingkungannya serta menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan. d) Tanggung jawab. Prajurit yang mengamalkan Pancasila akan senantiasa bertanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri, terhadap tugas maupun terhadap keluarganya serta bermasyarakat. e) Keimanan. Memelihara dan meningkatkan keimanan dengan menjalankan ajaran dan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya. f) Memelihara kerukunan, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, serta menjaga keutuhan keluarga. g) Keteladanan. Menjadi teladan yang baik, terutama dibidang mental, moral, akhlak, budi pekerti, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Internalisasi Pancasila dipengaruhi kondisi lingkungan, baik lingkungan satuan maupun dipengaruhi lingkungan di luar satuan. Kemampuan yang dimiliki satuan diantaranya: 1) Terorganisir. satuan pembinaan mental telah terorganisir sesuai perkasad nomor 102 / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 dimana satuan dinas pembinaan mental memiliki sub dinas pembinaan mental ideologi dan kejuangan yang bertugas khusus atau membidangi ideologi serta menyiapkan materi - materi berkaitan dengan ideologi Pancasila. Satuan bintaljarahdam sesuai Perkasad nomor 10 tahun 2021 tentang organisasi



bintaljarahdam uji coba memiliki pejabat kepala seksi pembinaan mental ideologi dan kejuangan. 2) Tersebar. Satuan dinas pembinaan mental tersebar sesuai tingkatan satuannya, baik kotama maupun balakpus.

Selain kemampuan satuan juga terdapat kelemahan satuan dinas pembinaan mental diantaranya: 1) Keterbatasan tenaga pembina mental. Keterbatasan personel tenaga pembina mental baik kualitas maupun kuantitas. 2) Keterbatasan tenaga ahli informasi. Ketidadaan ahli ini menghambat terlaksananya kegiatan yang bersifat digital dan membutuhkan keahlian teknologi informasi.

Faktor lingkungan di luar satuan yang turut memengaruhi internalisasi Pancasila diantaranya: 1) Peluang kerjasama antar instansi. Adanya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan peluang untuk bekerjasama mengembangkan materi dan pola pembinaan Pancasila. 2) Program penanggulan radikalisme. Pemerintah memiliki komitmen dalam menekan radikalisme. Program ini membuka peluang kerjasama satuan dengan pemerintah (pusat/ daerah). 3) Maraknya paham radikalisme. Berkembangnya paham radikalisme membawa dampak dan pengaruh dalam cara berpikir prajurit yang selanjutnya akan termanifestasi dalam tingkah laku. 4) Keterlibatan pihak swasta. Minimnya keterlibatan pihak swasta dalam upaya mereduksi dan meniadakan berkembangnya paham radikal dalam masyarakat.

Menyadari perkembangan lingkungan dan ilmu pengetahuan serta dunia digital 4.0, maka penting melaksanakan internalisasi Pancasila di kalangan prajurit. Urgensi pembinaan disebabkan beberapa faktor, diantaranya berkembangnya paham radikal. Prajurit

juga merupakan panutan/teladan di dalam lingkungan keluarganya dan di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor internal satuan maupun eksternal. Perkembangan paham radikalisme dengan berbagai faktor pendukung dan belum terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan deradikalisasi menjadi kendala yang dihadapi dalam internalisasi Pancasila. Berbagai metode dapat ditempuh dalam pembinaan misalnya ceramah Pancasila, simulasi Pancasila, kaderisasi tenaga pembina mental dan sinier memanfaatkan studio Dinas Pembinaan Mental dalam memproduksi materi Pancasila.

Penguatan jiwa nasionalisme prajurit dapat dilaksanakan melalui kegiatan internalisasi Pancasila, baik pemeliharaan maupun peningkatan serta pemulihan kondisi mental ideologi. Untuk prajurit yang merosot kondisi mentalnya karena terpengaruh paham radikalisme dapat dilaksanakan pemulihan kondisi mental dengan konseling, pemahaman, penanaman dan internalisasi ideologi Pancasila oleh tenaga bintal ideologi. Keberhasilan pembinaan mental ideologi tidak terlepas dari proses yang berkelanjutan, maka disarankan melaksanakan pembinaan secara berkala dengan dukungan program kerja dan anggaran yang memadai.

CORPS POLISI MILITER TNI ANGKATAN DARAT

YANG PROFESIONAL, MODERN, ADAPTIF, DAN TANGGUH DALAM MENJAGA DISIPLIN DAN KEAMANAN



OLEH : MAYOR CPM ADY JIMMI SIHOMBING, S.H.
(KASIPEN PUSPOMAD)

Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat memiliki peran sentral dalam menjaga disiplin, tata tertib, dan keamanan internal di lingkungan militer. Dalam era dinamika dan perubahan yang cepat, Corps Polisi Militer harus mampu menjalankan tugasnya dengan prinsip profesionalisme, modernitas, adaptabilitas, dan tangguh yang tak tergoyahkan. Artikel ini akan mengulas tugas utama Corps Polisi Militer TNI AD dan bagaimana prajurit Polisi Militer TNI AD berupaya menjadi kekuatan profesional, modern, adaptif, dan tangguh.

Corps Polisi Militer TNI AD dalam menjaga disiplin dan keamanan Corps Polisi Militer TNI AD bertanggung jawab atas berbagai tugas utama, diantaranya:

1. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan organisasi, kesiapan satuan, material khusus, pengkajian, penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur, pembinaan sejarah dan tradisi mewujudkan kemampuan satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiel TNI AD dan objek vital TNI AD, pembinaan penegakkan hukum (Gakkum).
3. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan razia, patroli Polisi Militer, penegakkan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD dan pembinaan Provos.
4. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penyelidikan kriminal.
5. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan protokoler kenegaraan, pengawalan bermotor VIP TNI, personel dan material TNI AD dan pengendalian lalu lintas militer serta kepentingan TNI AD lainnya.
6. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengurusan tahanan militer, tuna tertib militer dan instalasi militer, pengurus tahanan operasi militer, tahanan keadaan bahaya, tawanan perang serta intermiran perang.



Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas merupakan kesuksesan Corps Polisi Militer TNI AD dalam menjalankan tugas-tugasnya terletak pada profesionalisme yang tinggi. Prajurit Polisi Militer harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum militer, etika, dan nilai-nilai kemiliteran. Keahlian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan adil dalam setiap situasi.

Modernitas teknologi dalam penegakan hukum, berperan penting dalam tugas Corps Polisi Militer TNI AD. Penggunaan sistem keamanan elektronik, analisis data, dan teknologi pelacakan memberikan alat yang diperlukan untuk memantau dan mengawasi lingkungan militer dengan lebih efisien. Integrasi teknologi memungkinkan Corps Polisi Militer untuk merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat.

Dalam perkembangannya, Polisi Militer TNI Angkatan Darat telah meningkatkan pelayanan terhadap tahanan/narapidana. Pomdam Jaya dan Pomdam Siliwangi telah memiliki instalasi tahanan *Super Maximum Security (SMS)* yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan narapidana. SMS merupakan bentuk penataan kembali manajemen pemasyarakatan guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan dalam perspektif global.

SMS Pomdam Jaya dan Pomdam Siliwangi dilengkapi dengan teknologi keamanan terkini dan sistem pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di dalam tahanan dan memastikan keamanan para narapidana.

Dalam pelayanan terhadap narapidana, SMS Pomdam Jaya dan Pomdam Siliwangi juga memberikan fasilitas yang memadai seperti ruangan tidur yang nyaman, makanan yang sehat dan bergizi, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, para narapidana juga diberikan akses untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi dan pendidikan guna membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Dengan adanya instalasi tahanan *Super Maximum Security (SMS)* di Pomdam Jaya dan Pomdam Siliwangi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap narapidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selanjutnya *Command Center* Pomdam Jaya adalah pusat komando dan kontrol yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Polisi Militer di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa informasi mengenai *Command Center* Pomdam Jaya:

- *Command Center* Pomdam Jaya dilengkapi dengan teknologi canggih dan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh personel militer yang bertugas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

- Selain itu, *Command Center* Pomdam Jaya juga berperan dalam mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dengan pihak keamanan lainnya seperti kepolisian dan satuan pemadam kebakaran.

Dengan adanya *Command Center* Pomdam Jaya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Adaptif terhadap perubahan, situasi dan ancaman dalam lingkungan militer dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, adaptif merupakan kunci sukses Corps Polisi Militer TNI AD. Pelatihan rutin, latihan simulasi, dan program pengembangan memastikan bahwa anggota Corps Polisi Militer siap menghadapi berbagai skenario dan tugas yang baru.

Tangguh dalam menghadapi tantangan adalah ciri penting dalam setiap anggota Corps Polisi Militer TNI AD. Dalam menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum, prajurit Polisi Militer TNI AD dapat menghadapi situasi yang kompleks, berisiko tinggi, atau bahkan mengancam nyawa. Kemampuan untuk tetap tenang dan berfokus dalam situasi yang penuh tekanan adalah aset berharga dalam menjalankan tugas ini.

Oleh karenanya Corps Polisi Militer TNI AD memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga disiplin dan keamanan dalam lingkungan militer. Dengan fokus pada profesionalisme, modernitas teknologi, adaptif, dan tangguh, Prajurit Polisi Militer TNI AD mengukir kualitas baru dalam penegakan disiplin dan keamanan. Melalui upayanya, Corps Polisi Militer TNI AD tidak hanya menjaga tata tertib, tetapi juga membentuk prajurit Pomad yang profesional, modern, adaptif, dan tangguh di tengah tantangan zaman.





**OLEH : MAYOR INF SYAFIUDDIEN HASAN
(KASIMINDIK BAGMINDIK SECAPAAD)**

PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS SKS

PRODI DIKTUKPA TNI AD PROGRAM DIPLOMA-3 (AHLI MADYA) DI SECAPAAD

bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat.

Kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2010 sampai 2035 nanti, bangsa Indonesia akan dikaruniai potensi sumber daya manusia (SDM) berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa, dan dapat kita manfaatkan dengan baik untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan Negara. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.¹ Dimana TNI AD memiliki komando pendidikan yang mendidik para Perwira dan Calon Perwira di Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapaad), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), dan komando utama pengembangan dan

Manusia merupakan makhluk yang dapat berfikir dengan bijaksana sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat, artinya manusia tidak akan mampu hidup apabila tidak ada bantuan dari orang lain. Dengan demikian selama hidupnya manusia lebih banyak berhubungan dengan manusia lain. Perkembangan kehidupan di masyarakat dewasa ini cenderung semakin kompleks, oleh karena itu dengan beragamnya dan meningkatnya perkembangan zaman ini khususnya pada era globalisasi di abad 21 ini. Dimana di suatu zaman yang berbeda dengan abad sebelumnya terjadinya perubahan secara menyeluruh baik dari segi tata kehidupan sampai dengan kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan segala informasi terhadap orang lain secara cepat. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Baik di

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat

doktrin yaitu Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad). Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat harus terus berbenah dan mereformasi diri sehingga mampu beradaptasi dan menjadi investasi bagi organisasi untuk dapat melaksanakan tugasnyadihadapkanpada perkembangan lingkungan yang semakin kompleks², merupakan salah satu penyampain Kepala Staf Angkatan Darat sebagai harapan peningkatan produktivitas dan transformasi yang unggul serta tata kelola yang baik di lembaga pendidikan jajaran TNI AD dalam rangka menuju lembaga pendidikan berstandar Nasional. Perkembangan situasi dan kondisi di era globalisasi yang semakin pesat mendorong perubahan yang sangat signifikan menjadikan penyelenggaraan pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks termasuk pendidikan di lingkungan TNI AD. Pola pendidikan di jajaran lembaga pendidikan di TNI AD sudah menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Serdik (peserta didik) dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Serdik dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi di Pendidikan Tinggi.³

Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) yangdigunakan dalam sistem pendidikan di Lemdik jajaran TNI AD mempunyai beberapa keuntungan terutama bagi Serdik, yaitu 1) mendapatkan peyetaraan Program Studi dan mendapatkan gelar, 2) mendapatkan ijazah yang berstandar Nasional, 3) memiliki keleluasaan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di luar kedinasan. Adapun keuntungan yang bisa diperoleh bagi Gadik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yaitu 1) mendapatkan penyetaraan kompetensi yang dimilikinya, 2) dapat mendesain pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lampau

(CPL) yang ditentukan dalam Program Studi, 3) mempunyai peluang untuk mengajar di luar Lemdik TNI AD. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan TNI AD terdapat beberapa sektor yang perlu menjadi perhatian antara lain perubahan budaya organisasi di lembaga pendidikan, pengembangan metode belajar, serta peningkatan kualitas komponen pendidikan.

Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapaad) adalah lembaga pendidikan militer untuk membentuk Bintara terpilih menjadi Perwira yang handal dengan perekrutan dari prajurit terpilih yang melaksanakan pendidikan keperwiraan yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat dan selesai mengikuti pendidikan dilantik menjadi Perwira dengan pangkat Letnan Dua. Dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Dasar Keperwiraan bagi Calon Perwira yang memiliki sikap perilaku Sapta Marga, berpengetahuan dan berketerampilan sesuai dasar golongan Perwira dan kemampuan jasmani yang semapta serta mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan dan program TNIAD, dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Dengan Visi “Menjadikan Secapaad sebagai lembaga pendidikan pembentukan Perwira yang terbaik di lingkungan TNI AD”. Dalam penyelenggaraan pendidikan Secapaad berpedoman pada kurikulum yang selalu melaksanakan penyempurnaan dengan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan di samping 9 komponen lainnya, kurikulum menjadi bagian yang paling penting karena berisi pedoman tentang program yang harus dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik guna mencapai tingkat kemampuan dan keterampilan yang menjadi sasaran. Melalui kegiatan revisi kurikulum ini, diharapkan metode Jam

²<https://tniad.mil.id/tni-ad-membenahi-sistem-pendidikan-untuk-mengikuti-standar/>

³Kemenristekdikti, 2016. Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pelajaran (JP) yang dirasakan sudah tidak relevan dapat diganti dengan metode SKS yang lebih mawadahi kebutuhan pendidikan. Penyusunan kurikulum bagi program pendidikan merupakan implementasi dari sistem manajemen mutu pendidikan di lingkungan TNI AD yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuntut adanya perubahan sistem pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan pembentukan Perwira di Secapaad berpedoman dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD Program Diploma-3 (Ahli Madya)⁴ dengan program untuk menghasilkan lulusan Perwira Pertama TNI AD yang memiliki kualitas setara dengan kualifikasi yang disepakati pada level 5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Merupakan Program gabungan untuk mencapai Ahli Madya pada Pendidikan Pembentukan Perwira tersebut dengan pelaksanaan pendidikan ditempuh selama 5 bulan dengan beban belajar sebanyak 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Pengembangan kurikulum sebelumnya berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/1016/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Kurikulum Pendidikan TNI AD. Substansi Kurikulum tersebut saat ini perlu diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020, dimana perubahan dan perkembangan tersebut perlu diadaptasi dalam kurikulum melalui penyempurnaan atau revisi substansi ketentuan yang dimuat di dalamnya, khususnya perubahan kurikulum dengan sistem JP (Jam Pelajaran) menjadi sistem SKS (Sistem Kredit Semester). Kurikulum Program Studi Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD Program Diploma-3 (Ahli Madya) merupakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan Perwira Pertama TNI AD dengan menyiapkan

Serdik bisa menjadi seorang trainer yang kompeten dan profesional pada bidangnya masing-masing.

Terdapat aturan mengenai bidang pendidikan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana regulasi ini memberikan peluang yang besar bagi setiap personel atau prajurit dalam menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat dan berstandar nasional dengan mengacu pada aturan yang berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi. Menjadikan hal terpenting dalam penyiapan dan perencanaan yang berkaitan dengan kesiapan komponen pendidikan, diantaranya peningkatan kualitas tenaga pendidik (Gadik). Pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal, informal yang disebut sebagai pembelajaran seterusnya. Kita ketahui bersama bahwa Serdik yang sudah melaksanakan pendidikan mendapatkan pengakuan yang tertuang dalam penerbitan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal untuk melaksanakan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi personel TNI AD yang sebelumnya telah belajar melalui pendidikan yang tidak formal untuk masuk ke pendidikan secara formal dan bagi perguruan tinggi untuk merekrut Gumil, Dosen, Instruktur dan tenaga kependidikan yang berasal dari praktisi ahli yang belum mempunyai ijazah S1/S2 untuk mengakui capaian pembelajaran individu yang tidak berijazah pendidikan tinggi dalam rangka memberikan

⁴Kurikulum Prodi Diktukpa TNI AD Program D-3 (Ahli Madya), Keputusan Kasad Nomor Kep/45a/I/2022 tanggal 30 Desember 2022

penghargaan atas kontribusi yang telah dicapainya. Hal ini dapat memanfaatkan RPL untuk melanjutkan pendidikan secara formal guna mengajukan permohonan pembebasan Satuan Kredit Semester (SKS), atas capaian pembelajaran atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil SKS yang dibebankan. Setelah dinyatakan telah menyelesaikan sisa SKS di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah atau Surat Keputusan (SK) penyetaraan. Dengan adanya program RPL ini maka waktu penyelesaian studi dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa SKS yang belum diakui atau tidak dapat dikonversi sehingga seorang Prajurit TNI AD mempunyai kesetaraan gelar yang diharapkan sesuai dengan aturan pemenuhan jumlah SKS yang harus ditempuh dalam penyelesaian suatu gelar tertentu sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan dalam program pendidikan.

Dalam kurikulum yang baru yang sudah disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/45a/I/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan pembentukan Perwira TNI AD Diploma-3 (Ahli Madya) dengan Nomor kode kurikulum Nomor: 01-B1-DIKTUKPA TNI AD-2022 sebagai dasar dalam pembentukan calon Perwira dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penyelenggaraan pendidikan kurikulum berbasis SKS yang dioperasionalkan pendidikan Prodi Diktukpa TNI AD Diploma-3 (Ahli Madya) mempunyai sasaran yang bisa diaplikasikan menjadi seorang Perwira dengan kualitas menduduki jabatan Perwira golongan VIII, yang siap menjalankan setiap tugas di satuan, sebagai berikut : 1) Sebagai pemimpin, mempunyai kemampuan kepemimpinan lapangan setingkat Platoon, mampu mengaplikasikan taktik dan teknik militer, dapat berfikir secara kritis dalam

pengambilan keputusan serta memiliki kondisi jasmani yang samapta salam rangka mendukung setiap tugas pokok Satuan; 2) sebagai manjerial, yaitu memiliki kemampuan manajerial, komunikasi efektif, dapat memberikan motivasi dan bertanggungjawab atas setiap anggota bawahanya, mendukung setiap tugas pokok satuan; 3) Sebagai Instruktur, setiap Perwira mampu melaksanakan tugas sebagai pelatih/penyelenggara latihan dengan menerapkan teknik kepelatihan dan teknik penyelenggaraan latihan sehingga dapat memberikan perubahan dalam kepelatihan di satuan dengan ilmu teknik dan taktik militer; 4) Sebagai Administrator, Perwira yang mampu melaksanakan tugas sebagai staf atau memiliki kemampuan administrasi, selalu siap sedia akan tugas dan tanggung jawabnya di Satuan.

Semakin tingginya perubahan dinamika akan perubahan situasi dan kondisi yang ada di dunia diiringi dengan perubahan sistem pola pendidikan yang di jajaran TNI Angkatan Darat sebagai penyeimbang dalam menghadapi setiap perubahan zaman yang terus berkembang pada era globalisasi ini, dengan peningkatan hasil keluaran pendidikan abis Prodi Diktukpa TNI AD Diploma-3 (Ahli Madya) di Secapaad dalam hal kualitas seorang Perwira. Perubahan sistem kurikulum berbasis SKS menjadikan beberapa lebihan yang diharapkan, sebagai salah satu faktor dalam peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai seorang prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat, diantaranya kemauan peserta didik dan pengajar dalam mencari informasi sebagai sumber referensi lain dalam pembelajaran, pelaksanaan pendidikan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, banyak materi kepelatihan dan penyelenggaraan latihan yang bisa diaplikasikan di Satuan, serta lulusan abis Prodi Diktukpa TNI AD Diploma-3 (Ahli Madya) mendapatkan pengakuan gelar Diploma-3 (Ahli Madya).



PENPAS
PENERANGAN PASUKAN
TNI ANGKATAN DARAT

Komitmen **NETRALITAS TNI**



Prajurit/PNS TNI yang mendapati alat peraga kampanye di area/lahan fasilitas TNI **segera melaporkan** ke atasan/Komandan Satuan untuk ditindaklanjuti ke KPU, Bawaslu dan aparat terkait lainnya, diselesaikan sesuai peraturan per-UU yang berlaku.

**STOP
HOAX**

Laporkan dan Klarifikasi setiap BERITA HOAX yang mengganggu/merusak **NETRALITAS TNI**, sesuai aturan hukum yang berlaku.



Prajurit/PNS TNI mulai sekarang **dilarang berfoto/selfie dengan menggunakan simbol jari** karena bisa diputarbalikkan sebagai bentuk dukungan ke Pasangan Calon.

Pelanggaran Netralitas TNI, bisa dijera UU Pemilu, Sanksi Disiplin Militer, Pidana Militer atau Pidana Umum



www.tniad.mil.id



[tni_angkatan_darat](https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat)



[@tni_ad](https://twitter.com/tni_ad)



[TNI Angkatan Darat](https://www.facebook.com/TNI Angkatan Darat)



[TNI AD](https://www.youtube.com/TNI AD)

